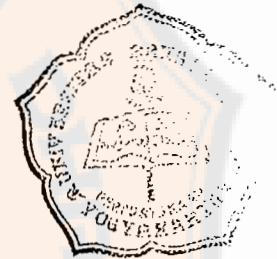


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

# DINAMIKA GOLKAR KABUPATEN KLATEN PADA PEMILU 1982 – 1987

S K R I P S I

Disusun Untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

*C. Wiwik Haryanti*

NIM : 86 214 002

NIRM : 865027200001

JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
IKIP SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1991

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**DINAMIKA GOLKAR KABUPATEN KLATEN  
PADA PEMILU 1982 – 1987**

**S K R I P S I**

Disusun Untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh :

*C. Wiwik Haryanti*

NIM : 86 214 002

NIRM : 865027200001

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
IKIP SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1991**

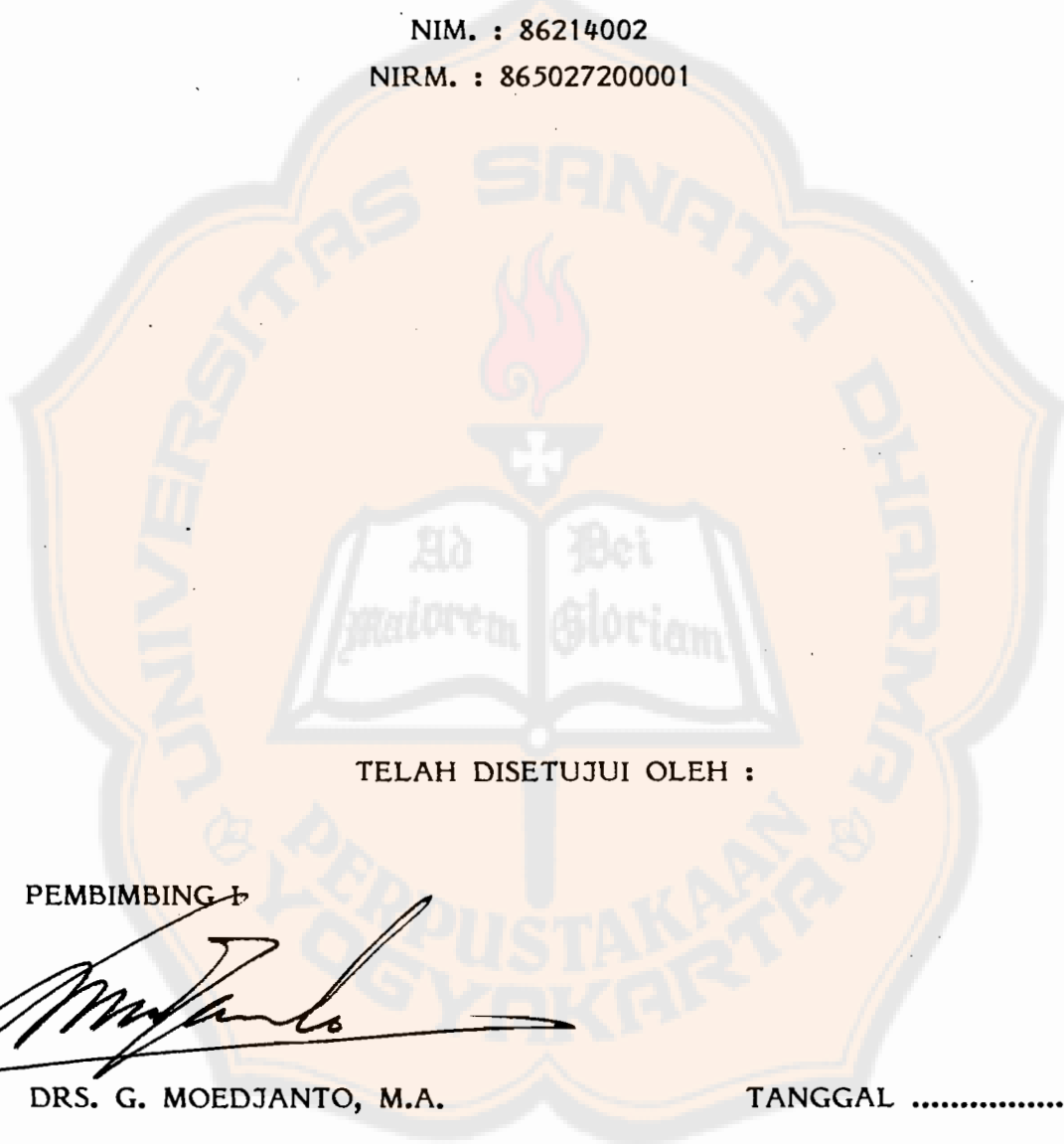
SKRIPSI  
DINAMIKA GOLKAR KABUPATEN KLATEN PADA PEMILU 1982 - 1987

OLEH :

C. WIWIK HARYANTI

NIM. : 86214002

NIRM. : 865027200001



TELAH DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

DRS. G. MOEDJANTO, M.A.

TANGGAL .....

PEMBIMBING II

DRS. A. KARDIYAT WIHARYANTO

TANGGAL .....

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

DINAMIKA GOLKAR KABUPATEN KLATEN PADA PEMILU 1982 - 1987

YANG DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH

C. WIWIK HARYANTI

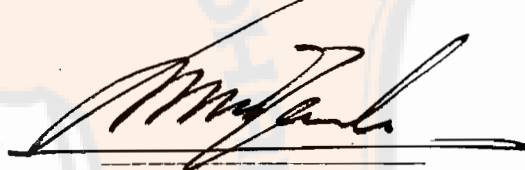
NIM. : 86214002

NIRM. : 865027200001


TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN PANITIA PENGUJI  
PADA TANGGAL 2 SEPTEMBER 1991  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI SYARAT

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
---------	------	--------------

KETUA	: Drs. G. Moedjanto, M.A.	
-------	---------------------------	---

SEKRETARIS	: Drs. J. Markiswo	
------------	--------------------	--

ANGGOTA	: Drs. A. Kardiyat Wiharyanto	
---------	-------------------------------	--

ANGGOTA	: Drs. JR. Adi Susilo	
---------	-----------------------	--

YOGYAKARTA, OKTOBER 1991

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

IKIP SANATA DHARMA

DEKAN



DRS. G. MOEDJANTO, M.A.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta KasihNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Dinamika Golkar Kabupaten Klaten Pada Pemilu 1982 - 1987".

Skripsi disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi program Sarjana pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam hal ini penulis menyadari pula bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari sempurna, disebabkan karena terbatasnya waktu, biaya dan pengetahuan penulis. Penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan dapat tersusun tanpa adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang lain.

Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A. yang telah sudi membimbing, mengoreksi skripsi ini
2. Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto yang dengan senang hati membimbing dan mendampingi penulisan skripsi ini
3. Bapak Drs. JR. Adi Susilo yang bersedia turut dalam pengujian skripsi ini

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

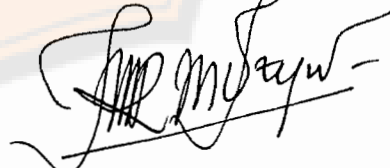
4. Bapak Ketua DPD Golkar Kabupaten Klaten beserta stafnya yang telah memberikan data-data dan fasilitas lain yang berguna bagi penulis
5. Bapak Kepala Kantor Statistik Kabupaten Klaten beserta stafnya
6. Pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung demi terselesainya skripsi ini.

Semoga amal baik dari beliau-beliau tersebut dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat imbalan yang sepantasnya.

Penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi perbaikannya diterima dengan hati terbuka. Akhirnya penulis juga mengharapkan agar skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan pembangunan serta dapat menambah bahan bacaan pada perpustakaan IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.

Yogyakarta      Oktober 1991

Penulis



C. Wiwik Haryanti

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

vi

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Pemilu Sebagai Pembaharuan Politik Indonesia .....	2
B. Perkembangan Golkar Pada Pemilu 1971 - 1987 .....	6
C. Perumusan Masalah Dan Sistematika Pembahasannya .....	12
D. Metode Penelitian .....	13
BAB II     DINAMIKA SEBAGAI PEMBAHARUAN POLITIK GOLKAR .....	15
A. Pengertian Dinamika .....	15
B. Perlunya Dinamika Bagi Organisasi .....	17
C. Proses Dinamika Golkar Terhadap Perubahan Perundang-undangan .....	21

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III	KONDISI SOSIO GEOGRAFIS KABUPATEN	
	KLATEN .....	24
	A. Letak Dan Luas Wilayah .....	24
	B. Keadaan Topografi .....	26
	C. Keadaan Tanah .....	27
	D. Kondisi Iklim .....	30
	E. Keadaan Penduduk .....	33
BAB IV	DINAMIKA GOLKAR PADA PEMILU 1971 DAN	
	PEMILU 1977 .....	38
	A. Perkembangan Golkar Pada Pemilu	
	1971 .....	40
	B. Perkembangan Golkar Pada Pemilu	
	1977 .....	48
BAB V	DINAMIKA GOLKAR PADA PEMILU 1982 .....	56
	A. Pelaksanaan Kampanye .....	58
	B. Pelaksanaan Pemungutan Suara .....	68
	C. Penetapan Hasil Akhir .....	65
	D. Evaluasi Pemilu 1982 .....	68
BAB VI	DINAMIKA GOLKAR PADA PEMILU 1987 .....	75
	A. Pelaksanaan Kampanye .....	77
	B. Pelaksanaan Pemungutan Suara .....	84
	C. Penetapan Hasil Akhir .....	86
	D. Evaluasi Pemilu 1987 .....	90
BAB VII	PERBANDINGAN DINAMIKA GOLKAR PADA	
	PEMILU 1982 DAN 1987 .....	94
	A. Tahap Persiapan .....	95
	B. Pelaksanaan Kampanye .....	97



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	C. Perolehan Suara Dan Hasil Pemilu .....	100
	D. Evaluasi Kemenangan Golkar .....	107
BAB VIII	KESIMPULAN .....	113
DAFTAR PUSTAKA	.....	120
LAMPIRAN	.....	125



DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 HASIL PEMILU 1971 KABUPATEN KLATEN .....	44
TABEL 2 HASIL PEMILU 1977 KABUPATEN KLATEN .....	52
TABEL 3 HASIL PEMILU 1982 KABUPATEN KLATEN .....	67
TABEL 4 HASIL PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD II TAHUN 1982 KABUPATEN KLATEN .....	72
TABEL 5 HASIL PEMILU 1987 .....	87
TABEL 6 HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 1987 KABUPATEN DATI II KLATEN .....	89
TABEL 7 HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU 1987 .....	102
TABEL 8 PASANG SURUT PROSENTASE PEMILU 1982 - 1987 BAGI P ARPOL DAN GOLKAR DI DAERAH KABUPATEN KLATEN .....	103
TABEL 9 HASIL PROSENTASE PEMILU 1987 DIBANDING PEMILU TAHUN 1971, 1977, 1982 .....	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1 PELAKSANAAN KAMPANYE GOLKAR PADA TANGGAL 23 APRIL 1982 DI MONUMEN JUANG 45 KLATEN .....	62
GAMBAR 2 PELAKSANAAN KAMPANYE GOLKAR PADA TANGGAL 25 MARET 1982 DI LAPANGAN MERDEKA KARANGANOM .....	63
GAMBAR 3 PELAKSANAAN KAMPANYE GOLKAR DI MONUMEN JUANG 45 KLATEN .....	81
GAMBAR 4 PELAKSANAAN KAMPANYE GOLKAR DI MONUMEN JUANG 45 KLATEN .....	82
GAMBAR 5 PELAKSANAAN KAMPANYE GOLKAR DI LAPANGAN MERDEKA KARANGANOM KLATEN .....	83
GAMBAR 6 PELAKSANAAN KAMPANYE GOLKAR DI MONUMEN JUANG 45 KLATEN .....	83

ABSTRAK

Peranan Golkar dalam bidang politik merupakan suatu hal yang menentukan. Peran Golkar dalam pemerintahan dan keterlibatannya dalam masyarakat sangat besar pengaruhnya. Masyarakat selalu mengalami kehidupan yang bersifat dinamis sehingga apabila Golkar kurang mau memperhatikan kualitas organisasi dan personalianya akan dapat berpengaruh terhadap perolehan suara pada setiap pemilu. Perubahan dan pembaharuan dalam bidang politik Golkar perlu suatu hal yang diperlukan sebab Golkar perlu selalu koreksi terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian Golkar mampu menyelaraskan diri terhadap segala bentuk perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang mengarah pada pembangunan. Golkar harus mampu untuk dapat sebagai penggerak dan pelopor dalam meningkatkan kualitas baik organisasi maupun personalianya bagi organisasi-organisasi yang lain dalam pelayanannya terhadap masyarakat.

Selama masa Orde Baru telah dijalankan pemilu sebanyak empat kali yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, dan 1987. Perkembangan Golkar di Kabupaten Klaten dapat diketahui melalui setiap pemilu. Bagaimana pelaksanaan kampanye dijalankan ? Bagaimana pelaksanaan pemungutan suaranya ? Bagaimana hasil akhirnya ? Bagaimana evaluasinya ?

Tampilnya Golkar dalam arena percaturan politik di Indonesia pada tahun 1964 merupakan jawaban langsung atas perkembangan politik ketika itu. Suasana ketidakstabilan politik dan semakin kuatnya pengaruh PKI yang mendorong lahirnya Sekretariat Bersama Golkar (SEKBERGOLKAR). Golkar dicoba untuk tampil pertama kalinya dalam Pemilu 1971 dalam suasana peralihan dari sistem multi partai kepada sistem kepartaian yang lebih sederhana menjadi 10 partai yang

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

didalamnya termasuk Golkar. Dalam pemilu ini Golkar muncul sebagai fenomena baru dalam sistem politik Indonesia.

Pemilu 1977 ini dapat dianggap sebagai tonggak dari tahap pemilu berikutnya. Sebelum pemilu dilaksanakan telah diadakan penyederhanaan kepartaian yang jumlahnya sepuluh menjadi tiga partai yaitu PPP, Golkar, PDI pada tahun 1973. Pada pemilu ini pertama kalinya setelah Orde Baru berhasil menelorkan undang-undang tentang partai politik dan Golkar (UU No. 3 tahun 1975) yang mewajibkan setiap organisasi kekuatan sosial politik berasaskan Pancasila dan UUD 1945, meskipun masih diperbolehkan pula menggunakan asas ciri masing-masing. Hasil akhir Golkar Kabupaten Klaten pada pemilu ini apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya mengalami penurunan jumlah suara, sehingga berpengaruh juga terhadap perolehan jumlah kursi di DPRD Klaten.

Pada Pemilu 1987 pelaksanaannya diatur oleh UU No. 3 tahun 1985. Ketentuan dari paket undang-undang itu menyatakan bahwa organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan berkewajiban menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya undang-undang tersebut maka sebuah organisasi politik tidak berhak lagi menjadi organisasi yang bersifat eksklusif, untuk ras, agama, dan suku tertentu. Pada masa sebelumnya berlaku ketentuan itu masih terlihat adanya organisasi politik yang bersifat eksklusif bagi pemeluk agama Islam, yaitu PPP.

Berdasarkan ketentuan UU No. 3 tahun 1985 ini pula maka sifat keanggotaan organisasi politik adalah terbuka dan perseorangan. Sifat terbuka orpol berarti keanggotaan parpol dan Golkar terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur untuk menjadi anggota tanpa membedakan ras, suku, agama dan sebagainya. Sedangkan sifat perseorangan keanggotaan orpol berarti tidak adanya ikatan atau hubungan organisatoris formal antara parpol dan Golkar dengan ormas-ormasnya yang menjadi *onderbouw* Golkar. Hasil Pemilu 1982 dan 1987 Golkar selalu meningkat, kemenangan Golkar sejak pemilu 1971 sampai 1987 selalu diraihinya walaupun suara nominal dan prosentasenya mengalami perubahan.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB I

### PENDAHULUAN

Masyarakat Kabupaten Klaten apabila ditinjau dari segi kehidupannya disamping menjadi petani ada juga sebagian yang menjadi pegawai negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang yang mewarnai kehidupan masyarakat Kabupaten Klaten masih merasa belum cukup apabila hanya bergantung dari tanah pertanian, melainkan untuk meningkatkan taraf perekonomiannya mereka berusaha menjadi pegawai negeri, yang setiap tahunnya terjadi pengangkatan pegawai negeri baru.

Bertitik tolak dari hal tadi, maka dapatlah dihubungkan perkembangan Golkar di Kabupaten Klaten, yaitu semakin meningkat disebabkan oleh penduduk yang menjadi pegawai negeri (KORPRI) dan juga anggota Golkar (non KORPRI). Melihat kenyataan yang ada, bahwa selama beberapa kali pemilihan umum, Golkar selalu mendapat keunggulan atau memperoleh kemenangan. Walaupun demikian tingkat kemajuan Golkar di Kabupaten Klaten masih harus dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena para pegawai negeri sebagian besar menggantungkan pada gaji pemerintah, disamping itu masih pula ada alam pikiran feodalisme. Sifat itu antara lain tuntutan harga diri (sok gengsi) yang telah melanda dalam pandangan hidup sebagian para pegawai negeri. Sifat tersebut ialah untuk mempertahankan kedudukannya dalam masyarakat.



Perkembangan Golkar didukung oleh pegawai negeri yang dijamin sebagai modal massa, yang juga terikat pada sistem birokrasi. Birokrasi merupakan lembaga yang sangat strategis bagi pemerintahan, disamping terikat untuk menjadi anggota Golkar, juga dapat bertindak sebagai alat pengaruh massa di luar politik Golkar. Sebagai contoh, Golkar telah mampu menembus massa yang mengambang dipedesaan yaitu dengan kewibawaan kepala desa yang merupakan anggota Kokarmendagri.<sup>1</sup> Sedangkan Kokarmendagri tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memenangkan Golkar dalam pemilu.

Ketergantungan pegawai negeri terhadap pemerintah semakin tinggi disebabkan semakin kokohnya organisasi dan banyaknya jabatan-jabatan politik yang terbuka akibat kemenangan Golkar. Kecuali itu, juga masih adanya kesan bahwa organisasi-organisasi fungsional pendukung Golkar dan sifat kepemimpinan bapakisme masih berpengaruh kuat, sehingga rasa ingin menjaga prestise semakin kuat untuk tetap mempertahankan jabatan.

## A. PEMILU Sebagai Pembaharuan Politik Indonesia

Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak lima

-----

<sup>1</sup> Permen 12 adalah Peraturan Menteri (Dalam Negeri) No. 12 tahun 1969, yang berintikan antara lain bahwa anggota-anggota departemen hanya boleh memberikan loyalitas kepada bangsa dan negara, bahkan jika perlu melarang warga departemen untuk masuk partai politik. Kokarmendagri atau Korps Karyawan Pemerintah Departemen Dalam Negeri bertujuan agar pegawai negeri yang bersangkutan menanggalkan keanggotaan kepartaian atau keormasannya dan menjadi anggota Kokarmendagri.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3

kali, yaitu satu kali pada Masa Demokrasi Liberal atau Parlemen (1955) dan empat kali pada Masa Orde Baru dengan sistem Demokrasi Pancasila yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982 dan 1987. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apa yang namanya pemilu, terutama setelah Masa Orde Baru telah menjadi semakin mentradisi, semakin menjadi bagian dari kebudayaan politik Indonesia.<sup>2</sup> Undang-undang Pemilu No. 4 Tahun 1975 menyatakan :

"Pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan sarana untuk mencapai kemenangan orde baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila atau Undang-undang Dasar 1945".

Pada setiap pemilu selalu saja terdapat permasalahan yang menarik untuk dibahas. Pemilu pertama diadakan tahun 1955 dan diikuti oleh 27 organisasi kekuatan sosial politik (Pantai Politik) disamping peserta perseorangan (independent). Pemilu 1955 dimaksudkan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Badan Konstituante. Pada pemilu pertama yang menonjol adalah sifat multi partai dan multi ideologi. Perjuangan ideologi politik masing-masing peserta pemilu agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan politik kenegaraan dan kemasyarakatan telah menjadi tujuan utama.

Pemilu kedua dalam sejarah Bangsa Indonesia atau pemilu pertama pada Masa Orde Baru, diselenggarakan pada tanggal 3 Juli. Pemilu itu diikuti oleh sembilan partai politik

-----  
<sup>2</sup> Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 157



dan Golkar untuk memilih anggota DPR dan MPR. Pemilu itu dilaksanakan dalam masa peralihan dari sistem multipartai kepada sistem kepartaian yang lebih sederhana. Pemilu 1971 baru dapat dilaksanakan 16 tahun sesudah Pemilu 1955. Hal itu disebabkan terutama situasi dan kondisi intern Indonesia, antara lain sebagai akibat dari tidak berhasilnya Konstituante Bandung, sehingga terpaksa dibubarkan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959; pergolakan daerah-daerah; peristiwa G 30 S / PKI, dan sebagainya yang juga mengakibatkan tidak diselenggarakannya suatu pemilihan umum. Baru tahun 1971 setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru, dapat dilaksanakan pemilihan umum, yang kemudian disusul dengan pemilu-pemilu berikutnya dengan jangka waktu rata-rata lima tahun.<sup>3</sup>

Pemilu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 diikuti oleh tiga organisasi peserta pemilu (OPP), masing-masing adalah PPP, Golkar, PDI. Seperti halnya Pemilu 1971, pemilu yang kedua di Masa Demokrasi Pancasila itu dimaksudkan untuk memilih anggota-anggota DPR dan MPR. Hal yang cukup menarik adalah Golkar mengalami kenaikan prestasi di dalam mengumpulkan suara maupun perolehan kursi di DPR. Hal lain juga cukup menarik dan menjadi gambaran peta kekuatan-kekuatan politik dari pelaksanaan Pemilu 1977 itu merupakan pemilu pertama bagi PPP maupun PDI setelah keduanya dibentuk sebagai fusi pada tahun 1973. Namun demikian, ternyata PPP mampu menaikkan prestasinya apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sementara itu PDI mengalami penurunan pres-

<sup>3</sup> Simorangkir, Mukum Dan Konstitusi Indonesia (Jakarta: Masagung, 1988), hlm. 5

tasi apabila dibandingkan dengan prestasinya pada Pemilu 1971. Disamping itu hal yang cukup menarik adalah bahwa Pemilu 1971 adalah pertama kali setelah Orde Baru berhasil menelorkan Undang-undang Partai Politik dan Golkar (UU No. 3 Tahun 1975) yang mewajibkan setiap organisasi kekuatan sosial politik ( PPP, Golkar, PDI ) berasaskan Pancasila dan UUD 1945, meski diperbolehkan pula menggunakan asas ciri khasnya masing-masing.

Pemilu yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982 diikuti oleh tiga kekuatan sosial politik. Pemilu 1982 itu merupakan pengalaman kedua bagi PPP dan PDI, sedangkan bagi Golkar merupakan pengalaman yang ketiga. Prestasi kedua partai mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Pemilu 1977, sedangkan Golkar kemungkinan besar karena telah mengalami tiga kali pemilu dengan tanda gambar sama, maka perolehan kursi maupun suaranya meningkat tajam.

Pemilu yang keempat dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hal-hal yang menarik dalam pemilu itu, baik mengenai aspek-aspek pelaksanaan kampanye setelah Pancasila diterima sebagai asas tunggal oleh orpol dan ormas maupun aspek keikutsertaan organisasi kemasyarakatan dalam kampanye. Disamping itu, Pemilu 1987 tentu akan menghasilkan peta kekuatan sosial politik yang baru secara nasional maupun tingkat daerah. Kampanye Pemilu 1987 juga berada dalam suasana transisi, yaitu dari pola lama yang lebih menekankan kampanye lapangan menjadi kampanye yang lebih bersifat tertutup

atau terbatas. Namun kenyataannya, pelaksanaan kampanye Pemilu 1987 yang baru lalu masih banyak yang bersifat lapangan dengan tema program setiap organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilu.

Perlu ditambahkan pula bahwa pemilu sebelum Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu itu dilaksanakan 10 tahun sesudah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal itu disebabkan oleh situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia, ialah untuk mengatur kelancaran jalannya pemerintahan. Seluruh perhatian dan tenaga harus dicurahkan kepada perjuangan mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan dari usaha kaum penjajah yang ingin bercokol kembali di Indonesia.

## B. Perkembangan Golkar Pada Pemilu 1971 - 1987

### 1. Pemilihan Umum 1971

Pada tahun 1971, Bangsa Indonesia dapat melaksanakan pemilu yang kedua, dimana kali ini diikuti oleh 9 parpol dan satu Golkar. Golkar adalah pendatang baru yang mendapat dukungan dari pemerintah dan ABRI. Golkar adalah realisasi dari upaya yang telah dirintis sejak jaman Demokrasi Terpimpin. Golkar lahir pada tanggal 20 Oktober 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golkar (SEKBERGOLKAR). Dalam Pemilu 1971, Golkar dengan tema sentral "politik no, Pembangunan yes" dan dengan dukungan ABRI tampak lebih mengena kampanyenya di mata rakyat, dalam usaha menarik massa parpol dan sekaligus dalam rangka melumpuhkan parpol.

Disamping itu, Golkar tampak jeli didalam membaca situasi serta memanfaatkan fasilitas yang dimiliki pemerintah.<sup>4</sup> Kampanye Golkar, apabila dilihat dari segi meriahnya, mengalahkan partai-partai politik lain dalam pemilu. Selama masa kampanye diwarnai pertentangan yang dilandasi perbedaan aliran masing-masing kontestan, dan juga karena cara-cara yang dilakukan dalam kampanye. Akhirnya, terlepas dari bagaimana proses terjadinya kemenangan, seluruh ketegangan pemilu diakhiri dengan kemenangan mutlak bagi Golkar, sebagai suatu prestasi yang sangat mencengangkan.

## 2. Pemilihan Umum 1977

Pemilu 1977 dihadapi oleh kedua parpol dalam keadaan tubuh yang compang-camping. Mereka menghadapi tidak saja sebagai tantangan dari luar dalam rangka konsolidasi dan menjalankan fungsi-fungsinya, tetapi didalam tubuhnya terjadi semacam disintegrasi, keretakan, konflik atau katakanlah perpecahan. Banyak faktor yang menyebabkan parpol harus menerima kenyataan pahit. Pada umumnya sumber paling utama adalah karena belum tuntasnya fusi, sehingga integrasi masih merupakan hal yang semu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wiyono, Organisasi Kekuatan Sosial Politik Indonesia (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 32 - 34

<sup>5</sup> Sigid Putranto Kusumowidagdo, "Pembangunan Politik Orde Baru dan Krisis Partisipasi", Prisma, Januari 1985, hlm. 162

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8

Pemilu 1977 Golkar tampil sebagai peserta yang sudah berpengalaman sejak Pemilu 1971, sedangkan PPP dan PDI adalah peserta baru dalam pemilu setelah terjadinya fusi. Golkar boleh jadi sebagai peserta yang sudah mempunyai identitas, sedangkan PPP dan PDI sebagai peserta baru yang untuk pertama kalinya mencoba menampilkan dan mempertaruhkan identitasnya untuk menarik massa pendukungnya didalam pemilu. Dalam hal ini, Golkar berusaha keras untuk mengidentikkan dirinya dengan suatu partai yang terdiri dari manusia-manusia modern yang mengusahakan modernisasi dan pembangunan Indonesia. Melawan isu ideologis dan agama, Golkar tidak punya cara lain daripada pembangunan dan modernisasi. Walaupun itu tidak berhasil, maka kekuatan tidak segan-segan akan dipakai.<sup>6</sup>

Dibandingkan dengan Pemilu 1971, cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa kampanye Pemilu 1977 lebih banyak diwarnai adanya bentrokan fisik atau keberingasan sosial. Proses identifikasi sering menumbuhkan kekarasan, sehingga harian Kompas 14 April 1977 mempertanyakan : " Apakah proses identifikasi tidak akan menjadi proses polarisasi, apakah polarisasi tidak akan mengembalikan masyarakat kita ke dalam kotak-kotak eksklusif dan saling curiga".

---

<sup>6</sup> Daniel Dhakidae, "Pemilihan Umum Di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Pasang Surut Partai Politik", Prisma, No. 9, 1981, hlm. 36



3. Pemilihan Umum 1982

Kekalahan yang diderita dalam pemilu baik tahun 1971 maupun 1977, tampaknya tak menggoyahkan PPP dan PDI. Semangat mereka tetap menyala-nyala, sedangkan Golkar yang semakin mantap tampak tidak menunjukkan kedodorannya untuk memberi kelonggaran bagi tumbuh suburnya parpol. Menghadapi Pemilu 1982 parpol memang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Mereka sedang dilanda disintegrasi besar - besaran. PDI berangkat dari kondisi babak belur setelah kemelut berkepanjangan sejak lima tahun terakhir. Tak jauh berbeda dengan PPP yang jauh berada dalam keadaan rapuh, terutama sejak dua tahun menjelang Pemilu 1982. Dalam keadaan seperti itu, PDI tentu tidak banyak dapat menawarkan dan melaksanakan program, perhatiannya tidak dapat luput dari upaya konsolidasi kedalam dan menyelesaikan pertikaian. Disamping itu PDI juga membawa implikasi negatif bagi masyarakat terhadap pandangan mereka menyangkut pemimpin yang akan dijadikan suri tauladan.<sup>7</sup> Tak jauh berbeda dengan PPP dan PDI yang juga bermula dari kericuan soal beberapa materi yang menyangkut perubahan Undang - Undang Pemilu tahun 1980, yaitu antara unsur NU (Nahdatul Ulama) dan MI (Muslimin Indonesia). Kemudian konflik itu mencapai puncaknya disaat penyusunan daftar calon anggota DPR dalam Pemilu 1982. Kendatipun di atas kertas PPP masih memiliki solidaritas antara partai dengan massa, namun di

---

<sup>7</sup> Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut ( Jakarta : Rajawali Pers, 1983), hlm. 196

lain pihak pendukung PPP tetap dalam posisi terjepit. Kecurigaan terhadap umat Islam yang semakin besar, menyebabkan keraguan untuk memilih tanda gambar Ka'bah dalam pemilu.<sup>8</sup>

Kampanye Pemilu 1982 tampak lebih semarak, tetapi aman. Kendatipun di beberapa tempat masih terdapat ulah sementara pejabat yang merugikan kalangan parpol, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa parpol dapat lebih leluasa melakukan kampanye. Didalam kampanye, rupanya corak emosional dan konfrontatif masih kuat juga, pada umumnya yang diutamakan adalah menarik perhatian massa sebanyak-banyaknya dengan jalan merangsang emosi mereka. Di beberapa daerah tercatat pula terjadinya bentrokan fisik atau kebingasan yang lain.<sup>9</sup>

#### 4. Pemilihan Umum 1987

Pemilu 1987 ini mempunyai makna penting, karena untuk pertama kalinya suatu pemilu berlangsung pada era Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orpol (organisasi politik) dan ormas (organisasi kemasyarakatan). Perkembangan parpol menjelang Pemilu 1987, mengalami perubahan-perubahan yang menarik, hanya saja yang masih tetap sama adalah perkembangan PPP dan PDI semakin menampakkan keprihatinan.

---

<sup>8</sup> Alfian, Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia ( Jakarta : Gramedia, 1986), hlm. 110

<sup>9</sup> Ibid.,

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13

PPP dan PDI tidak lagi mempunyai asas ciri, sebab disesuaikan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai politik dan Golkar. Pancasila telah ditetapkan sebagai satu-satunya asas, sehingga konsekwensinya adalah tanda gambar PPP harus diubah, bukan lagi gambar Ka'bah sebagai lambang keIslaman, tetapi menjadi gambar bintang. Disamping itu, PDI juga melakukan perubahan tanda gambar dengan hanya menyisakan gambar banteng di tengah segi lima.

Golkar semakin mantap dalam menyongsong Pemilu 1987, dengan dominasinya yang tidak tergoyahkan. Hal itu disebabkan identifikasi Golkar dengan pembangunan dan pemerintahan merupakan faktor penentu kemenangan Golkar sejak Pemilu 1971. Golkar melakukan pendaftaran anggota, melakukan pengkaderan jenis karakterdes (kader penggerak teritorial desa) dan kader fungsional, melaksanakan kirrab panji-panji Golkar, mengiriskan para menteri ke daerah-daerah untuk meresmikan hasil pembangunan sambil konsolidasi dan pra kampanye. Didalam menentukan tema kampanye nampaknya lebih siap, dengan masih mempertahankan tema sentralnya dalam pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rusli Karim, op.cit., hlm. 197



## C. Perumusan Masalah Dan Sistematika Pembahasannya

Masalah utama yang menjadi pokok pembahasan uraian ini adalah dinamika Golkar Kabupaten Klaten pada Pemilu 1982 - 1987. Masalah utama itu diperinci dalam beberapa masalah khusus sebagai berikut: Pengertian dinamika sebagai pembaharuan politik Golkar; Kondisi sosio geografis Kabupaten Klaten; Perkembangan Golkar sebelum Pemilu 1982; Golkar Kabupaten Klaten pada Pemilu 1982; Golkar Kabupaten Klaten pada Pemilu 1987; Perbandingan dinamika Golkar Kabupaten Klaten antara Pemilu 1982 dan Pemilu 1987. Jawaban atas masalah-masalah tersebut dibagi dalam beberapa bab berikut ini.

Bab II akan diuraikan tentang pengertian dinamika. Dinamika merupakan pembaharuan politik Golkar dalam rangka mencari pola sistem yang lebih ajek dan stabil. Tindakan politik Golkar itu dalam rangka mengarahkan dan menentukan pengaturan didalam kehidupan organisasinya. Hal itu dimaksudkan agar selalu mampu menyesuaikan dan menyegarkan diri terhadap lingkungan masyarakat. Latar belakang hal itu adalah Golkar ingin mewujudkan konsensus dengan tuntutan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan.

Bab III akan menjelaskan kondisi sosio geografis mengenai luas, bentuk daerah (keadaan topografi), keadaan tanah, keadaan iklim, dan keadaan penduduk Kabupaten Klaten.

Bab IV akan menguraikan perkembangan Golkar Kabupaten Klaten sebelum Pemilu 1982. Bab ini akan menjelaskan perkembangan Golkar Kabupaten Klaten pada Pemilu 1971 dan 1977, dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Golkar apabila mengalami kenaikan dan penurunan.

Bab V akan membahas dinamika Golkar khusus pada Pemilu 1982. Bab ini akan menguraikan dinamika Golkar Kabupaten Klaten apabila dilihat dari pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, perkembangan Golkar sampai mencapai hasil akhir.

Bab VI akan membahas dinamika Golkar, khusus pada Pemilu 1987. Bab ini juga akan menguraikan dinamika Golkar Kabupaten Klaten apabila dilihat dari pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, perkembangan Golkar sampai mencapai hasil akhir.

Bab VII akan membahas perbandingan Golkar Kabupaten Klaten antara Pemilu 1982 dengan Pemilu 1987. Hal itu untuk mengetahui apakah dalam pemilu itu terjadi perbedaan yang menyolok apabila dilihat dari segi kampanye, pemungutan suara, dan hasil akhir Golkar. Semua itu, apakah mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan, sehingga dapatlah memberi gambaran apabila diadakan evaluasi terhadap Golkar.

#### D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menimba sumber-sumber kepustakaan yang tersedia, disamping itu juga melakukan wawancara. Metode wawancara dilakukan bertujuan untuk mencari informasi untuk melengkapi informasi dokumenter atau konfirmasi informasi dokumenter, untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu informasi. Wawancara itu dilakukan dengan Bapak Sutanto,

Bapak Soeparwan, Bapak Soetopo, Bapak FX. Soemantojo, Bapak RY. Soekamto, Bapak Val. Bambang Setiawan. Adapun langkah - langkah seperti yang diusulkan oleh Louis Gottschalk se - bagai berikut :<sup>11</sup>

1. Pemilihan subyek untuk diselidiki;
2. Pemilihan sumber selengkap-lengkapya;
3. Mengadakan kritik sumber dengan tujuan menguji ke - otentikan dengan kritik ekstern dan intern;
4. Analisa sumber keterangan;
5. Sintesa sumber, keterangan dari berbagai sumber un - tuk diperbandingkan;
6. Koroborasi, membandingkan dengan sumber lain yang otentik;
7. Interpretasi sejarah berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh;
8. Penulisan laporan sejarah

Metode seperti tersebut diatas akan dipergunakan untuk meng - uraikan tentang masalah dinamika Golkar Kabupaten Klaten pada Pemilu 1982 - 1987. Bab berikut ini akan mengawali pembahasan dengan melihat lebih jauh dinamika Golkar Kabupaten Klaten pada Pemilu 1982 - 1987.

-----

<sup>11</sup> Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (terj. Nugroho Notosusanto) (Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1975), hlm. 34

BAB II  
DINAMIKA SEBAGAI PEMBAHARUAN POLITIK GOLKAR

A. Pengertian Dinamika

Setiap masyarakat dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai norma sosial, nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi dan juga dapat mengenai lembaga kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan dinamika sebagai sifat jiwa masyarakat. Masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks mengakibatkan perubahan-perubahan pola-pola hubungan sosial. Proses perubahan sosial itu sendiri yang merupakan perbenturan antara kekuatan sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam masyarakat sendiri dengan kekuatan-kekuatan sosial kemasyarakatan yang datang dari luar bergerak semakin cepat.<sup>12</sup> Pada umumnya, kata "Dinamika" diartikan sebagai "proses perubahan yang senantiasa bergerak secara terus-menerus".<sup>13</sup> Dinamika sebagai suatu gerakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang mengakibatkan perubahan tata hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

-----  
<sup>12</sup> Pasaribu, Sosiologi Pembangunan (Bandung: Transito, 1982), hlm. 115

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 158

<sup>14</sup> Bdk. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 206

Masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang ber - hubungan dan berpengaruh timbal balik yang satu terhadap yang lain. Keberadaan masyarakat tergantung pada kemampuannya untuk terus bergerak, bahkan keberadaan masyarakat tergantung pada kemampuannya untuk terus bergerak, begitu juga kelangsungan hidup masyarakat.<sup>15</sup> Dalam suatu masyarakat apabila terjadi perubahan maka keseimbangan dan keselarasan keseluruhannya akan terganggu. Kekacauan ini hanya dapat diatasi dengan penyesuaian keseluruhan pada perubahan yang telah terjadi itu, agar dapat tercapai suatu keseimbangan dan keselarasan baru.

Dinamika yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi juga akan keberadaan Golkar yang selama ini sebagai wadah aspirasi masyarakat. Perkembangan dan keberhasilan Golkar itu tidak dapat dipisahkan dengan adanya dukungan masyarakat. Golkar hanya dapat hidup jika modalnya ada yaitu massa yang ada dalam masyarakat. Pada umumnya organisasi kekuatan sosial politik di Negara Indonesia dikenal dengan sebutan partai massa yaitu kekuatan sosial politik yang mengutamakan jumlah anggota.<sup>16</sup> Dinamika yang terjadi dalam masyarakat juga dapat mewarnai kehidupan Golkar. Bagi Golkar perlu adanya dinamika agar selalu mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Dinamika bagi Golkar merupakan suatu tin -

---

<sup>15</sup> G. Moedjanto, Tiga Dasa Warsa Atmajaya (Jakarta : Yayasan Atmajaya, 1990), hlm. 5

<sup>16</sup> "Partai Politik dan Golongan Karya", dalam Undang-undang No. 3, Tahun 1975.

dakan atau usaha penyesuaian diri dalam rangka menghasilkan pembaharuan bersama masyarakat. Usaha pembaharuan itulah merupakan strategi politik Golkar. Program Golkar tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran partisipasi masyarakat yang bersifat membangun. Dengan perlunya dinamika maka Golkar berusaha untuk mengadakan penataan kembali secara mantap dalam kehidupan organisasinya.

Pengertian dinamika Golkar sebagai usaha pembaharuan politik Golkar disebabkan dinamika sebagai tindakan politik dalam rangka mengarahkan Golkar untuk menentukan pengaturan kehidupan organisasinya yang berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Dinamika merupakan proses tindak lanjut bagi Golkar untuk selalu mampu menyesuaikan diri dalam tata kehidupan masyarakat serta mengadakan pembaharuan dalam tata kehidupan organisasinya.

## B. Perlunya Dinamika Bagi Organisasi

Berbicara tentang "Organisasi" perlu terlebih dahulu dimengerti definisi organisasi. Definisi organisasi dirumuskan sebagai : 17

"Suatu bentuk kerjasama dari anggota-anggotanya dalam menyelenggarakan kegiatan bersama/kelompok secara teratur dan kontinyu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut adalah tujuan bersama yang telah disepakati seluruh anggota dan biasanya dirumuskan serta dituangkan dalam peraturan-peraturan organisasi (AD dan ART)".

---

<sup>17</sup> "Sukses Organisasi", dalam Laporan BPP, Jakarta, Tahun 1972, hlm. 1



Organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam masyarakat modern baik di sektor publik (negara) maupun di sektor swasta. Masyarakat modern, seperti Indonesia pada masa kini dikenal berbagai macam organisasi seperti rumah sakit, sekolah, yayasan, badan usaha milik negara, dan kantor-kantor pemerintah. Dalam administrasi negara, organisasi merupakan unsur utama karena menyangkut kerjasama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan-tujuan publik seperti pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Organisasi-organisasi dalam masyarakat masih terdengar bila dituntut untuk semakin lebih berprestasi. Bila tidak, maka disarankan organisasi tersebut agar dirombak atau dibubarkan saja. Hal itu berlaku bagi organisasi pemerintahan, partai politik dan organisasi massa, universitas, organisasi bisnis (BUMN dan Swasta), maupun koperasi.<sup>18</sup>

Tuntutan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut dimaksudkan agar lebih meningkatkan prestasinya karena masih terlihat adanya kelemahan di dalam tubuh organisasi. Kelemahan-kelemahan tersebut biasanya seperti masalah kepemimpinan, manajemen, pengawasan dan keuangan, rapat-rapat sulit membuat keputusan tetapi jarang orang menunjuk aspek organisasinya sebagai masalah. Disamping itu masih terlihat juga bahwa organisasi-organisasi tersebut mempunyai pemimpin yang baik, pendukung yang dinamis, dananya tidak terlalu jelek, tetapi prestasinya tetap mengecewakan.

---

<sup>18</sup> Albert Widjaja, Kekuasaan Dan Geraknya Di Dalam Organisasi (Jakarta : AIPI dan Gramedia, 1989), hlm. 14

Pada umumnya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia masih diwarnai seperti persoalan tersebut diatas. Hal ini faktor penyebabnya seperti masih jaranganya diadakan pembahasan mengenai masalah organisasi dikarenakan masih sangat langkanya pakar masalah organisasi di Indonesia. Faktor ini menyebabkan organisasi belum dapat secara mantap dalam pengaturan kehidupan organisasinya. 19

Walaupun masih langkanya pakar masalah organisasi dan secara umum kondisi organisasi di Indonesia masih menunjukkan prestasinya yang kurang. Namun jika organisasi tidak ingin ketinggalan maka organisasi-organisasi tersebut harus memacu dan menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi.

Organisasi-organisasi apabila ingin berkiprah lebih hebat maka mereka harus membenahi dirinya sendiri lebih dahulu. Konsolidasi atau pembenahan diri apabila sudah berjalan dengan baik, serta karya-karya nyataanya dapat dinikmati orang banyak, barulah organisasi akan dapat bersemi di hati rakyat Indonesia. Organisasi perlu adanya pembaharuan dalam pola pikir, menjauhkan sifat yang primordial, dan menghidupkan atau melahirkan pola pikir atas dasar wawasan kebangsaan yang utuh.

Suatu organisasi kemasyarakatan perlu juga ikut mengemban tugas untuk mempertahankan dan mengamalkan ideo-



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

20

logi negara. Masalah-masalah ini merupakan masalah yang menentukan bagi kelangsungan hidup bangsa. Dalam suatu organisasi diperlukan juga kader-kader yang dapat mengelola dan mampu mengaktualisasikan diri serta pelayanannya sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Setiap perjuangan apabila tidak ada pedomannya ibarat kapal tanpa kompas, arahnya tidak menentu.

Jaman selalu mengalami perubahan dan perkembangan, yang seolah-olah sedang mengalami metamorphose dengan percepatan yang bersifat eksponensial.<sup>20</sup> Perubahan yang satu memacu perubahan yang lainnya secara berlipat ganda. Hal itu pengaruhnya tidak sekedar menyentuh segi pembangunan saja tetapi secara lebih dalam menyentuh dan merubah pula nilai-nilai dan alam pikiran yang berlaku pada setiap tahap pembangunan. Jaman selalu menghadapi tantangan yang dapat menghasilkan bukan saja keputusan melainkan juga cara berpikir baru, hal itu disebabkan pengaruh dari adanya globalisasi informasi yang pesat.<sup>21</sup> Dengan demikian organisasi-organisasi yang menyangkut kepentingan masyarakat seharusnya semakin mampu dan arif dalam membaca tanda-tanda perkembangan jaman. Organisasi-organisasi perlu senantiasa menyesuaikan dan menyegarkan diri sehingga dapat memberi arah bagi perkembangannya dalam meningkatkan kualitas dan pelayanannya terhadap masyarakat.

---

<sup>20</sup> Rahcmat Witoelar, "Tantangan Baru Bagi Orsospol", Media Karya, Juni 1990

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 44

C. Proses Dinamika Golkar Terhadap Perubahan Perundang-undangan

Golkar harus hidup dan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman. Kehidupan masyarakat yang berkembang selalu cenderung berubah karena mempunyai dinamika yang perlu ditampung aspirasinya. Organisasi Golkar perlu menyadari bahwa keterlibatan masyarakat banyak adalah mutlak. Keterlibatan ini mesti dalam artian positifnya, bukan pengertian penggalangan yang terlalu mementingkan konotasi fisik masal, tetapi dalam artian keterlibatan kreatif yang berwawasan ideal, yang pada gilirannya dapat melahirkan kegiatan-kegiatan produktif yang mendukung pembangunan.

Golkar sangat perlu memperhatikan dan menampung dinamika masyarakat. Sejalan dengan hal itu dapat dikatakan bahwa suatu sistem politik yang hidup dan dinamis adalah suatu proses memperbaharui dirinya tanpa menyimpang apalagi mengingkari jati' dirinya.<sup>22</sup> Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik perlu juga meningkatkan kualitas demokrasi yang bermakna. Salah satu hal yang sangat esensi antara lain dalam upaya peningkatan kualitas, demokrasi ini adalah menciptakan, memelihara, dan mengembangkan mekanisme demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara wajar dan sehat.

Dinamika Golkar mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Undang-undang yang mengalami perubahan. Berdasarkan pola pikir Golkar, perubahan perundang-undangan memang

---

<sup>22</sup> Ibid.,. hlm. 45

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

22

perlu dilakukan agar supaya undang-undang itu tidak ketinggalan jaman. Perubahan undang-undang dilakukan untuk menanggapi sejumlah tuntutan perkembangan aspirasi masyarakat dan perubahan jaman. Undang-undang diubah agar dapat mengikuti segala tuntutan jaman dan dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Dalam wawancara dengan Bapak Soeparwan, selaku Wakil Ketua DPD Golkar Klaten, diperoleh contoh Undang-undang yang pernah diubah dan disempurnakan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1985 tentang parpol dan Golkar. Pada waktu Undang-undang No. 3 Tahun 1975 dibuat, belum menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi parpol dan Golkar. Pada Undang-undang ini, PPP menggunakan Islam sebagai asasnya, hal ini menurut pola pikir Golkar dirasa tidak pas sebab anggota Golkar sendiri lebih dari 80 % terdiri dari umat Islam, sehingga Islam jangan dimonopoli untuk kepentingan politik, apalagi menggunakan Ka'bah sebagai tanda gambarnya padahal Ka'bah itu milik umat Islam seluruhnya, bukan hanya milik PPP saja.

Disamping itu, PDI menggunakan asas Marhaenisme dan pada waktu itu tokoh-tokoh PDI diminta untuk memberikan rumusan Marhaenisme itu tetapi tidak ada kesamaan jawaban, apa sebenarnya arti Marhaenisme. Orang-orang yang berasal dari Partai Katolik dan Partai Kristen juga tidak sepem - dapat kalau PDI menggunakan asas Marhaenisme. Ditambah lagi dengan menampilkan tanda gambar "Bung Karno", menurut pola pikir Golkar penampilan gambar Bung Karno juga tidak pas, karena Bung Karno tokoh "Proklamator" milik seluruh

Bangsa Indonesia, bukan monopoli PDI saja. Dengan latar belakang adanya permasalahan tersebut di atas maka perlu adanya pembaharuan undang-undang. Undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1975 di ganti dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1985 yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi parpol (PPP serta PDI) dan Golkar beserta ormas-ormas yang lain.<sup>23</sup>

Bab III akan menguraikan kondisi sosio geografis Kabupaten Klaten, yang dapat mempengaruhi perkembangan Golkar dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 1987.

---

<sup>23</sup> Keterangan tertulis dari Bapak Soeparwan pada tanggal 27 Oktober 1990 di Klaten.

BAB III  
KONDISI SOSIO GEOGRAFIS KABUPATEN KLATEN

A. Letak dan Luas Wilayah

Daerah Kabupaten Klaten terletak diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kotamadya Surakarta. Daerah Kabupaten Klaten terletak pada Lintang Selatan  $7^{\circ}. 30' - 7^{\circ}. 45'$  dan Bujur Timur  $110^{\circ}. 30' - 110^{\circ}. 45'$ .<sup>24</sup>

Daerah ini dibatasi oleh beberapa wilayah administratif yaitu disebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Boyolali, di sebelah timur di batasi oleh Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Sleman.

Luas daerah Kabupaten Klaten meliputi  $655,56 \text{ Km}^2$ . Daerah wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari 401 Kalurahan, 4.523 pedukuhan dan 26 Kecamatan yakni ;<sup>25</sup>

Nomor	Nama Kecamatan	Nomor	Nama Kecamatan
01.	Prambanan	14.	P e d a n
02.	Gantiwarno	15.	Karangdowo
03	W e d i	16	Juwiring
04	B a y a t	17	Wonosari
05	C a w a s	18	Delanggu
06	T r u c u k	19	Polanharjo
07	Kalikotes	20	Karangancm
08	Kebonarum	21	T u l u n g
09	Jogonalan	22	Jatinom
10	Manisrenggo	23	Kemalang
11	Karangnongko	24	Klaten Selatan
12	N g a w e n	25	Klaten Tengah
13	C e p e r	26	Klaten Utara

<sup>24</sup> "Klaten Dalam Angka 1982, 1987, 1988, 1989", Kantor Statistik Kabupaten Dati II Klaten, hlm. 2

<sup>25</sup> ibid., hlm. 1



Daerah Kota Klaten dihubungkan oleh sarana perhubungan berupa jalan beraspal dan jalan yang tidak beraspal dengan daerah-daerah yang disekitarnya. Ke arah barat dihubungkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta melewati jalan beraspal sepanjang 48 Km. Dari bentangan jalan tersebut dapatlah di ketahui bahwa satu-satunya jalan yang paling potensial adalah jalan yang menghubungkan dengan Kota Yogyakarta dan Surakarta mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar komunikasi dan segala kegiatan ekonomi.

Letak wilayah Kabupaten Klaten dapat dikatakan cukup strategis sebab mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar komunikasi atau transportasi maupun segala kebutuhan ekonomi.<sup>26</sup> Potensi wilayah ini dapat dipakai sebagai modal utama bagi setiap organisasi yang menginginkan hidup subur di Kabupaten Klaten. Kehidupan organisasi seperti Golkar apabila menginginkan berkembang baik, seharusnya mampu menggali atau memanfaatkan potensi yang ada guna mensejahterakan masyarakat. Sebagai contoh organisasi yang telah dapat berkembang baik misalnya Golkar, hal itu disebabkan Golkar telah dapat menunjukkan bukti terhadap masyarakat bahwa Golkar dapat mengelola dan memanfaatkan potensi wilayah yang ada disamping struktur organisasinya yang mantap. Dengan demikian dapat mempengaruhi kehidupan Golkar menjadi lebih baik, umpamanya dengan cara memanfaatkan tanah-tanah kritis untuk peningkatan produksi pangan, membangun jalan, dan sebagainya.

-----  
<sup>26</sup> Ibid., hlm. 4



B. Keadaan Topografi

Relief daerah Kabupaten Klaten berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Berdasarkan letak kemiringan tanah Kabupaten Klaten dapat diklasifikasikan menjadi 3 dataran yaitu : 27

- a. Dataran tinggi lereng Gunung Merapi meliputi wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
- b. Dataran rendah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian wilayah yang merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan dataran Gunung Kapur.
- c. Dataran Gunung Kapur meliputi wilayah Kecamatan Bayat dan Cawas.

Sementara itu berdasarkan letak ketinggian wilayah dari permukaan air laut, daerah Kabupaten Klaten dibedakan kedalam 3 bagian yaitu : 28

- a. Zone utara dengan ketinggian 500 - 1000 meter di atas permukaan air laut meliputi 12,76 % wilayah Kabupaten Klaten.
- b. Zone tengah dengan ketinggian 100 - 500 meter di atas permukaan air laut meliputi 77,52 % wilayah Kabupaten Klaten.
- c. Zone selatan dengan ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan air laut meliputi 9,72 % wilayah Kabupaten Klaten.

---

27 Ibid., hlm. 3

28 Ibid.,

Bertolak dari kondisi Kabupaten Klaten yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi maka keadaan masyarakat Kabupaten Klaten juga terjadi perbedaan dalam cara hidupnya. Bagi masyarakat yang hidupnya di dataran tinggi biasanya hidup secara berladang sebab daerah ini kurang cocok ditanami tanaman pertanian dan kurangnya sumber air. Sedangkan masyarakat yang hidup dari tanaman pertanian dan cukup air. Disamping itu tingkat kesejahteraan penduduk juga terjadi perbedaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilatarbelakangi kondisi semacam itu memerlukan juga penanganan yang berbeda. Sebagai contohnya, Golkar bersama pemerintah dalam mengatasi masalah wilayah di dataran tinggi telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada penduduk baik melalui perangkat desa maupun aparat pemerintah dan juga mengadakan bantuan seperti pohon tanaman keras yang sifatnya pencegah erosi dan tanaman produksi misalnya pohon randu, jambu mete, rambutan, mangga, kelapa hibrida, melinjo. Bantuan bibit tanaman tersebut diberikan pada wilayah-wilayah yang kurang cocok ditanami tanaman pertanian. Sedangkan untuk wilayah dataran rendah juga diadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai masalah pertanian dalam meningkatkan produksi tanaman pangan dan membantu alat-alat pertanian seperti pemberantasan hama.

### C. Keadaan Tanah

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 hektar. Penggunaan tanah menurut luas wilayah dapat dibagi menjadi tanah sawah dan tanah kering.<sup>29</sup> Penggunaan tanah sawah me-

-----  
<sup>29</sup> Ibid., hlm. 10-11



nurut pengairannya dapat diklasifikasikan seperti irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, tadah hujan. ~~Sawah~~ tadah hujan hampir tidak terdapat di setiap kecamatan.<sup>30</sup>

Penggunaan tanah kering dapat diklasifikasikan berdasarkan bangunan dan halaman, tegal kebun ladang, padang rumput, kolam rawa, tanah sementara tidak diusahakan, hutan negara, perkebunan negara, tanah yang digunakan untuk jalan, saluran air, lapangan dan kuburan.<sup>31</sup>

Di Kabupaten Klaten pemilikan tanah secara individual merupakan milik pribadi yang dapat diperjual belikan secara turun-temurun. Masyarakat Kabupaten Klaten pada umumnya hidup dari tanah pertanian walaupun hanya sebagian kecil yang menjadi petani kaya. Dalam pengerjaan tanah pertanian disamping dikerjakan sendiri, ada juga yang menggunakan tenaga buruh dengan imbalan berupa uang atau bagi hasil. Bagi hasil yang berlaku di Kabupaten Klaten pada umumnya seperti maro, mrotelu, mropapat, mrowolu atau ada yang diberi hasil panen dengan istilah bawon. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memiliki tanah pertanian yang sempit dan seringkali hasilnya pun kurang dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu ada sebagian penduduk yang tidak mempunyai tanah pertanian sama sekali dan hidupnya dengan menjual tenaga sebagai buruh tani.

Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Klaten membuktikan subur, sehingga memungkinkan juga dapat mendukung

---

<sup>30</sup> Ibid.,

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 12

perkembangan Golkar. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dilihat dari program bantuan Golkar yang diberikan kepada masyarakat. Tema program bantuan Golkar bersifat pertama, rutin yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Golkar (AD/ART) yang merupakan keharusan dan kewajiban Golkar untuk membantu masyarakat; kedua, bantuan yang mendasarkan pada pemanfaatan momentum hari-hari penting yang bersifat nasional maupun untuk kepentingan organisasi Golkar seperti hari ulang tahun ataupun peringatan Super Semar; ketiga, bantuan yang bersifat insidental atau diberikan pada waktu waktu tertentu. Program bantuan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembinaan organisasi dan anggotanya. <sup>32</sup>

Program bantuan Golkar yang diberikan kepada masyarakat telah begitu banyak. Namun dalam hal ini hanya dapat memberikan contoh mengenai program bantuan Golkar yang menyangkut kondisi wilayah Kabupaten Klaten berupa daerah yang tanahnya subur dan daerah yang kering atau kurang subur. Pada umumnya daerah yang subur di Kabupaten Klaten digunakan untuk areal pertanian. Kondisi semacam itu mendorong Golkar untuk memberikan program bantuan yang diperlukan penduduk seperti obat tanaman pertanian, alat dan peraga dalam penyemprotan hama atau tikus yang diberikan di Kecamatan Delanggu dan Polanharjo. Disamping itu Golkar juga membantu bibit tanaman seperti kedelei yang diberikan di Desa Kalikebo, dan sebagian di Kecamatan Karangnongko dan Trucuk.

-----

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutanto dan Bapak Soeparwan pada tanggal 20 Januari 1991, di Klaten.

Program bantuan Golkar terhadap daerah yang tanahnya kering juga diberikan. Hal itu disebabkan dengan mengingat bahwa pada umumnya daerah kering kurang subur, sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk daerah pertanian. Kondisi tanah yang kurang dapat dimanfaatkan maka Golkar dalam memberikan bantuan terhadap daerah ini seperti mengedrop air di Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Tulung. Disamping itu bantuan yang diberikan seperti bibit tanaman keras misalnya pohon randu, jambu mete, melinjo, rambutan, mangga, kelapa hibrida, di Kecamatan Bayat, Trucuk, Cawas dan Kecamatan Gantiwarno.

D. Kondisi Iklim

Daerah Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Suhu rata-rata antara  $26^{\circ}$  -  $28^{\circ}$  dan curah hujan tahunan jatuh antara 1750 - 2500 mm. Arah angin yang bertiup di Kabupaten Klaten selalu mengalami juga pergantian setiap enam bulan sekali. Enam bulan antara April sampai Oktober, angin bertiup dari Benua Australia ke arah barat daya. Enam bulan berikutnya antara Oktober sampai April angin bertiup dari Benua Asia ke arah Australia tenggara.<sup>33</sup>

-----  
<sup>33</sup> M. Scaay dan Sutopo, Indonesia (Jakarta : Gramedia, 1959), hlm. 25

Perkembangan Golkar juga dipengaruhi kondisi iklim, hal itu dapat dilihat karena Golkar dalam memberikan bantuannya sering berkaitan dengan kondisi iklim yang ada di Kabupaten Klaten. Pada umumnya kondisi wilayah Kabupaten Klaten sangat subur dan kondisi iklim yang cocok untuk daerah tanaman pertanian. Sebagian besar penduduk Kabupaten Klaten hidup dari pertanian yang disebabkan oleh faktor adanya kondisi daerah yang potensial sekali untuk pertanian. Adanya kondisi wilayah demikian maka penduduk atau para petani terdorong untuk mengelola tanah pertaniannya dengan baik. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan produksi pangan yang semakin meningkat sehingga segala kebutuhan sosial ekonomi dapat terpenuhi.

Pada umumnya Golkar dalam memberikan bantuannya pada masyarakat sering hanya mendasarkan pada kepentingan penduduk yang meminta dan kurang memperhatikan kepentingan berdasarkan kondisi geografis.<sup>34</sup> Dengan demikian program bantuan Golkar sebaiknya tidak hanya mendasarkan pada kepentingan yang diminta penduduk saja melainkan perlu juga memperhatikan kondisi wilayah dan iklim yang dialami pada setiap daerah. Kabupaten Klaten mengalami dua musim yang saling bergantian yakni musim penghujan dan musim kemarau. Setiap pergantian musim sering menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi penduduk maupun hasil pertanian

-----

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Val. Bambang Setiawan pada tanggal 20 Januari 1991, di Klaten.

sehingga Golkar melalui aparat pemerintah perlu selalu memantau daerah yang mengalami kesulitan. Musim kemarau yang agak panjang sebagai contohnya, walaupun daerah Klanten dikenal sebagai sumber air tetapi dalam kenyataannya masih terlihat juga bahwa banyak daerah pertanian yang mengalami kekeringan. Dengan kondisi tersebut sebenarnya secara tidak langsung menimbulkan permasalahan bagi para petani yang menginginkan agar tanah sawahnya selalu mendapatkan aliran air yang cukup. Masalah kekurangan air tersebut ternyata dapat menimbulkan terjadinya perebutan air di antara para petani. Dalam kondisi semacam ini seharusnya Golkar selalu tanggap dalam mengatasi hal ini, umpamanya melalui aparat pemerintah seperti perangkat desa agar diajak untuk mulai mendisiplinkan diri dan mengerti akan tanggung jawab dan fungsi jabatannya. Hal itu disebabkan masih terlihat juga pada perangkat desa yang kurang mau mengerti akan fungsi dan kewajiban dalam mengemban tugasnya. Masalah air umpamanya, sebenarnya penduduk terutama petani sangat memerlukan adanya campur tangan dari pihak aparat pemerintah seperti perangkat desa untuk mengatasi permasalahan tersebut tetapi kenyataannya mereka kurang mau memperhatikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Masalah lain yang terjadi pada musim hujan biasanya produksi tanaman pangan hasilnya menurun. Untuk itu sebaiknya Golkar berusaha mengupayakan sistem pertanian atau persawahan menjadi lebih baik agar hasilnya meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Bagi penduduk yang mengalami kondisi ekonomi yang sulit, pada umumnya mereka lebih



mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan politik. Kepentingan politik bagi mereka dipandang kurang begitu penting sebab dianggap kurang dapat menjamin kebutuhan hidupnya. Dengan demikian melalui pendekatan politik lebih sulit untuk diterima dan ditanggapi oleh penduduk yang sedang dalam kondisi seperti itu. Hal tersebut dapat diatasi caranya pada waktu musim sulit ekonomi, Golkar memberi sesuatu yang dapat dibutuhkan oleh penduduk atau memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka.

## E. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Kabupaten Klaten menurut catatan Kantor biro pusat statistik Kabupaten Klaten pada tahun 1982 tercatat angka 1.112.535 jiwa dan 223.619 kepala keluarga.<sup>35</sup> Apabila angka ini diperhitungkan dengan luas wilayah 655,56 Km<sup>2</sup>, maka akan diperoleh angka kepadatan penduduk rata-rata per km<sup>2</sup> sebanyak + 1.695 jiwa. Sedangkan pada tahun 1987 tercatat angka 1.161.225 jiwa dan 240.423 kepala keluarga. Apabila angka ini juga diperhitungkan dengan luas wilayah maka akan diperoleh angka kepadatan penduduk rata-rata per km<sup>2</sup> sebanyak 1.771 jiwa.<sup>36</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Klaten termasuk padat dan kecepatan pertumbuhan penduduk tinggi.

-----  
<sup>35</sup> "Klaten Dalam Angka 1982", Kantor Statistik Kabupaten Dati II Klaten, 1982, hlm. 18

<sup>36</sup> "Klaten Dalam Angka 1987", Kantor Statistik Kabupaten Dati II Klaten, 1987, hlm. 13



Mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten sebagai petani dan buruh, baik buruh tani, industri maupun buruh bangunan. Disamping itu juga ada yang mata pencahariannya sebagai nelayan, pengusaha, pedagang, pengangkutan, pegawai negeri, pensiunan dan lain-lain. Dalam masyarakat agraris, tanah pertanian merupakan sumber produksi dan sumber kekayaan penduduk. Hal itu disebabkan kedudukan sosial masyarakat desa secara tradisional masih mendasarkan pada pemilikan tanah.

Selain pertanian, ada juga beberapa perusahaan, pabrik, kerajinan yang menunjang perekonomian rakyat, diantaranya ialah perusahaan makanan, minuman, tembakau, tekstil, pengelolaan kertas, alat olah raga, kimia dan bangunan, logam serta kerajinan umum. Sifat perusahaan tersebut padat karya atau membutuhkan tenaga kerja banyak. Hasil perusahaan tersebut disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk masyarakat di luar Kabupaten Klaten. Kegiatan perekonomian sudah dapat berjalan dengan lancar dan didukung pula adanya sarana transportasi yang berupa jalan sudah banyak yang diperkeras. Disamping itu juga banyak jembatan yang sudah baik dan sarana transportasi berupa angkutan sudah diperbanyak untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Dalam masyarakat tradisional maupun modern selalu terdapat lapisan masyarakat. Menurut Pitirim A. Sorokin, pelapisan masyarakat itu mempunyai ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. <sup>37</sup> Sistem pe-

-----  
<sup>37</sup> Pitirim A. Sorokin, Social and Cultural Mobility ( London : Collier Macmillan Limited, 1959 ), hlm. 11

lapisan masyarakat dikenal dengan istilah "Social Stratification" yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat. Dasar dan inti pelapisan masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat. Perwujudannya bahwa di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah.

Masyarakat Kabupaten Klaten dapat digolongkan ke dalam tiga lapisan yaitu lapisan atas, lapisan tengah dan lapisan bawah. Lapisan atas masih dapat dibagi menjadi beberapa tingkat antara lain tingkat yang paling atas adalah mereka yang duduk di birokrasi pemerintahan yang mempunyai status sosial yang tinggi, kecakapan, kekayaan seperti bupati, camat dan sebagainya. Tingkat dibawahnya, mereka yang mempunyai kepandaian yang cukup, pendidikan yang membedakan dengan lapisan tengah dan bawah. Tingkat yang paling bawah mereka yang mempunyai status sosial yang lebih rendah, pendidikan yang lebih rendah seperti pesuruh, tukang kebun dan sebagainya.

Lapisan tengah adalah pengusaha dan pedagang sedangkan lapisan bawah adalah rakyat biasa. Namun dalam kenyataannya sistem pelapisan masyarakat tersebut kurang begitu menonjol di Kabupaten Klaten.<sup>38</sup> Birokrasi pemerintahan tertinggi dipegang oleh seorang bupati sebagai kepala pemerintahan sedangkan birokrasi yang terendah dipegang oleh kepala desa beserta perangkatnya.

-----

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wal. Bambang Setiawan pada tanggal 20 Januari 1991, di Klaten.

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus-menerus, untuk mencapai suatu tujuan. Dengan perkataan lain birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.<sup>39</sup> Disamping bupati dan kepala desa, terdapat juga kelompok elit agama seperti guru agama, kyai, dan haji. Kelompok tersebut secara informal mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Peranan kelompok tersebut masih terlihat juga di daerah Cepur, Juwiring, Ngawen, Gading, Tempursari.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klaten pada umumnya masih rendah, kebanyakan hanya sampai tamatan sekolah lanjutan atas. Hal itu disebabkan faktor utama adalah kesejahteraan penduduk yang masih relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya faktor pendidikan itu amat penting untuk mendukung berhasilnya pembangunan. Pembangunan akan dapat berjalan lancar dan maju apabila kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakat itu baik. Sebaliknya, pembangunan akan mengalami hambatan apabila kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakat itu rendah dan juga kondisi kesejahteraan masyarakat lemah. Faktor pendidikan dan kesejahteraan amat erat kaitannya sebab pendidikan sekolah tidak akan maju apabila kesejahteraan masyarakat kurang dapat mengimbangnya atau masih terlalu minim pendapatan yang

-----  
<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : Rajawali Pers, 1987), hlm. 134-135.

diperolehnya. Disamping itu pendidikan sekolah selalu membutuhkan dana demi kelancarannya padahal kondisi ekonomi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari selalu menuntut agar dapat segera terpenuhi. Masalah tersebut dapat menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan antara kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Pendidikan sekolah yang rendah secara tidak langsung mempengaruhi modal pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi sangat minim sehingga memungkinkan banyak menimbulkan masalah sosial yang kompleks. Masalah-masalah sosial tersebut seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya tuna susila dan gelandangan, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan sebagainya. Berkaitan dengan masalah tersebut pertama-tama Golkar perlu menanggapi dan mau memperhatikan akan kesejahteraan penduduk yang perlu ditingkatkan dan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat perlu segera diatasi seperti melalui peningkatan produksi pangan, memberikan lapangan kerja, menyalurkan bakat-bakat yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, meningkatkan pendapatan penduduk dan sebagainya, sehingga sedikit banyak dapat mengurangi terjadinya ketimpangan atau kesenjangan yang ada dalam masyarakat.

Dalam bab IV penulis akan menguraikan masalah perkembangan Golkar Kabupaten Klaten sebelum Pemilu 1982, yaitu kurun waktu Pemilu 1971 sampai Pemilu 1977. Lebih lanjut akan diuraikan pula mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Golkar yang mengalami kenaikan dan penurunan hasil suara.

BAB IV

DINAMIKA GOLKAR PADA PEMILU 1971 DAN PEMILU 1977

Golkar merupakan perhimpunan satuan-satuan kelompok massa karya atau golongan-golongan fungsional, karena mereka melaksanakan karya atau fungsi tertentu dalam masyarakat. Massa karya sesungguhnya sudah ada di Indonesia sejak masa penjajahan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, eksistensi mereka dicantumkan juga dalam bab dua ayat satu UUD 1945.<sup>40</sup> Dengan itu status mereka meningkat karena pencatuman itu merupakan pengakuan politis yang konsepsional dan formal bagi eksistensi Golkar. Namun demikian peran sertanya dalam kehidupan politik praktis masih harus diperjuangkan.

Konsepsi Presiden Soekarno tahun 1957 memberi angin kepada Golkar, kemudian dalam DPRGR terdapat cukup banyak anggota yang mewakili Golkar, namun mereka belum mewakili wadah berupa organisasi politik sendiri. Berkat prakarsa ABRI terutama TNI AD (Angkatan Darat), organisasi sosial politik bagi Golkar itu akhirnya dibentuk pada tanggal 20

-----

<sup>40</sup> Bab 2 pasal 2 UUD 1945 dianggap sebagai dasar konstitusional bagi Golkar. Pasal UUD 1945 ini sebenarnya hanya menyebutkan golongan-golongan. Didalam penjelasan ayat ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan golongan-golongan itu ialah badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja dan lain-lain badan kolektif. Dari sini muncul ungkapan Golongan Fungsional, Golongan Karya, Sekbergolkar, K. Wantjik Saleh UUD 1945 serta Konstitusi RIS dan UUD Sementara RI (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 8 - 23



Perkembangan Golkar sedikit banyak mengikuti irama itu ditempuh banyak kegiatan sebagai persiapan menghadapi Pemilu 1971. Dalam bidang organisasi, Golkar berusaha mengkonsolidasikan diri. Konsolidasi yang sesungguhnya tercapai dan mereka sudah cukup maju karena dicapai kata sepakat untuk tampil dalam pemilu dengan satu panji "Pohon Beringin". Golkar mendapat tambahan predikat non afiliasi atau murni karena mereka tidak ber-naung atau berafiliasi pada partai politik. Sebutan non afiliasi atau murni perlu ditambahkan karena sebagian besar dari massa karya dinamakan Golkar afiliasi, karena mereka berafiliasi dengan partai politik.

Golkar yang dibicarakan disini adalah organisasi politik<sup>41</sup> yang menjalankan fungsi-fungsinya seperti yang biasa dijalankan oleh partai politik yakni sebagai sarana komunikasi politik yang meliputi penggabungan kepentingan (interest aggregation) dan perumusan kepentingan (interest articulation); sebagai sarana rekrutmen politik.<sup>42</sup> Namun demikian Golkar di sini memiliki ciri sendiri yang unik dan terletak dalam perwujudan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik dan artikulasi kepentingan.

-----

41 Robert Michel, Political Parties A Sociological Study of Oligarchical Tendencies of modern Democracy (New York : Crowel-Collier, 1962), hlm. 61-63 yang menguraikan pengertian "organisasi" adalah kesatuan yang berstruktur atau kesatuan dari bagian-bagian dalam satu keseluruhan yang mempunyai tujuan. "Politik" adalah ilmu normatif yang membicarakan organisasi kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pemerintahan dan masalah-masalah kenegaraan. Organisasi politik adalah kesatuan berstruktur dari massa yang bergerak di bidang kenegaraan.

42 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : Gramedia, 1977), hlm. 164



A. Perkembangan Golkar pada Pemilu 1971

Pemilu 1987 merupakan medan uji coba pertama bagi Golkar untuk mengetahui kekuatannya. Golkar memperoleh kemenangan dengan keunggulan yang sangat meyakinkan. Sebenarnya mereka semua, baik partai-partai politik maupun Golkar, yang turut mengambil bagian dalam Pemilu 1987, mempunyai kesempatan yang sama dari pemerintah untuk berkampanye. Hal ini merupakan suatu kesempatan yang adil untuk mempengaruhi massa pemilih sebagai pelengkap kontak terbatas dengan mereka melalui kampanye lapangan yang bersifat lokal. Pemilu 1971 diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golkar yaitu Partai Katolik, PSII, NU, Parmusi, Golkar, Parkindo, Murba, PNI, Perti, dan IPKI.<sup>43</sup>

Golkar dalam Pemilu 1971 tampil pertama kali sebagai pendatang baru tetapi hasilnya lebih banyak apabila dibandingkan partai-partai politik yang telah berpengalaman. Hal itu penyebabnya adalah terjadinya perubahan struktur politik berupa penyederhanaan kepartaian, masuknya ABRI kedalam gelanggang perjuangan sosial politik praktis dan semakin majunya pembangunan di segala bidang. Kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 disebabkan adanya dukungan ABRI, dukungan Pemerintah, usaha serta kekuatan Golkar sendiri, faktor situasi ekonomi, kehidupan politik, kehidupan Hankam sesudah G 30 S 1965 yang berkembang makin stabil dan menguntungkan Golkar.

-----  
<sup>43</sup> Imam Pratigny, Lahirnya Golongan Karya (Jakarta : Yayasan Bhakti, 1983), hlm. 87 ; Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional (Jakarta : Yayasan Proklamasi CSIS , 1981), hlm. 191

urutan faktor di atas adalah urutan seri, bukan urutan prioritas atau urutan besarnya porsi peranan yang disumbangkan.

## A. Pelaksanaan Kampanye Golkar

Kampanye pemilu merupakan suatu rangkaian pesta demokrasi, juga menjadi sistem penghimpun informasi dari rakyat. Informasi itu berbentuk pikiran dan aspirasi yang terungkap selama masa kampanye secara terbuka, suatu kesempatan yang mungkin tidak akan diperoleh pada waktu-waktu lain. Masa kampanye menjadi suatu masa bagi mengalirnya informasi dari rakyat kebanyakan secara lebih terbuka dan bebas. Hal itu bukan saja bermanfaat untuk mengalirkan informasi dari bawah yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk kebijakan umum, tetapi juga untuk koreksi rakyat terhadap situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu.

Kampanye merupakan sarana Golkar dan partai politik untuk menjaring massa. Kampanye Golkar terutama kampanye lapangan mempunyai pengaruh terhadap massa pemilih karena dijalankan dalam bentuk yang menarik dengan program yang memberi harapan untuk meningkatkan kemajuan hidup, dengan nada persuasif, dan dengan menampilkan tokoh-tokoh calon yang pada umumnya mempunyai kewibawaan serta pengaruh pada tingkat nasional dan regional atau sekurang-kurangnya pada tingkat lokal. Golkar dalam membagi massa kampanye pemilih menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Massa pemilih yang secara pasti telah menjadi anggota organisasi sosial politik peserta pemilu. Kelompok itu hanya

menjadi obyek tambahan bagi Golkar, karena itu tidak diperas tenaga untuk menarik mereka.

- b. Massa pemilih yang pernah diraih atau masih menjadi simpatisan-simpatisan organisasi sosial politik peserta pemilu 1971. Kelompok itu dianggap sebagai obyek penting untuk ditarik pada Golkar dan diarahkan sebagai massa pemilih kawan.
- c. Massa pemilih yang tidak terikat dan tidak menjadi simpatisan organisasi sosial politik peserta pemilu. Kelompok ini juga dinamakan massa mengambang (floating mass) atau oleh Suprpto Sokowati dinamakan the bulk of the mass yang digambar sebagai massa tersiar yang sama sekali tidak terorganisir dan belum berpihak kepada siapa pun dalam pemilu yang akan datang. Kelompok itu menjadi obyek utama untuk dipengaruhi dalam kampanye dan diusahakan menjadi pemilih Golkar. <sup>44</sup>

Golkar memakai juga berbagai cara dalam kampanye untuk memenangkan simpati massa pemilih mengambang. Golkar tidak segan-segan memanfaatkan sarana antara lain berupa : Pertama, lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan tradisional, agama, kebudayaan, yang ada dalam masyarakat. Kedua, tokoh-tokoh masyarakat desa, adat dan agama. Ketiga, para pejabat yang mempunyai hubungan langsung dengan massa pemilih keluarga ABRI serta tokoh-tokoh pejuang yang dihormati dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

-----  
<sup>44</sup> Suprpto Sokowati, Pengarahannya Strategi Dan Taktik Dasar Untuk Memenangkan Orde Pembangunan atau Orde Panca-sila (Djakarta : Sekbergolkar, 1969), hlm. 42 - 43

Kampanye resmi dimulai pada tanggal 27 April 1971 sampai dengan tanggal 25 Juni 1971. Waktu antara berakhirnya kampanye resmi dan pemungutan suara pada 3 Juli 1971 dinamakan minggu tenang. Bentuk-bentuk kampanye resmi yang dilaksanakan seperti rapat umum, pawai kendaraan ataupun bersepeda, pemasangan poster, pamflet, brosur, dan sebagainya. <sup>45</sup>

Golkar memanfaatkan juga "sentimen daerah" untuk memikat massa pemilu. Kiranya dapatlah dimaklumi kalau calon dari daerah sendiri dapat lebih mudah menarik simpati pemilih setempat. Calon-calon demikian itu biasanya sudah mempunyai relasi dengan pemilih di sekitarnya. Relasi yang bersahabat dapat juga berarti dukungan. Berdasarkan pertimbangan itu, para pendukung Golkar berusaha memperbanyak calon mereka diambil dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Golkar di Kabupaten Klaten tampaknya juga berpikir tentang peranan wanita untuk mempengaruhi massa pemilih, sehingga diikutsertakan sejumlah tokoh-tokoh wanita sebagai calon. Disamping itu, kampanye Golkar juga diwarnai adanya isu-isu seperti masalah keagamaan misalnya pembangunan no agama yes, masalah perjudian misalnya pemerintahan Golkar menyuburkan kemaksiatan, masalah korupsi misalnya Golkar no-korupsi yes, dan sebagainya. Walaupun demikian Golkar tampak defensif dalam menghadapi masalah isu-isu tersebut.

-----

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak FX. Soemantojo, pada tanggal 13 Maret 1991 di Klaten.

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pemungutan suara yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten dapat terlaksana dengan tertib, aman dan lancar. Badan badan keamanan berada dalam keadaan siap siaga di semua TPS untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 3 Juli 1971. Golkar mengikuti pemilu walaupun baru tampil pertama kali tetapi dapat meraih kemenangan dengan jumlah suara yang diperolehnya sebanyak 248.098 suara dari pemilih yang memberikan suara yang sah sebanyak 473.570 kepada Golkar. Hal ini berarti Golkar memenangkan 54,28 % dari seluruh suara yang sah. Dibawah ini hasil Pemilu 1971 untuk daerah Kabupaten Klaten.

TABEL : 1  
REKAPITULASI HASIL PESERTA PEMILU 1971

NAMA ORGANISASI PESERTA PEMILU	SUARA	%	KURSI
Golkar	248.098	54,28	17
PPP	76.519	11,50	4
PDI	148.593	34,22	11

Sumber : Kantor DPD  
Golkar Klaten.

Golkar di Kabupaten Klaten dapat mengalahkan partai politik khususnya PNI yang sebelumnya mengantongi suara mayoritas pada Pemilu 1955. Pada Pemilu 1971 Golkar te -

lah menggeser kedudukan PNI dan PNI mendapat suara nomor dua setelah Golkar.<sup>46</sup> Pemilu 1971 ternyata Golkar di Kabupaten Klaten mendapat keberuntungan atau kemenangan di banding dengan partai politik yang telah berpengalaman.

Kesan-kesan positif tentang realisasi Pemilu 1971 yang dilukiskan dengan kata-kata bebas, aman, tertib dan lancar, tidak dimaksudkan untuk menutup-nutupi kesulitan real yang dihadapi di lapangan. Sebenarnya realisasi kongkret tidak semulus yang disiarkan secara resmi, tersua juga kerikil-kerikil yang mengganjal antara lain; Pertama, Golkar belum begitu memasyarakat dan masyarakat masih terkotak-kotak dalam kehidupan partai politik. Kedua, masyarakat Klaten masih dipengaruhi pandangan primordialisme. Ketiga, masalah kaderisasi yang belum berjalan dengan baik.

Realisasi Pemilu 1971 ternyata harus melangkahi sejumlah kerikil-kerikil yang mengganjal, syukurlah bahwa para kontestan kadang-kadang terantuk namun tidak sampai terjatuh. Orang-orang yang tidak sependapat dapat juga bersahabat.

Pemilu 1971 dapatlah dijelaskan sebagai usaha untuk mengungkapkan beberapa faktor yang kiranya dapat menjawab pertanyaan : Mengapa Golkar, pada usianya yang masih muda itu, dapat tampil sebagai pemenang dalam Pemilu 1971. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah :

-----  
<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak FX. Soemantojo pada tanggal 7 Maret 1991 di Klaten.



- a. Salah satu faktor penentu kemenangan Golkar adalah dukungan ABRI. Golkar dianggap dapat menjadi sekutu yang baik bagi ABRI untuk merealisasikan dwi fungsinya.<sup>47</sup> Melalui dwi fungsi itu ABRI dapat memainkan peranan dalam bidang pembangunan dan peranan ABRI lebih mudah diterima masyarakat. Berdasarkan pertimbangan itu ABRI merasa turut berkepentingan memberikan dukungan kepada Golkar sebagai usaha untuk menang dalam pemilu.
- b. Faktor kedua adalah dukungan Pemerintah Orde Baru. Program Golkar adalah sama dengan program-program pemerintah, karena itu pemerintah dengan senang hati memberikan dukungan dalam bermacam-macam bentuk pada Golkar untuk sukses dalam pemilu. Dengan demikian lebih mudah mensukseskan cita-cita mereka bersama yang pada dasarnya adalah merombak dan memperbaiki struktur politik demi kepentingan usaha pembangunan khususnya pembangunan ekonomi.
- c. Faktor ketiga adalah Golkar sendiri. Golkar sendiri mempunyai kekuatan dan daya pikat untuk memperoleh dukungan massa. Pertama, Golkar merupakan organisasi sosial politik yang merupakan himpunan organisasi-organisasi karya yang berbasis massa karya. Dengan demikian Golkar mempunyai massa pendukung aktual. Kedua, Anggaran Dasar Golkar memberikan juga peluang kepada setiap warga negara
- 

<sup>47</sup> Nasution, Kekaryaan ABRI (Jakarta : Seruling Massa, 1971), hlm. 53 yang menyatakan bahwa Dwi fungsi adalah ajaran bahwa ABRI merupakan potensi militer dan potensi sosial politik. Karena itu, ABRI bukanlah alat sipil melainkan salah satu kekuatan sosial politik.

Indonesia untuk menjadi anggotanya. Ketiga, Golkar berusaha menarik massa pendukung melalui calon-calonnya yang berpendidikan Akademis dan berwibawa.

- d. Faktor ketiga di atas dapat dikatakan faktor pelaku. Di samping itu masih ada faktor lain yaitu situasi kehidupan ekonomi, politik serta pertahanan dan keamanan. Program Golkar mengenai pembangunan ekonomi tidak dihalangi karena program Golkar sejalan dengan program pemerintah orde baru sendiri yang memberikan tekanan kepada pembangunan ekonomi. Demikian pula rehabilitasi dan stabilisasi dalam pembangunan bidang ekonomi mendatangkan simpati dan kepercayaan kepada pemerintah orde baru, dengan itu secara tidak langsung mendatangkan juga perhatian dan kepercayaan kepada Golkar yang didukung oleh pemerintah orde baru.

Perlu ditambahkan pula bahwa Golkar melakukan usaha yang khusus untuk menciptakan relasi akrab dengan partai politik sehingga Golkar dapat menyelesaikan konsolidasi. Secara keluar, diciptakan relasi yang baik dengan partai politik yang berpengaruh. Secara ke dalam, dimantapkannya organisasi dan pimpinannya.

Peranan ABRI dan Pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Golkar menjadi sangat efektif karena mereka terdapat kerjasama yang erat. Hal itu dapat dipahami karena mereka terdapat kesamaan sasaran dan kepentingan dan banyak tokoh-tokoh ABRI memegang kunci dalam pemerintah orde baru, misalnya Presiden Soeharto dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Dengan demikian ABRI dan Pemerintah menjadi

faktor integratif bagi Golkar, sehingga Golkar yang terdiri dari begitu banyak organisasi dapat bersatu dalam perjuangan dan dapat tampil sebagai pemenang Pemilu 1971.

Pengaruh kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 adalah pertama, kemenangan itu telah menciptakan Golkar sebagai satu organisasi sosial politik dengan keunggulan suara yang mutlak. Kedua, ABRI merupakan pendukung Golkar yang menang mutlak, ABRI telah masuk ke arena sentral kehidupan politik perwakilan. Ketiga, kemenangan Golkar dapat diidentifikasi dengan pemerintah orde baru. Identifikasi ini menimbulkan harapan bahwa situasi pemerintahan orde baru bakal stabil. Keempat, kemenangan Golkar merupakan suatu pukulan bagi partai politik dan secara serentak mengakhiri dominasi mereka. Kelima, struktur kehidupan politik Indonesia dapat dirubah. Keenam, organisasi-organisasi politik diciutkan jumlahnya dari orientasi pada ideologi yang berkotak-kotak menjadi orientasi pada pembangunan yang menyeluruh.

## B. Perkembangan Golkar Pada Pemilu 1977

Dalam dua kali pemilu selama masa orde baru, pada tahun 1971 dan 1977 Golkar keluar sebagai pemenang dengan mengantongi suara mayoritas mutlak di Kabupaten Klaten. Kemenangan itu memberikan suatu dasar pengesahan tertentu bagi langkah-langkah politik lebih lanjut.

Tumbuhnya Golkar bersamaan dengan kuatnya dorongan ke arah pembaharuan struktur politik dan fusi partai-partai

politik pada tahun 1973. Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 telah menampilkan suatu kekuatan politik baru yang serta merta Golkar memperoleh kemenangan yang menyapu bersih lawan-lawannya. Pemilu 1971 merupakan salah satu konsekwensi persiapan yang efektif untuk menghadapi Pemilu 1977. Dalam hubungan itu, Golkar pada Pemilu 1977 telah menjadi peserta yang sudah mempunyai "identitas" sedangkan kedua peserta dari partai politik (PPP, PDI) adalah peserta baru yang pertama kali mencoba menampilkan dan mempertaruhkan identitasnya untuk menarik massa pendukungnya dalam pemilu itu. Dengan kata lain bahwa pada Pemilu 1977, Golkar sebagai peserta yang sudah berpengalaman, sedangkan kedua partai politik (PPP dan PDI) sebagai peserta baru yang tidak mempunyai pengalaman berkampanye pada pemilu sebelumnya. Di pihak partai berarti mereka harus merumuskan dan menampilkan siapa dirinya, karena itu identitas partai pada Pemilu 1977 menjadi taruhan. <sup>48</sup>

## 1. Pelaksanaan Kampanye

Undang-undang Pemilu 1977 disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada akhir pekan November 1975, telah menetapkan bahwa hanya ada tiga gambar peserta pemilu yaitu dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golkar. <sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Daniel Dhakidae, op.cit., hlm. 202

<sup>49</sup> UU No. 3 Tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar.

Sebelum menuju tempat pemungutan suara (TPS) pada tanggal 2 Mei 1977 semua peserta pemilu diberi kesempatan untuk berkampanye selama dua bulan (60 hari). Menurut jadwal kampanye dimulai tanggal 27 Februari dan berakhir pada tanggal 25 April, seminggu sebelum menuju TPS dinamakan minggu tenang.

Dalam Pemilu 1977 Golkar menjadi peserta pemilu dan telah mempunyai identitas yang jelas. Keadaan itu menyesuaikan suasana kampanye Pemilu 1977 yang hampir tidak jauh berbeda dari suasana pada kampanye pemilu sebelumnya. Kampanye merupakan kesempatan bagi para kontestan untuk mengadakan komunikasi langsung dan terbuka dengan para pendukung serta simpatisannya. Hal itu dimaksudkan agar rakyat luas tertarik untuk ikut mendukung mereka. Kampanye Pemilu sebagai salah satu dari bentuk partisipasi politik, yang seringkali membawa pesan-pesan tertentu yang sangat bermanfaat bagi usaha-usaha pemenuhan kepentingan masyarakat pada masa-masa yang akan datang.

Kampanye Pemilu 1977 telah berlangsung dengan lancar, tertib dan aman. Kampanye pemilu yang terjadi di Kabupaten Klaten juga terjadi pelanggaran-pelanggaran namun intensitasnya relatif kecil. Hal itu disebabkan secara umum masyarakat Kabupaten Klaten mau mentaati semua kebijakan pemerintah yang masih tampak mendominir Golkar dengan melalui semua jajaran negeri, baik yang ada di kota maupun di desa. 50

---

50 Hasil wawancara dengan Bapak FX. Soemantojo, pada tanggal 13 Maret 1991 di Klaten.



Pada umumnya bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan Golkar tidak mengalami perubahan seperti yang dilakukan pada Pemilu 1971, hanya saja ABRI mulai menetralkan diri tidak turut berkampanye seperti pada waktu pemilu sebelumnya. Disamping itu Golkar masih menggunakan sistem pola panutan untuk mencari atau menjaring massa pendukungnya.

Tema-tema kampanye yang didasarkan pada program-program pembangunan organisasi peserta pemilu memang dicanangkan sebagai inti kampanye 1977. Pada awalnya Golkar mengembangkan tema sentral "Peningkatan Pembangunan Dan Pemerataan Hasil-hasilnya". Program kampanye yang diutamakan Golkar pada Pemilu 1977 adalah pertama, Golkar mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dan melaksanakan secara murni dan konsekwen. Kedua, Pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya, untuk mencapai tujuan nasional. Ketiga, membina dan memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Keempat, mendukung sebagai salah satu kekuatan sosial politik.<sup>51</sup>

Dalam Pemilu 1977 Golkar secara nasional berusaha keras untuk mengidentikkan diri dengan suatu partai yang terdiri dari manusia-manusia modern yang mengusahakan modernisasi dan pembangunan Indonesia. Melawan isu ideologis dan agama, Golkar tidak punya cara lain dari pada bersandar pada pembangunan dan modernisasi. Kalau itupun tidak berhasil maka kekuatan tidak segan-segan akan dipakai.

-----

<sup>51</sup> Keterangan tertulis dari Bapak Y. Soetopo, pada tanggal 15 Maret 1991, di Klaten.



Menteri Penerangan Ali Moertopo mengatakan :

" Golkar sebagai pemain, sebagai suatu kekuatan politik sangat diperlukan orde baru untuk pembangunan bangsa harus benar-benar mampu bertindak sebagai pemain demokrasi. Boleh saja main keras asal dalam batas-batas peraturan permainan ".

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 yang diikuti oleh tiga peserta pemilu, masing-masing yaitu PPP, Golkar, PDI. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten sebanyak 1.022.422 jiwa, sedangkan jumlah mereka yang tercatat berhak memilih 518.828 orang. Dari jumlah yang tercatat melakukan hak pilihnya secara sah sebanyak 458.950 orang dan suara sebanyak 213.000 atau 46 % diberikan kepada Golkar. Jumlah TPS yang dipakai pada Pemilu 1977 di Kabupaten Klaten sebanyak 2.026. Hasil Pemilu 1977 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL : 2  
REKAPITULASI HASIL PESERTA PEMILU 1977

NAMA ORGANISASI PESERTA PEMILU	SUARA	%	KURSI
Golkar	213.000	46,41	15
PPP	93.019	20,27	6
PDI	152.931	33,32	11

Sumber : Kantor DPD  
Golkar Klaten.

Hal yang cukup menarik pada Pemilu 1977 adalah Golkar di Kabupaten Klaten mengalami penurunan prestasi dalam mengumpulkan suara maupun perolehan kursi di DPRD Klaten dibanding pada pemilu sebelumnya. Sementara itu, apabila keempat partai Islam peserta pemilu 1971 digabung dan dapat dianggap sebagai hasil PPP, maka perolehan kursi di DPRD hasil Pemilu 1977 mengalami kenaikan sebanyak 2 kursi (tahun 1971 PPP memperoleh 4 kursi). Sedangkan PDI mengalami sedikit kenaikan tetapi mendapat perolehan kursi di DPRD tetap yaitu 11 kursi. Golkar mengalami penurunan prestasi dalam mengumpulkan suara maupun perolehan kursi di DPRD pada Pemilu 1977. Pada Pemilu 1971 Golkar mendapat suara sebanyak 248.098 atau 54,28 %, sedangkan memperoleh kursi di DPRD sebanyak 213.000 atau 46,41 %, sedangkan memperoleh kursi di DPRD mengalami penurunan 2 kursi sehingga menjadi 15 kursi.

Pemungutan suara yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten dapat terlaksana dengan tertib, lancar, aman tidak banyak mengalami hambatan. Badan-badan keamanan berada dalam keadaan siap siaga di semua TPS untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 2 Mei 1977. <sup>52</sup>

Hal lain yang cukup menarik dan menjadi gambaran peta kekuatan sosial politik dari pelaksanaan Pemilu 1977 adalah PPP dan PDI menjalani pemilu pertama setelah diadakan fusi pada tahun 1973. Disamping itu, Pemilu 1977 adalah yang pertama kali setelah orde baru berhasil me-

-----  
<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak FX. Soemantojo, pada tanggal 7 Maret 1991, di Klaten.

nelorkan Undang-undang No. 3 tahun 1975 yang mewajibkan setiap organisasi kekuatan sosial politik berasaskan Pancasila dan UUD 1945, disamping masih diperbolehkan pula menggunakan asas ciri khas masing-masing kontestan.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Suara Golkar

Pemilih Golkar pada Pemilu 1977 mengalami penurunan apabila dibandingkan pada Pemilu 1971. Pada Pemilu 1977 terdapat goyangan pola memilih masyarakat Kabupaten Klaten yang berpengaruh juga pada Golkar dalam mengumpulkan suara. Pemilu 1977 dalam kenyataannya Golkar memperoleh kemenangan tetapi kurang menggembirakan dibanding pemilu 1971. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya penurunan jumlah suara dan perolehan kursi di DPRD Klaten.

Pemilu 1977 dapatlah dijelaskan sebagai usaha untuk mengungkapkan beberapa faktor yang kiranya dapat menjawab pertanyaan : Mengapa Golkar pada Pemilu 1977 mengalami penurunan dalam mengumpulkan jumlah suara. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah : 53

- a. Mekanisme organisasi Golkar dan kelembagaannya yang belum berjalan sepenuhnya. Masalah ini bukan karena setelah dibentuknya fusi tetapi lebih disebabkan kemandirian Golkar yang belum mantap sehingga berpengaruh terhadap pembinaan kaderisasi atau pola panutan yang belum berjalan dengan baik.
- b. Golkar lebih bertumpu pada kader-kadernya yang men -

-----  
53

Hasil wawancara dengan Bapak FX. Soemantojo pada tanggal 13 Maret; Bapak Y. Soetopo pada tanggal 15 Maret; Bapak EH. Sutanto pada tanggal 20 Januari 1991; Bapak Soeparwan pada tanggal 7 Desember 1990 di Klaten.

- jadi pejabat aparat pemerintah antara lain seperti kepala desa dan perangkat desa. Hal ini disebabkan di antara mereka masih ada yang tidak loyal atau dapat dikatakan bermuka dua terhadap Golkar dan partai politik, sehingga berpengaruh juga terhadap masyarakat dalam menghadapi kampanye Golkar di desa-desa.
- c. Pembangunan dan hasilnya yang belum dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat pedesaan atau dalam hal ini Golkar belum merealisasikan janji-janjinya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - d. Masyarakat Klaten masih cukup kuat akan pandangan yang bersifat primordialisme terutama kebanggaan terhadap PNI.
  - e. Masyarakat Klaten secara umum bekas kader-kader PNI. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh juga terhadap pegawai negeri, walaupun telah dikeluarkannya Permen N6. 12 tahun 1969 yang menggiring pegawai negeri kedalam Golkar tetapi pada kenyataannya para pegawai negeri loyalitasnya masih diragukan terhadap Golkar.

Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 dan Pemilu 1977 telah memberikan arti penting bagi Golkar. Disamping itu juga memberikan suatu dasar legitimasi tertentu bagi Golkar dalam menentukan langkah-langkah politik lebih lanjut. Dalam bab V ini penulis akan menguraikan dinamika Golkar Kabupaten Klaten pada Pemilu 1982.

## BAB V DINAMIKA GOLKAR PADA PEMILU 1982

Pemilu tanggal 4 Mei 1982 merupakan pemilu yang ketiga setelah diselenggarakan pada tahun 1971 dan 1977 dalam masa pemerintahan orde baru. Pemilu di Indonesia telah berfungsi sebagai sarana penting dalam kehidupan demokrasi dan bukan sekedar seremonial belaka. Pemilu merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Ia seringkali dijadikan ukuran sejauhmana kadar demokrasi dari suatu negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Disamping itu juga dapat dijadikan ukuran sejauhmana tingkat kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara atau tingkat kesadaran politik warga negara. <sup>54</sup>

Pemilu kali ini diikuti oleh tiga kekuatan sosial politik. Pemilu 1982 merupakan pengalaman kedua bagi PPP dan PDI, sedangkan Golkar merupakan pengalaman yang ketiga. Dibandingkan dengan Pemilu 1977, prestasi PPP mengalami kenaikan dan PDI mengalami penurunan, sedangkan Golkar dengan tanda gambar yang sama dalam tiga kali pemilu, memperoleh jumlah kursi maupun suara yang meningkat.

---

<sup>54</sup> A. Sudiharto Djiwandono, "Pemilihan Umum Dan Pendidikan Politik", Analisa, No. 3, Thn. XII, 1983

Pada Pemilu 1982 Golkar menampilkan tema utama "Ke-sinambungan, Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan serta Hasil-hasilnya ". Kedua partai politik lain seperti PPP mengumandangkan tema " Dengan Aklak yang mulia kita mem-bangun Indonesia ". PDI tampil dengan tema utama " Pem - bangunan Demokrasi Pancasila di segala bidang ".<sup>55</sup> Di - banding Pemilu 1977, kali ini Golkar dan PPP muncul se - bagai dua kekuatan besar yang saling bersaing ketat. Se- mentara PPP tampak cenderung untuk selalu ikut memeriah- kan kampanye dan berusaha mengidentifikasikan diri se - bagai partai orang kecil, tampaknya kurang efektif untuk menarik massa pendukung kampanye yang secara kasar telah terbagi antara massa pendukung Golkar dan massa pendukung PPP.

Golkar dalam menghadapi Pemilu 1982 tampak lebih siap dibanding kedua partai politik lain seperti PPP dan PDI. Hal ini dapat dilihat langkah-langkah Golkar yang di jalankan untuk memenangkan Pemilu 1982 seperti melaksana- kan konsolidasi serta melakukan pendekatan secara per - suasif dan edukatif. Disamping itu, Golkar juga meman - faatkan perangkat desa atau piranti organisasi sampai ke tingkat bawah, sehingga minat masyarakat untuk menyalur- kan aspirasi politik lewat Golkar mulai tumbuh.<sup>56</sup> Per - juangan Golkar pada Pemilu 1982 di Kabupaten Klaten meng- alami keberhasilan.

-----  
<sup>55</sup> Tommi Legowo, " Pelaksanaan Pemilu 1982", Analisa No. 7, Thn. XVI, 1982

<sup>56</sup> Keterangan tertulis dari Bapak Y. Soetopo, pada tanggal 15 Maret 1991 di Klaten.



Hal itu ada beberapa faktor yang menunjang seperti situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang mantap dan stabil, keberadaan Golkar telah mulai tumbuh memasyarakat dibanding pemilu sebelumnya. Pembangunan mengalami peningkatan yang hasilnya dapat dirasakan dalam kalangan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari berhasilnya pembangunan fisik seperti produksi pertanian meningkat, perkembangan perindustrian, pembangunan sekolahan, pembangunan jalan dan sebagainya.

Perkembangan Golkar di Kabupaten Klaten akan lebih dapat dilihat dengan jelas apabila mengkaji juga bagaimana pelaksanaan kampanye yang dilakukan Golkar sehingga mampu memenangkan suara mayoritas yang mutlak. Disamping itu juga melihat bagaimana pelaksanaan dalam pengambilan suara beserta mencapai hasil akhirnya.

## A. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye politik dalam rangka pemilu merupakan kesempatan bagi para kontestan guna menanamkan pengaruh dan simpati di kalangan masyarakat. Disamping itu dengan menjelaskan program-program perjuangannya politikanya bagi kepentingan bangsa dan negara, sehingga dengan cara demikian masing-masing kontestan berusaha untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada saat pemungutan suara.

Ketiga kontestan (PPP, Golkar, PDI) dalam memperoleh suara dalam pemilu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye. Disamping itu mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pe-

layanan yang sama dalam melaksanakan kampanye serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan masa kampanye dimulai pada tanggal 15 Maret dan berakhir pada tanggal 28 April 1982. Selama masa kampanye, Golkar di Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan seperti rapat terbuka, pemasangan poster, pemasangan pamflet, pawai kendaraan, pentas seni dan tulisan-tulisa. Kegiatan rapat terbuka untuk tingkat di atas desa biasanya dilakukan di suatu lapangan yang cukup luas, sedangkan untuk tingkat desa kegiatan rapat terbuka dapat dilakukan di suatu pekarangan yang cukup luas untuk menampung massa yang hadir. Dalam rapat tersebut selain dilakukan pidato pengarahan peragaan cara mencoblos, juga kadang-kadang disertai nyanyian-nyanyian yang membakar semangat. Kegiatan pawai biasanya dilakukan sesudah selesainya rapat terbuka. Pawai yang biasa dilakukan seperti pawai kendaraan yang membawa segala macam spanduk dan atribut kampanye melewati jalan yang telah ditentukan.

Daerah yang dijadikan basis kampanye itu dipilihkan pada daerah-daerah yang padat penduduknya, letaknya strategis, mudah dijangkau dengan kendaraan, mudah untuk menempatkan massa. Pada umumnya satu wilayah Pembantu Bupati (Kawedanan), diambil dan dipilih satu lokasi untuk pelaksanaan kampanye terbuka, Daerah tersebut antara lain : <sup>57</sup>

- a. Wilayah Pembantu Bupati untuk Delanggu, diambilkan lokasi di Lapangan Juwiring, Delanggu atau Ceper.

-----

57

Keterangan tertulis dari Bapak Soeparwan, pada tanggal 19 November 1990 di Klaten.

- b. Wilayah Pembantu Bupati untuk Jatinom, diambilkan lokasi di Lapangan Bonyokan, Jatinom, Karangnom atau Polanharjo.
- c. Wilayah Pembantu Bupati untuk Pedan, diambilkan lokasi di Lapangan Seboyan Pedan, Cawas atau Karangdowo.
- d. Wilayah Pembantu Bupati untuk Gondangwinangun, diambilkan lokasi di Lapangan Ngendo, Jogonalan, Gantiwarno atau Prambanan.
- e. Wilayah Pembantu Bupati untuk kota Klaten, diambil lokasi di Lapangan Mayungan, Ngawen, Wedi atau Kebonarum.

Ketentuan pelaksanaan kampanye dalam segala bentuk harus memberitahukan secara tertulis kepada Komandan Sektor Kepolisian setempat selambat-lambatnya tujuh hari sebelum kegiatan diadakan. Dalam kegiatan kampanye tidak boleh menyelewengkan, mempermasalahkan eksistensi, memutarbalikkan arti dan isi, merongrong Pancasila dan UUD 1945 serta membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan UUD 1945.<sup>58</sup> Disamping itu juga dilarang memfitnah, menghina, atau menyinggung kehormatan pemerintah dan pejabatnya, agama, atau kepercayaan, golongan, organisasi, negara asing atau perorangan serta perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika atau tata krama menurut Pancasila.<sup>59</sup>

Segala bentuk kegiatan kampanye sebenarnya sudah diatur secara baik. Hal itu untuk menghindari bentrokan fisik antar kontestan yang melakukan kampanye. Pengaturan jadwal kampanye itu disepakati antara ketua PPD II dan ba-

<sup>58</sup>Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, pasal 81

<sup>59</sup>Ibid., pasal 82

gian keamanan (Polres dan Kodim) serta ketiga pimpinan OPP. Sebagai contohnya kegiatan rapat terbuka atau pawai telah diadakan penjadwalan bagi setiap kontestan sehingga tidak terjadi kegiatan yang bersamaan. Demikian pula untuk pemasangan poster, pamflet dan lainnya telah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi betrok-an antar kontestan. Pemasangan poster biasanya dilakukan pada malam hari pukul 00.00 WIB yang dilakukan oleh pemuda pendukung masing-masing kontestan. Hal itu dilakukan pada malam hari dimaksudkan untuk menghindari pemandangan yang menyolok, menghindari betrok-an fisik dengan kontestan lain, untuk menempatkan poster atau pamflet di tempat-tempat tertentu yang dianggap strategis dan menjaga ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Pengaturan kegiatan kampanye di antara kontestan telah diadakan tetapi masih relatif membuka kesempatan terjadi bentrok-an fisik dan bentrok-an non fisik. Bentrok-an non fisik itu lebih bersifat persaingan antar kontestan untuk memperoleh dukungan dari massa, seperti adanya isu mengenai masalah keagamaan, misalnya masuk Golkar menghalalkan segala cara dan melindungi perjudian; isu korupsi, misal pemerintahan Golkar melahirkan banyak koruptor dan juga pemerintahan korupsi alias Golkar korupsi dan sebagainya. Selain bentrok-an non fisik ternyata dalam kampanye Pemilu 1982 lebih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dibanding pemilu sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain pemasangan dan pengrusakan tanda gambar, perusakan kendaraan, perusakan rumah-rumah perorangan dan kantor-kantor pemerin-

tah. Pada Pemilu 1982, pelanggaran-pelanggaran lebih banyak terjadi dibanding pemilu sebelumnya disebabkan situasi dan kondisi politik pada saat itu masih diwarnai kekacauan seperti meningkatnya kriminalitas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kampanye pemilu, para peserta pemilu yang belum mengetahui atau mendalami aturan main pemilu, adanya pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan situasi pemilu. Realisasi pelaksanaan kampanye di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar dibawah ini.<sup>60</sup>



Gambar 1 : Pelaksanaan Kampanye pada tanggal 23 April 1982 di Monumen Juang 45 Klaten

60

Hasil wawancara dengan Bapak EH. Sutanto, pada tanggal 12 Februari dan keterangan tertulis dari Bapak Y. Soetopo pada tanggal 15 Maret 1991 di Klaten.





Gambar 2 : Pelaksanaan Kampanye Golkar pada tanggal 25 Maret 1982 di Lapangan Merdeka Karanganom

Kegiatan kampanye selalu mengandung unsur-unsur persaingan di antara para kontestan peserta pemilu itu kiranya adalah wajar. Hal itu disebabkan masing-masing kontestan pemilu tentu berusaha untuk keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan suara terbanyak. Namun yang perlu di sadari ialah bahwa dengan melalui kampanye yang baik organisasi politik dapat berperan secara efektif dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Klaten.

#### B. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Setelah 45 hari kampanye, semua kontestan dapat menyelesaikan kampanye putaran terakhir pada tanggal 28 April



1982. Tanggal 29 April sampai 3 Mei adalah minggu tenang. Maksud diadakannya minggu tenang adalah pertama, memberikan kesempatan kepada pemilih untuk merenungkan pilihannya setelah mengikuti atau mengamati atau menyimak pelaksanaan kampanye oleh OPP selama 45 hari. Kedua, memberikan kesempatan kepada panitia penyelenggara di TPS-TPS untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara yang menjadi tanggung jawabnya, seperti pembuatan surat undangan, pembuatan tempat pemungutan suara, pembersihan alat peraga kampanye dalam jarak 200 meter dari TPS, mengikuti serti aji dari panitia tingkat kecamatan (PPS), menerima surat suara dan perlengkapan lain untuk pelaksanaan pemungutan suara. Ketiga, untuk membuat keadaan normal kembali apabila ada eksekse-eksekse yang timbul selama kampanye, agar tidak mempengaruhi seseorang dalam memberikan suaranya.<sup>61</sup> Selama masa minggu tenang segala bentuk kegiatan kampanye harus dihentikan.

Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982 mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 14.00 WIB. Penduduk Kabupaten Klaten yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sejumlah 629.156 dari jumlah penduduk 1.026.475 orang yang berdatangan memasuki 2144 TPS.<sup>62</sup> Lokasi TPS berada di masing-masing desa atau kelurahan yang rata-rata ada 4 atau 5 buah TPS menurut jumlah pemilih yang

-----  
<sup>61</sup> Keterangan tertulis dari Bapak Soeparwan pada tanggal 7 Desember 1990 di Klaten.

<sup>62</sup> Keputusan-Keputusan Musda III Golkar Dati II Klaten, 1988 ; Data Pemilu 1971-1977-1982-1987 Kabupaten Klaten, hlm. 12

akan melakukan hak pilihnya untuk seluruh 23 kecamatan. Pada setiap TPS beranggotakan 7 orang yang dibantu dengan aparat keamanan ditambah 3 orang saksi DPP yang ditugaskan di TPS.

Sesudah adanya TPS, untuk melaksanakan pemungutan suara maka Bupati atau Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II atau ketua PPD II membentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk setiap TPS. Anggota-anggota KPPS termasuk ketuanya terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang semuanya dari unsur pemerintah. KPPS dibantu oleh aparat keamanan seperti Hansip dan Polri, yang bertugas antara lain dua orang, menunggu dan mengawasi di bilik coblosan untuk menolong orang yang sulit melaksanakan hak pilih, karena lumpuh, buta, sakit; seorang menunggu di kotak suara mengawasi supaya kartu suara dimasukkan kedalam kotak yang benar; seorang di pintu luar untuk menertibkan pemilih yang masuk dan keluar. Langkah selanjutnya adalah masing-masing pemilih menjatuhkan pilihan secara bebas dan rahasia dengan menusuk tanda gambar kontestan yang disukainya. Pemungutan suara dilakukan dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib sehingga menunjang terselesainya pemungutan suara dan mempercepat diadakannya penghitungan kartu suara.

### C. Penetapan Hasil Akhir

Setelah pemungutan suara dinyatakan usai, maka ketua mengumumkan jumlah surat undangan yang beredar, jumlah

kartu suara yang diterima, jumlah kartu suara yang digunakan. Tahap berikutnya diadakan penghitungan kartu suara yang ada dalam gambar tiga kotak yang berbeda yaitu warna biru untuk DPRD II, warna putih untuk DPRD I, warna kuning untuk DPR RI, lalu dicocokkan pada tanda gambar yang dicoblos yang disaksikan oleh tiga orang saksi. Jumlah kartu suara yang masuk dan sah untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten antara lain PPP sejumlah 123.127, PDI sejumlah 95.831, dan Golkar sejumlah 346.140 pemilih. Jumlah kartu suara yang tidak sah sebanyak 53.926 pemilih. Kartu suara yang tidak sah, berdasarkan hasil wawancara, disebabkan oleh faktor tidak sengaja seperti pemilih kebingungan menentukan pilihannya, faktor kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang frustrasi, faktor sengaja yang dilakukan oleh golongan Putih (Golput), faktor sengaja yang dilakukan oleh pihak pemilih untuk tidak datang pada waktu pelaksanaan pemungutan suara walaupun telah mempunyai surat undangan. **63**

Pada penyelenggaraan penghitungan suara biasanya disaksikan oleh beberapa orang saksi yang mewakili dari masing-masing kontestan agar hasil kerja penghitungan kartu suara yang diperoleh betul-betul benar dan jujur. Saksi bertugas memeriksa bilik rahasia, menyaksikan sah dan tidaknya kartu suara dan apabila terjadi kecurangan maka saksi mempunyai kewajiban untuk mengemukakan keberatan

-----  
**63** Hasil wawancara dengan Bapak Soeparwan pada tanggal 7 Desember 1990 dan Bapak Sutanto pada tanggal 12 Februari 1991 di Klaten.

kepada pimpinan TPS agar pelaksanaan dapat diulang kembali.

Sesudah diadakan penghitungan suara, akhirnya penghitungan suara dengan perolehan suara diantara tiga kontestan yang memperebutkan sebagai berikut : PPP mendapat perolehan suara sejumlah 123.127 dan 7 kursi di DPRD , PDI mendapat perolehan suara sejumlah 95.831 dan 5 kursi di DPRD, sedangkan Golkar mendapat perolehan suara sejumlah 346.140 dan 20 kursi di DPRD Klaten. Dibawah ini tabel hasil Pemilu 1982.

TABEL : 3  
REKAPITULASI HASIL PEMILU 1982

NAMA ORGANISASI PESERTA PEMILU	SUARA	%	KURSI
Golkar	346.140	61,25	20
PPP	123.127	21,79	7
PDI	95.831	16,96	5

Sumber: Kantor DPD  
Golkar Klaten.

Pada Pemilu 1982 dengan melihat hasil akhir yang nampak bahwa Golkar di Kabupaten Klaten memperoleh kemenangan secara mayoritas dan mendapat tambahan kursi di DPRD. Sementara PPP mendapat tambahan satu kursi dari enam kursi menjadi tujuh kursi, PDI kehilangan enam kursi dari sebelas

kursi menjadi lima kursi. Sedangkan Golkar mendapat tambahan lima kursi, dari lima belas kursi menjadi dua puluh kursi. Tahap selanjutnya sebagai rangkaian kegiatan pemilu ialah pengambilan sumpah atau pelantikan anggota DPRD Kabupaten Klaten.

#### D. Evaluasi Pemilu 1982

Penampilan masing-masing OPP dalam kampanye Pemilu 1982 menunjukkan bagaimana tingkat kesiapan mereka dalam menghadapi pemilu. Secara umum Golkar dapat dikatakan paling siap melaksanakan pemilu baik dalam adu program, strategi maupun pengorganisasian. Kedua OPP yang lain (PDI, PPP) kurang begitu siap dalam menghadapi pemilu karena adanya kemelut intern yang melanda organisasinya, sehingga jelas mempengaruhi kiprah mereka dalam kampanye pemilu.

Golkar di Kabupaten Klaten berusaha dengan gigih memperjuangkan kemenangannya pada Pemilu 1982. Hal itu lebih disebabkan adanya pengalaman bagi Golkar yang mengalami penurunan jumlah suara dan perolehan kursi pada Pemilu 1977. Dilatarbelakangi adanya pengalaman yang pernah terjadi pada Pemilu 1977 maka Golkar dengan sekuat tenaga untuk mengembalikan keberhasilannya seperti yang pernah diraih pada Pemilu 1971. Persiapan Golkar dalam menjelang Pemilu 1982 itu lebih meningkatkan konsolidasinya untuk memantapkan semua jajaran kader baik kader teritorial maupun kader fungsional. Dengan demikian Golkar benar-benar lebih dipersiapkan untuk terjun dalam kancah pemilu dan diharapkan dapat membawa ke-



berhasilannya kembali.

Kampanye Pemilu 1982 PPP, Golkar dan PDI sebagai organisasi pemilu masih diperbolehkan mengemukakan tema-tema kampanye yang mencerminkan asas ciri mereka, disamping juga harus mengemukakan program-programnya. Golkar di Kabupaten Klaten juga menampilkan tema-tema pembangunan seperti " Suksesnya Pemilu 1982 Akan Mendorong Semangat Penghayatan Pengamalan Dan Pengamanan Pancasila di Tengah Masyarakat". Disamping itu masih terlihat juga Golkar sangat getol dalam menggunakan dan memanfaatkan tidak saja tokoh dan pemimpin agama tetapi juga bahasa-bahasa agama. Hal tersebut diterapkan oleh Golkar karena secara tidak langsung telah dipengaruhi oleh salah satu kontestan seperti PPP yang cenderung untuk mempertahankan ikatan-ikatan lama (tradisional-agama) untuk mempertegas identitasnya. PPP cenderung ingin mempertahankan diri dengan memanipulasi bahasa-bahasa agama dalam kampanye. Tema kampanye PPP sebagian besar menekankan dikaitkan dengan segi dan aspek kehidupan agama, telah berpengaruh besar pada pola gerak kampanye Golkar. Dengan demikian dapat menimbulkan kesan bahwa citra Golkar sebagai kekuatan pembaharu dan pembangunan seringkali dapat terendapkan dibawah permukaan.

Golkar juga menampilkan banyak tokoh dan pemimpin formal (fungsionaris) dalam setiap kesempatan kampanye, seperti Hamengku Buwana IX, Bapak Harmoko dan tokoh-tokoh Golkar yang lain. Hal itu dimaksudkan agar dapat membawa keuntungan terutama dalam menggaet pendukung di daerah-daerah pedesaan atau pedalaman, sebab karakteristik dari kecenderungan pola



dan sikap memilih lingkungan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh pola dan sikap memilih pemimpin dan tokoh formal seperti kepala desa dan pejabat pemerintah. Tampilnya para fungsionaris Golkar serta tokoh dan pemimpin agama yang nampak dominan dalam setiap kampanye Golkar baik langsung maupun tidak langsung, sebenarnya telah memperkecil kesempatan dan peluang bagi kader-kader generasi muda Golkar untuk tampil dan melatih diri dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sebaliknya tokoh-tokoh muda yang penuh potensi kepemimpinan itu menimbulkan kesan hanya sebagai ornamen dan pengaman kampanye Golkar.

Kampanye Golkar di Kabupaten Klaten dapat berjalan dengan lancar walaupun juga masih diwarnai adanya pelanggaran-pelanggaran yang intensitasnya kecil. Peserta kampanye Golkar yang mengikuti kampanye masih terlihat bahwa sebagian besar peserta kampanye berasal dari lingkungan massa keluarga besar Golkar. Kampanye Golkar menimbulkan kesan bahwa belum melibatkan kalangan masyarakat bawah seperti petani, buruh dan sebagainya untuk turut berpartisipasi dalam kampanye pemilu.

Suasana pemilu juga ditentukan oleh peranan dan sikap ABRI. ABRI sebagai pihak pengaman penyelenggaraan pemilu telah memberikan dukungan dan sumbangan yang berarti bagi terciptanya suasana keterbukaan dan kebebasan dalam kampanye Pemilu 1982. Sikap yang ditampilkan ABRI sebenarnya ingin memainkan peranan dinamisator dan stabilisator secara baik dan konsekwen dalam mengembangkan kehidupan politik.

Konsolidasi organisasi dan kaderisasi lebih intensif dibanding PPP dan PDI. Demikian pula, pembinaan dan penggalangan massanya juga tidak sehebat Golkar, sehingga hasilnya pun Golkar tidak terkalahkan. Pada Pemilu 1982 Golkar mengalami kenaikan perolehan suara, begitu juga PPP mengalami peningkatan. Sedangkan PDI mengalami penurunan secara drastis. Hasil Pemilu 1982 di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kabupaten Klaten telah mulai menanamkan kepercayaannya kepada wakil-wakilnya terutama kepada Golkar, yang kedua kepada PPP dan yang terakhir kepada PDI. Perkembangan yang dialami Golkar Kabupaten Klaten selalu meraih kemenangan. Pada Pemilu 1971 Golkar menang dengan prosentase perolehan suara 52,30 %, pada Pemilu 1977 perolehan suara nominal naik, namun persentasenya menurun menjadi 47,30 % dan pada Pemilu 1982 Golkar mampu meningkatkan kembali prosentase perolehan suara menjadi 61,25 %.

Berdasarkan peta politik pada Pemilu 1982, Golkar telah berhasil menguasai seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Keberhasilan Golkar pada Pemilu 1982 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menunjang. Faktor-faktor tersebut antara lain Golkar berhasil menarik simpati kepada warga masyarakat Klaten atas hasil pembangunan yang telah diraih Golkar; Golkar berhasil membuat kekompakan di antara pengurus dan anggota Golkar dengan warga masyarakat; berhasilnya faktor dalam menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat yang dikembangkan Golkar. Hasil Pemilu 1982 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN : VI.

## DAFTAR HASIL PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD II TAHUN 1982 KABUPATEN DEKATRA TINGKAT II KLATEN

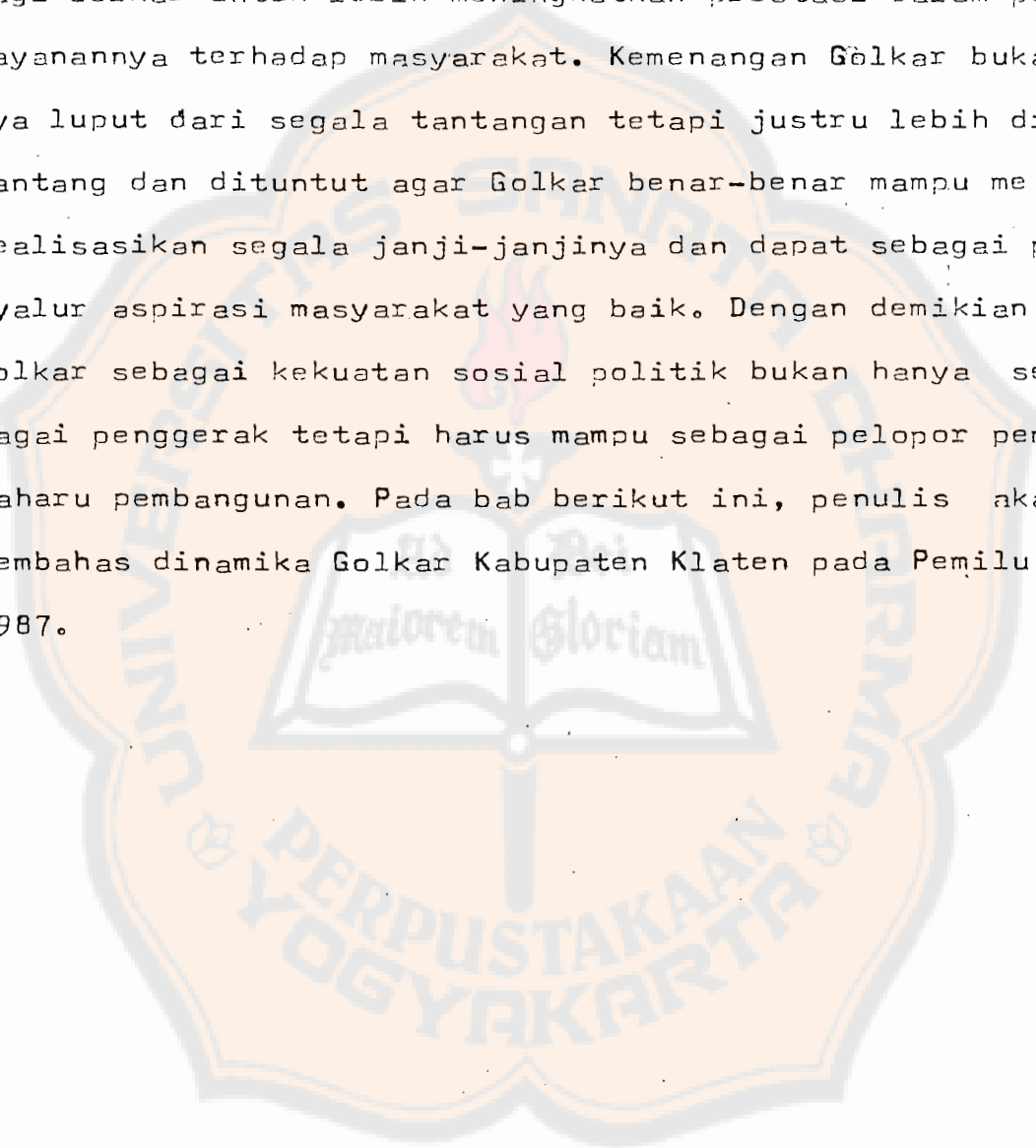
No.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR	:			PROSENTASE HASIL			PROSENTASE TARGET GOLKAR	
			PPP	GOLKAR	PDI	PPP	GOLKAR	PDI	DSD. I	DSD. II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KOTA KLATEN	37.430	7.373	18.353	7.102	22,46	55,91	21,63	60	55,30
2.	KERANDAN	37.059	13.236	13.667	6.586	39,52	40,81	19,57	50	36,50
3.	W E D I	27.860	5.340	14.878	5.058	21,15	58,90	19,95	55	50
4.	KEBOMARUH	29.662	5.702	16.778	4.407	21,20	62,40	16,40	55	60
5.	JOGONALAN	27.956	4.093	16.353	5.304	15,59	64,20	20,21	50	50
6.	GANTIWARNO	21.082	2.973	12.348	3.804	15,55	64,56	19,39	55	50
7.	PRAMBANAN	21.478	2.436	16.637	3.428	12,49	69,89	17,62	65	61
8.	MANISRENGGO	20.024	2.787	11.237	4.073	15,40	62,09	22,51	55	53
9.	KEMALANG	17.313	691	13.508	2.029	4,30	83,06	12,64	65	65
10.	KARANGMONGKO	19.127	3.028	11.877	2.467	17,70	68,15	14,15	60	60
11.	JATINOM	27.709	5.127	17.183	3.034	20,23	67,80	11,97	50	62
12.	KARANGANOM	24.967	7.478	12.478	2.418	33,42	55,77	10,81	50	60
13.	T U L U W G	26.565	5.946	15.043	3.002	24,76	62,65	12,59	60	60
14.	POLANHARJO	23.106	4.868	13.309	3.086	22,90	62,59	14,51	55	60
15.	DELANGGU	22.619	4.027	14.432	2.733	10,01	68,09	12,90	65	65
16.	WONOSARI	28.322	6.008	14.284	5.431	23,36	55,53	21,11	65	53
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
										17. JUWIRING .....

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 2 -

1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :
17.: JUMIRING	: 29.087	: 8.713	: 15.322	: 2.918	: 32,32	: 56,86	: 10,82	: 55	: 60	
18.: CEPER	: 28.916	: 8.053	: 13.527	: 5.183	: 30,09	: 50,54	: 19,37	: 50	: 57	
19.: PEDAH	: 23.140	: 4.322	: 12.020	: 4.813	: 20,43	: 56,80	: 22,77	: 50	: 43	
20.: KARANGDOWO	: 25.596	: 2.834	: 18.598	: 2.447	: 11,87	: 77,88	: 10,25	: 60	: 55	
21.: CAWAS	: 34.348	: 4.623	: 22.533	: 4.287	: 14,59	: 71,76	: 13,65	: 50	: 55	
22.: TRUCUK	: 36.728	: 6.708	: 20.110	: 6.524	: 20,12	: 60,31	: 19,57	: 50	: 52	
23.: BAYAT	: 29.936	: 6.743	: 14.346	: 5.687	: 25,18	: 53,58	: 21,24	: 50	: 45	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
: JUMLAH	: 619.024	: 123.127	: 346.140	: 95.831	: 21,91	: 61,43	: 16,66	: 55,15	: 55,15	

Kemenangan yang pernah diperoleh Golkar pada Pemilu 1971, 1977 dan 1982 telah memberikan harapan dalam kehidupan organisasi Golkar untuk berkembang. Keberhasilan yang selalu diraihnya telah memberikan suatu motivasi bagi Golkar untuk lebih meningkatkan prestasi dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Kemenangan Golkar bukanlah luput dari segala tantangan tetapi justru lebih ditantang dan dituntut agar Golkar benar-benar mampu merealisasikan segala janji-janjinya dan dapat sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang baik. Dengan demikian Golkar sebagai kekuatan sosial politik bukan hanya sebagai penggerak tetapi harus mampu sebagai pelopor pembaharu pembangunan. Pada bab berikut ini, penulis akan membahas dinamika Golkar Kabupaten Klaten pada Pemilu 1987.



BAB VI  
DINAMIKA GOLKAR PADA PEMILU 1987

Selama 21 tahun Orde Baru, Indonesia telah mengalami empat kali pemilu yang sering disebut sebagai "Pesta Demokrasi".<sup>64</sup> Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987 merupakan pengalaman kelima dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu 1987 mempunyai makna penting karena untuk pertama kalinya suatu pemilu berlangsung pada masa era Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas oleh ketiga organisasi peserta pemilu yang mengandung arti bahwa asas yang merupakan kekhususan OPP dan kemudian dijadikan ideologi khas partai tidak mempunyai tempat lagi dalam bentuknya yang eksplisit.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain untuk menjadi landasan tumbuhnya budaya politik sesuai dengan dasar dan ideologi negara, disamping untuk mengakhiri fase konflik ideologis dan tercapainya integrasi bangsa secara lebih dalam dan nyata.

-----  
<sup>64</sup> "Pesta Demokrasi" adalah suatu implementasi dari sistem demokrasi perwakilan, yang dijamin UUD 1945 dan UU No. 1 tahun 1985 (pemilu beserta pelaksanaannya) untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan MPR yang seterusnya memilih Presiden dan wakil Presiden, Laporan Khusus Gema Keadilan, No. 4, Thn. 1987.



Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas bagi parpol dan Golkar maka untuk masa-masa mendatang akan dapat lebih memusatkan orientasinya pada program dan dapat semakin menunjukkan dirinya sebagai partai terbuka.<sup>65</sup>

Pemilu 1987 berjalan dengan suasana baru, ketiga OPP tampaknya benar-benar menekankan program-program pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Golkar menampilkan tema utama "Makin Memantapkan Pelaksanaan Demokrasi, Konstitusi dan Hukum". PDI mengeluarkan tema pokok "Peningkatan Kehidupan Demokrasi Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya". PPP memusatkan tema pada pendidikan dan pemerataan. Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tampaknya juga mempengaruhi tema-tema kampanye yang dilontarkan oleh para BPP. Kekuatan sosial politik yang ada sekarang ini (PPP Golkar, PDI) harus benar-benar menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.<sup>66</sup> Penegasan ini penting karena salah satu fungsi partai politik dan Golkar adalah membina anggota-anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila, setia kepada UUD 1945 dan sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat.

-----

<sup>65</sup> UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar; Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yang menyatakan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, Partai Politik dan Golkar harus benar-benar menjadi kekuatan politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

<sup>66</sup>

Ibid.,

Golkar dalam menghadapi Pemilu 1987 juga tampak lebih siap dibanding PPP dan PDI sebab untuk mendapatkan pemilih yang semakin meningkat. Hal itu dapat dilihat dari langkah-langkah Golkar dalam melaksanakan konsolidasi organisasi baik pengurus maupun kader-kadernya, mengadakan penataan kelembagaan dan mengadakan penggalangan-penggalangan. Persiapan-persiapan yang telah dilakukan tersebut ternyata merupakan kunci strategis bagi keberhasilan Golkar di Kabupaten Klaten dalam memperoleh kemenangan.<sup>67</sup> Disamping itu juga didukung keadaan masyarakat yang stabil sehingga memudahkan Golkar untuk mengadakan pendekatan terhadap masyarakat.

Keberhasilan Golkar Kabupaten Klaten akan lebih jelas lagi apabila juga mengetahui akan pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara beserta mencapai hasil akhirnya.

#### A. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye merupakan kesempatan bagi para kontestan untuk mengadakan komunikasi langsung dan terbuka dengan para pendukung dan simpatisannya sedemikian rupa sehingga rakyat luas dapat tertarik untuk ikut mendukung mereka. Kampanye harus memberikan suasana "kebebasan" agar OPP dapat menawarkan program-programnya secara terbuka dan jelas kepada rakyat; sementara rakyat bebas, tanpa paksaan dan se-

-----  
<sup>67</sup> Keputusan-Keputusan Musda III Golkar Dati II Klaten, Tahun 1988.

macamnya untuk menilai program-program yang ditawarkan ketiga kontestan. Pemilu 1987 telah bercirikan "Program oriented" yang bersangkutan paut dengan gagasan-gagasan, maka rakyatpun juga dituntut untuk menggunakan sarana berpikirnya agar dapat memberikan penilaian yang sewajarnya atas program yang ditawarkan. Dengan demikian kampanye pemilu ini dapat dilihat sebagai mekanisme pendidikan politik dan untuk "job training" bagi para pemimpin bangsa di masa depan. <sup>68</sup>

Persiapan kampanye Golkar Kabupaten Klaten sebelum pelaksanaan kampanye lapangan telah dilakukan pertemuan-pertemuan untuk menentukan tempat, waktu dan pengarahan massa. Disamping itu persiapan juga untuk pemasangan alat-alat peraga pada tempat-tempat yang strategis, baik yang diusahakan oleh DPD Golkar, Komcat (Komisaris Kecamatan) maupun kader-kader Golkar seperti aparat desa dan teritorial desa. Alat-alat peraga yang dipersiapkan seperti umbul-umbul, bendera Golkar, tanda gambar Golkar, plakat gambar Golkar dan sebagainya. <sup>69</sup>

Masa kampanye di Kabupaten Klaten dimulai pada tanggal 1 April 1987 dan berakhir pada tanggal 17 April 1987. Pelaksanaan kampanye dilakukan berdasarkan kesepakatan ketiga kontestan tingkat I Jawa Tengah yang telah menetapkan pembagian waktu dan rayonisasi bagi OPP Tingkat I se Jawa Tengah untuk selama 25 Hari. Khusus untuk Daerah Tingkat II

<sup>68</sup> Sudiharto Djiwandono, "Pemilihan Umum Dan Pendidikan Politik", Analisa, No. 3 Thn. XII, 1983.

<sup>69</sup> "Persiapan Kampanye", dalam Keputusan Musda III Golkar, Dati II Klaten, 1988.

Kabupaten Klaten, kesepakatan OPP Tingkat I Jawa Tengah tersebut telah dimantapkan lagi dalam rapat antara PPD II dengan pimpinan OPP. Kampanye di Kabupaten Klaten dilaksanakan antara lain PPP menggunakan waktu 8 hari, PDI menggunakan waktu 8 hari, dan Golkar menggunakan waktu 9 hari.<sup>70</sup> Dalam hal ini Golkar mendapat tambahan satu hari dalam pelaksanaan kampanye dibanding kontestan lain sebab hari pertama jatuh untuk kampanye Golkar dan hari terakhir juga jatuh untuk giliran kampanye Golkar.

Golkar mendapat kesempatan sembilan kali dalam pelaksanaan kampanye. Selama masa kampanye dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk, seperti kampanye terbuka atau mimbar, pawai kendaraan bermotor, pawai bersepeda, bhakti sosial, pertunjukan hiburan rakyat, sarasehan-sarasehan sampai tingkat TPS.<sup>71</sup>

Daerah yang dijadikan basis kampanye pada dasarnya sama dengan pemilu sebelumnya. Pada umumnya daerah yang dipilih yang mempunyai syarat antara lain daerah yang padat penduduknya, letaknya strategis, mudah dijangkau dengan kendaraan, mudah untuk menempatkan massa. Satu wilayah Pembantu Bupati (Kawedanan) biasanya diambil dan dipilih satu lokasi untuk pelaksanaan kampanye terbuka. Daerah tersebut seperti :<sup>72</sup>

-----  
<sup>70</sup> "Pelaksanaan Kampanye", dalam Keputusan-Keputusan Musda III Golkar, Dati II Klaten, 1988.

<sup>71</sup> Ibid.,

<sup>72</sup> Keterangan tertulis dari Bapak Soeparwan pada tanggal 19 November 1990 di Klaten.



- a. Wilayah Pembantu Bupati untuk Delanggu, diambilkan lokasi di Lapangan Juwiring atau Delanggu atau Ceper.
- b. Wilayah Pembantu Bupati untuk Jatinom, diambilkan lokasi di Lapangan Bonyokan Jatinom atau Karangnom atau Polanharjo.
- c. Wilayah Pembantu Bupati untuk Pedan, diambilkan lokasi di Lapangan Seboyan Pedan atau Cawas atau Karangdowo.
- d. Wilayah Pembantu Bupati untuk Gondangwinangun, diambil lokasi di Lapangan Ngendo Jogonalan atau Gantiwarno atau Prambanan.
- e. ~~Wilayah Pembantu Bupati~~ untuk Kota Administratif Klaten diambilkan lokasi di Lapangan Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan atau Desa Glodogan.
- f. Wilayah Pembantu Bupati untuk Kota Klaten, diambilkan lokasi di Lapangan Mayungan Ngawen atau Wedi atau Kebon-arum.

Kampanye Pemilu 1987 OPP harus memanfaatkan massa kampanye untuk menampilkan tema-tema kampanye yang mencerminkan program-program pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.<sup>73</sup> Tema-tema kampanye tidak dapat lain kecuali merupakan penjabaran dan rincian dari asas Pancasila itu sendiri. Ketentuan kampanye Pemilu 1987 telah menyebutkan bahwa kampanye pemilu harus disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggalakan pembangunan nasional serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ketentuan ini secara tersirat menekankan

<sup>73</sup> Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilu, pasal 6.

kan arti penting dari aspek kualitatif kampanye pemilu bagi pendidikan politik rakyat. Realisasi kampanye Golkar Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3 : Pelaksanaan Kampanye Golkar di Monumen Juang 45 Klaten.

Sebelum Golkar mengadakan pelaksanaan kampanye, seperti pada pemilu sebelumnya, Golkar harus memberitahukan secara tertulis kepada Komandan Sektor Kepolisian setempat selambat lambatnya tujuh hari sebelum kegiatan diadakan. Dalam kegiatan kampanye tidak boleh menyelewengkan eksistensi, memutarbalikkan arti dan isi, merongrong Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu dilarang memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan pemerintah dan pejabatnya, agama kepercayaan, golongan, organisasi, negara asing atau perbuatan lain yang bertentangan dengan etika atau tata krama

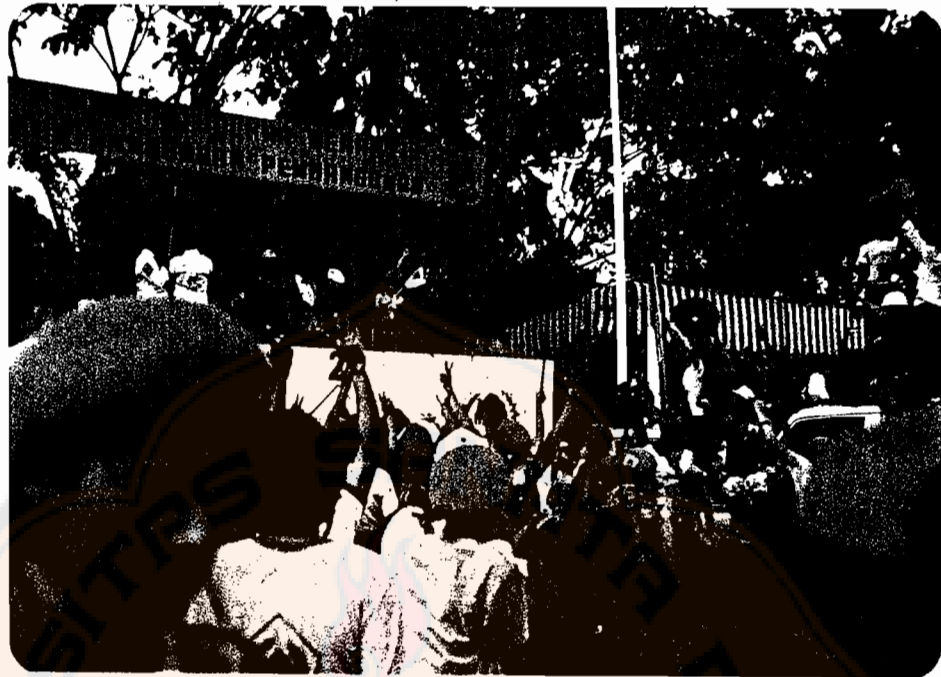


menurut Pancasila.

Peserta kampanye Golkar masih memperlihatkan bahwa sebagian besar berasal dari lingkungan massa keluarga besar Golkar yang terdiri dari tiga jalur antara lain jalur A (Keluarga Besar ABRI), jalur B ( Keluarga Besar Beringin dan KORPRI) dan jalur G (Keluarga Besar Golkar murni yang terdiri dari masyarakat dan wiraswasta). Disamping itu juga didukung oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ber-naung atau onderbouwnya Golkar seperti Dharma wanita, AMPI, Pemuda Pancasila dan sebagainya, yang turut juga memeriahkan kampanye Golkar. Usaha Golkar dalam menarik simpati terhadap masyarakat dalam kampanye, dengan cara menampilkan tokoh-tokoh seperti Bapak Amir Moertoao, Ibu Soepardjo Rustam , Bapak Agus Sudana dan tokoh Golkar yang lain. Pelaksanaan kampanye Golkar Kabupaten Klaten, dapat juga dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4 : Pelaksanaan Kampanye Golkar di Monumen Juang 45 Klaten.



Gambar 5 : Pelaksanaan Kampanye Golkar di Lapangan Merdeka Karangnom Klaten.



Gambar 6 : Pelaksanaan Kampanye Golkar di Monumen Juang 45 Klaten.

Segala bentuk kegiatan kampanye sebenarnya sudah diatur secara baik, terutama dimaksudkan untuk menghindari bentrokan fisik antar kontestan yang melakukan kampanye. Dalam masa kampanye, bentrokan fisik telah mulai menurun dibanding pemilu sebelumnya, tetapi masih terlihat juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain seperti penyobekan tanda gambar, merusak alat-alat peraga kampanye, merusak kendaraan umum, membuat kegaduhan dari dalam massa yang berkumpul, penyebaran paku, jarum atau benda tajam di sepanjang jalan yang akan dilalui kampanye, peserta kampanye masuk warung-warung dan mengambil makanan tanpa mau membayar, melakukan ejekan-ejekan terhadap OPP lain untuk memancing kemarahan dan sebagainya.<sup>74</sup>

#### B. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Setelah 25 hari kampanye, semua kontestan dapat menyelesaikan kampanye putaran terakhir tanggal 17 April 1987. Tanggal 18 April sampai dengan 22 April 1987 adalah minggu tenang. Masa tenang adalah masa atau waktu tidak diadakan kegiatan yang dilakukan oleh OPP selaku kontestan pemilu dan juga tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh rakyat.

-----  
<sup>74</sup> Keterangan tertulis dari Bapak Soeparwan pada tanggal 19 November 1990; Bapak EH. Sutanto pada tanggal 12 Desember 1990 di Klaten.

Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987 dimulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 14.00 WIB. Penduduk Kabupaten Klaten yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sejumlah 680.592 dari jumlah penduduk 1.161.225.<sup>75</sup> Jumlah TPS seluruh 26 kecamatan di Kabupaten Klaten ada 2130 dan lokasi TPS berada di masing-masing desa atau kelurahan rata-rata ada 4 atau 5 TPS menurut jumlah pemilih yang akan melakukan hak pilihnya. Setiap TPS beranggotakan 9 atau 10 orang yang masih dibantu dengan tenaga-tenaga pengamanan dari unsur Hansip, Polri atau ABRI.

Pelaksanaan pemungutan suara sebelum dimulai, Bupati atau Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau Ketua PPD II membentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk setiap TPS. Setiap TPS dibantu petugas Hansip yang jumlahnya rata-rata 4 sampai 5 orang yang bertugas menertibkan masuk dan keluarnya pemilih dari ruang TPS, menjaga pintu bilik coblosan, membantu pemilih yang jompo, lumpuh, buta atau cacad-cacad yang lain, mengingatkan penduduk atau pemilih yang belum sempat masuk ke TPS, agar segera datang ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya.

Penghitungan suara dilaksanakan segera setelah seluruh pemilih selesai melaksanakan hak pilihnya. Semua aparat TPS mempersiapkan diri sesuai dengan pembagian tugasnya

-----  
<sup>75</sup> "Hasil Pemungutan Suara Pemilu 1987", dalam Keputusan-Keputusan Musda III Golkar, Dati II Klaten; "Klaten Dalam Angka 1987", dalam Data Statistik Kabupaten Klaten, 1987, hlm. 13



masing-masing antara lain Ketua TPS meneliti lembar-per-lembar kartu suara yang telah dikeluarkan dari kotak-kotak suara; Para saksi menyatakan sah dan tidaknya kartu suara yang sudah dicoblos oleh pemilih; Petugas Pencatat, melakukan pencatatan tersebut di papan tulis yang telah disiapkan. Hasil pencatatan kemudian dibuatkan berita acara yang ditanda tangani ketua TPS atau KPPS, anggota KPPS dan saksi-saksi dari masing-masing OPP, setelah selesai seluruhnya, berita acara dan semua surat-surat suara dikirim kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara). Masyarakat atau pemilih diperbolehkan menghadiri pada saat penghitungan suara dengan tidak mengganggu petugas KPPS. Pada prinsipnya penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka, karena dalam penghitungan suara dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, saksi-saksi dari OPP dan masyarakat pemilih yang menghadiri.

Tahap berikutnya diadakan penghitungan kartu suara yang telah berada dalam tiga kotak berwarna biru untuk DPRD II, putih untuk DPRD I, kuning untuk DPR RI, yang dicocokkan pada tanda gambar yang dicoblos dan disaksikan oleh tiga orang saksi dari organisasi peserta pemilu.

### C. Penetapan Hasil Akhir

Pada dasarnya penetapan hasil akhir seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai maka ketua mengumumkan jumlah surat undangan yang beredar, jumlah kartu suara yang diterima, jumlah



kartu suara yang digunakan. Langkah berikutnya diadakan penghitungan kartu suara yang ada dalam tiga kotak untuk DPRD II, kotak untuk DPRD I, kotak untuk DPR RI, dengan disaksikan tiga orang saksi perwakilan dari tiga kontestan.

Kartu suara pemilih sejumlah 680.592 orang dari seluruh 26 kecamatan di Kabupaten Klaten. Kartu suara yang diperoleh PPP sejumlah 109.512 orang, PDI memperoleh sejumlah 108.069 orang dan Golkar memperoleh kartu suara sebesar 392.287 orang. Hasil peserta pemilu 1987 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL : 4  
REKAPITULASI HASIL PEMILU 1987

NAMA ORGANISASI	PESERTA PEMILU	SUARA	%	KURSI
Golkar		392.287	64,32	23
PPP		109.512	17,96	7
PDI		108.069	17,72	6

Sumber : Kantor DPD  
Golkar Klaten.

Sesudah diadakan penghitungan suara pada akhirnya semua kontestan menyetujui hasil penghitungan suara yang diraih. Hasil perolehan suara tersebut menentukan perolehan kursi di DPRD sebagai berikut : PPP mendapat suara sejumlah 109.512 dan mendapat perolehan tujuh kursi, PDI mendapat suara sejumlah 108.069 dan mendapat perolehan enam kursi, sedangkan Golkar perolehan suara sejumlah 392.287 dan mendapat perolehan dua puluh tiga kursi dengan kelebihan suara 2644.

Pemilu 1987 apabila dilihat dari hasil akhir yang nampak, ternyata Golkar yang tetap memperoleh keunggulan dan mendapat tambahan 3 kursi dari Pemilu 1982. Sementara PPP mendapat kursi tetap dan tidak menambah kursi, sama seperti Pemilu 1982. PDI mendapat tambahan satu kursi berarti suara yang diperuntukkan PDI lebih meningkat daripada suara yang diberikan kepada PPP.

Penetapan hasil akhir pemilu dilakukan melalui rapat PPD II yang dihadiri oleh wakil-wakil dari OPP, Panwaslak, para undangan dan tokoh-tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil akhir itu ditetapkan jumlah wakil-wakil yang diperoleh setiap OPP dari masing-masing daerah pemilihan. Nama-nama calon OPP yang dipilih diambilkan dari daftar calon menurut urutan nomer, dimulai dari nomor satu. Seseorang calon dinyatakan terpilih apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia maka tempatnya diisi oleh calon menurut urutan nomer berikutnya. Tahap selanjutnya sebagai rangkaian kegiatan pemilu diadakan pelantikan anggota DPRD II Kabupaten Klaten.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 1987  
KABUPATEN DATI II KLATEN

Lampiran : IV a

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PE MILIH SE- MUA.	JUMLAH T P S	SUARA TIDAK STAH	P P P			GOLONGAN KARYA			P D I			KETERA- NGAN.
					DPRD II	DPR- RI	DPRD -I	DPRD II	DPR- RI	DPRD I	DPRD II	DPR- RI	DPRD I	
1.	KOTA KLATEN	42.278	144	2.295	6.837	6.889	6.838	22.992	23.061	22.641	7.338	7.341	7.330	
2.	KETANDAN	42.467	113	2.163	12.635	12.773	12.641	18.014	18.086	17.879	7.207	7.247	7.251	
3.	KECOHARUM	31.684	99	1.619	5.175	5.137	5.141	18.340	18.935	18.646	5.270	5.294	5.254	
4.	Y E D I	30.351	99	1.501	4.175	5.024	4.927	17.654	17.783	17.660	4.776	4.735	4.669	
5.	JOCCHALAN	31.096	105	1.511	3.862	3.873	3.844	18.729	18.685	19.606	6.286	6.302	6.264	
6.	PRAMBANAN	23.829	74	1.153	1.822	1.874	1.837	18.578	18.567	18.426	3.248	3.304	3.275	
7.	KARANGGICHO	20.850	76	1.144	1.775	1.803	1.776	13.459	13.583	13.450	3.440	3.452	3.435	
8.	GAMPINARNO	22.585	84	911	2.566	2.566	2.536	15.291	15.331	15.133	3.111	3.132	3.142	
9.	MANISRENGGO	21.871	58	1.394	2.032	2.027	1.975	13.377	13.481	13.373	3.756	3.775	3.744	
10.	KEMALANG	17.665	66	925	578	549	579	13.668	13.802	13.636	2.471	2.466	2.419	
11.	DELANGGU	24.892	94	1.042	3.463	3.505	3.463	16.077	16.054	15.888	3.414	3.434	3.427	
12.	C E P E R	32.113	89	1.547	7.572	7.673	7.557	15.388	15.463	15.256	6.119	6.089	6.115	
13.	JUWIRING	31.447	83	1.616	7.268	7.332	7.232	17.420	17.486	17.270	3.540	3.543	3.525	
14.	KHOSARU	31.589	95	1.556	5.637	5.662	5.540	15.987	16.106	15.937	6.900	6.935	6.889	
15.	JATENOM	30.661	89	1.705	4.804	4.836	4.752	19.237	19.380	19.163	3.593	3.599	3.624	
16.	POLANHARJO	24.907	101	962	4.438	4.472	4.402	15.342	15.381	15.305	3.066	3.068	3.061	
17.	T U L U N G	28.864	96	1.559	5.412	5.610	5.506	16.141	16.155	16.024	1.645	3.617	3.610	
18.	KARANGOM	27.527	96	1.189	6.602	6.639	6.562	14.489	14.520	14.436	3.303	3.413	3.397	
19.	P E D A H	25.055	75	1.412	3.700	3.717	3.681	11.934	11.972	11.860	6.787	6.829	6.781	
20.	B A T A T	32.340	91	1.820	6.571	6.619	6.560	16.368	16.458	16.254	5.677	5.660	5.652	
21.	C A W A S	37.033	114	1.550	3.591	3.639	3.606	25.438	25.519	25.255	3.911	3.927	3.924	
22.	T R U C U X	40.621	125	2.084	6.592	6.654	6.599	21.395	21.403	21.218	8.249	8.253	8.236	
23.	KARANGDOWO	28.706	104	1.215	1.994	1.990	1.958	21.015	21.113	20.967	3.147	3.135	3.045	
<b>J U M L A H</b>		<b>679.531</b>	<b>2.130</b>	<b>33.673</b>	<b>110.006</b>	<b>110.863</b>	<b>109.512</b>	<b>394.820</b>	<b>396.326</b>	<b>392.287</b>	<b>108.354</b>	<b>108.550</b>	<b>108.069</b>	

KLATEN, 23 SEPTEMBER 1987  
 DEWAN PEMILIHAN DAERAH GOLONGAN KARYA  
 DAERAH TINGGAT II KLATEN  
 K a t y a      Sekretaris,  
 DATI - II  
 KAB. KLATEN  
 RANTIMAN SUYONO      BANGANG PRITAMBONO, SH  
 NPIG:12230000002      NPIG:12230000006

D. Evaluasi Pemilu 1987

Golkar dalam menghadapi Pemilu 1987 tampak selalu siap dibanding PPP dan PDI, oleh karena itu Golkar dalam mencari perolehan suara tetap memperoleh keunggulan mutlak di seluruh 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Hasil Pemilu 1987 dan suasananya tampak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu sikap ABRI yang bertindak adil serta korek dalam pemilu yang lalu.

Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas tampak mempengaruhi suasana Pemilu 1987 yang jauh lebih tenang dibanding pemilu-pemilu sebelumnya dan keberingasan-keberingasan sosial tampak menurun. Hal itu disebabkan intensitas kejahatan mulai menurun, situasi menjelang Pemilu 1987 tampak mantap dan stabil, meningkatnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Disamping itu, Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas juga mempengaruhi tema-tema kampanye yang pada pemilu sebelumnya tampak begitu menonjol tema keagamaan ataupun isu keagamaan tetapi pada Pemilu 1987 telah mulai berkurang.

Faktor lain yang mempengaruhi suasana pemilu adalah sikap ABRI yang tegas dan korek dalam melaksanakan tugasnya. ABRI lebih bersikap netral sehingga martabat ABRI telah dipandang baik di mata masyarakat. Sikap ini menunjukkan bahwa ABRI secara sungguh-sungguh dapat menyesuaikan peran sosial politiknya dengan perkembangan jaman, dimana dibutuhkan, me-

reka harus berada di atas semua golongan dan apabila mereka harus bersikap "tut wuri handayani" merekapun harus mampu melakukannya. Kiranya ABRI tidak hanya sebagai stabilisator dan katalisator tetapi harus berkembang menjadi kekuatan demokratisasi untuk masa-masa yang akan datang. Peran tersebut akan mempengaruhi juga perkembangan dan pembangunan politik yang sehat dan kuat.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Klaten secara kuantitatif dalam pemilu pada umumnya tinggi. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Klaten memandang kegiatan memberikan suara itu sebagai kewajiban moral. Disamping itu, pola panutan cukup dominan dalam masyarakat Kabupaten Klaten yang masih tradisional paternalistik, yang turut menganjurkan agar para pemilih menggunakan hak-hak mereka sehingga berpengaruh juga atas sikap politik rakyat.

Hasil perhitungan suara pada Pemilu 1987 menunjukkan bahwa Golkar tetap memenangkan pemilu sebagaimana halnya pemilu tahun 1971, 1977 dan tahun 1982. Pada Pemilu 1987 Golkar memperoleh suara 64,32 %, PPP memperoleh suara 17,98 %, sedangkan PDI memperoleh suara 17,72. Pola pilihan masyarakat Kabupaten Klaten telah mengalami sedikit perubahan dalam perolehan suara. PPP mengalami kemunduran sedangkan Golkar dan PDI mengalami peningkatan. Penurunan riil yang diderita PPP terserap kedalam suara Golkar dan PDI, meskipun jumlah kenaikan riil yang diperoleh Golkar lebih besar dari kenaikan riil PDI.



Golkar dalam Pemilu 1987 berhasil mengklaim bahwa dirinya adalah partai yang memerintah sekarang ini. Golkar berani mengklaim bahwa pembangunan yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru itu, merupakan hasil jerih payah Golkar. Hal itu dapat dikaitkan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sarana keagamaan seperti pembangunan mesjid, mushola dan bantuan kepada pesantren serta sekolah-sekolah dan lain-lain. Golkar berani mengklaimnya karena dipandang pada kalangan Golkar lebih Islam daripada PPP. Hal ini memungkinkan menjadi salah satu faktor Golkar dapat menyerap para pemilih yang lari dari PPP. Berkaitan dengan hal itu ternyata Golkar juga berhasil memanfaatkan jaringan organisasinya, baik formal maupun non formal secara baik. Hal itu terlihat bahwa Golkar mampu memanfaatkan pemimpin-pemimpin pemerintahan, termasuk para menteri, menjadi fungsionaris Golkar yang dijadikan salah satu ujung tombak dalam kampanye.

Sebagian besar pemilih Kabupaten Klaten adalah masyarakat pedesaan yang masih tradisional dan pola memilihnya belum banyak berubah dari pola tradisional berdasarkan bapak panutan, sehingga banyak terpengaruh oleh anjuran, permintaan ataupun pilihan para pemimpinnya terutama pemimpin formalnya. Pemanfaatan bapak panutan ini telah membawa akibat timbulnya kesan bahwa Golkar kurang mempunyai atau sekurang-kurangnya tidak dapat memunculkan generasi-generasi muda atau kader-kader mudanya dalam kampanye yang lalu. Hal ini memperkuat kesan di masyarakat bahwa Golkar

adalah partainya orang tua. Kesan semacam itu kurang menguntungkan kedudukan Golkar untuk masa-masa yang akan datang.

Pergeseran dalam perolehan suara maupun perolehan kursi di DPRD Kabupaten Klaten dapat dikatakan sebagai gejala adanya dinamika dalam masyarakat. Masyarakat dalam batas-batas tertentu telah berusaha menerobos ikatan-ikatan primordial yang selama ini dianggap sebagai suatu penghalang tercapainya perubahan-perubahan sosial yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat.

Berlangsungnya Pemilu 1987 apabila didasarkan pada tercapainya ketenangan dan ketertiban termasuk massa kampanye, serta besarnya partisipasi rakyat dalam pemilu maka telah berhasil dengan baik. Keberhasilan ini merupakan gejala semakin meningkatnya kedewasaan politik rakyat. Evaluasi yang lebih lengkap akan diuraikan dalam bab VII yang akan membahas mengenai perbandingan dinamika Golkar antara Pemilu 1982 dan Pemilu 1987 di Kabupaten Klaten.

BAB VII  
PERBANDINGAN DINAMIKA GOLKAR PADA PEMILU  
1982 DAN 1987

Dalam pemilu yang diadakan pada tahun 1982 dan 1987, dominasi Golkar di Kabupaten Klaten tampak tidak tergoayahkan. Hal itu disebabkan Golkar selalu berhasil dalam menarik massa pendukungnya, sehingga Golkar selalu unggul dalam mengantongi suara dibanding dua OPP yang lain. Perbedaan yang nampak antara pelaksanaan Pemilu 1987 dan Pemilu 1982 adalah adanya Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada Pemilu 1982, partai politik dan Golkar sebagai organisasi peserta pemilu masih mencerminkan asas ciri khas mereka. Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, ketiga kekuatan sosial politik disamping memakai asas Pancasila, juga dibenarkan untuk memakai asas ciri khas, seperti asas Islam untuk PPP; asas Demokrasi, Kebangsaan (Nasionalisme) dan Keadilan Sosial (Sosialisme Indonesia) bagi PDI; Kekayaan rohaniyah dan jasmaniah untuk kesejahteraan bangsa dan keadilan sosial dalam rangka Pancasila bagi Golkar, Pemakaian asas ciri khas ini dimaksudkan agar ketiga kekuatan sosial politik itu tidak kehilangan tanda atau jati diri atau kepribadian golongannya.

Undang-undang No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar mengharuskan setiap organisasi kekuatan sosial politik mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya dasar dalam anggaran dasar atau rumah tangga organisasi. Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berakibat dalam pelaksanaan Pemilu 1987 setiap organisasi kekuatan sosial politik harus menanggalkan asas ciri khasnya. PPP harus menanggalkan asas ciri agama, dan tanda gambar Ka'bah diubah menjadi tanda gambar Bintang, sedangkan PDI juga melakukan perubahan tanda gambar dengan hanya menyisakan gambar Banteng ditepatkan di tengah segi lima

Pada dasarnya langkah-langkah yang dilakukan Golkar di Kabupaten Klaten dalam rangka memenangkan Pemilu 1982 dan Pemilu 1987 adalah sama, hanya saja pada Pemilu 1987 lebih diintensifkan lagi penggalangannya sehingga berpengaruh terhadap hasil pemilu yang kenyataannya meningkat. Dengan demikian untuk lebih jelasnya akan dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana perbandingan Golkar Kabupaten Klaten pada Pemilu 1982 dan Pemilu 1987.

## A. Tahap Persiapan

Pemilihan Umum 1982 dan 1987 di Kabupaten Klaten apabila melihat organisasi peserta pemilu dari segi kesiapannya maka Golkarlah yang kelihatan paling siap melaksanakan pemilu apabila dibanding dengan OPP yang lain. Hal itu dapat dilihat dari faktor konsolidasi organisasi dan ka-

derisasi yang dilakukan secara intensif serta pembinaan dan penggalangan massanya begitu hebat dibanding OPP yang lain. Pada waktu menjelang dilaksanakan Pemilu 1982 dan 1987 sebelumnya Golkar telah melakukan pendekatan terhadap masyarakat seperti mengadakan penataran kepada anggota Korpri, mengadakan pengarah dan penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan penataran bagi kader-kader Golkar yang akan diterjunkan pada masyarakat, mengadakan bhakti sosial ke daerah-daerah dan sebagainya yang sifatnya untuk menarik simpati kepada masyarakat. Pendekatan yang dilakukan Golkar tersebut seperti penyuluhan masalah kesehatan, KB, pertanian. Disamping itu dengan melalui diskusi, ceramah tentang pembangunan dan juga anjingsana baik terhadap anggota maupun kader Golkar dan sebagainya.

Pemilu 1982 dan 1987 juga mengadakan penggarapan massa wanita sebab dilihat dari jumlah pemilih pada kedua pemilu tersebut ternyata lebih banyak wanitanya dibanding kaum prianya.<sup>76</sup> Dengan demikian penggarapan massa wanita lebih diintensifkan agar dapat menjaring mereka untuk mendukung Golkar.

Pemilu 1987, persiapan Golkar lebih menekankan pada pelaksanaan Tri Sukses Golkar yang meliputi : Pertama, sukses

---

<sup>76</sup> Rekapitulasi hasil Pemilu 1987 menyebutkan jumlah penduduk di Kabupaten Klaten 1.149.171, diantaranya jumlah pria 556.571 dan jumlah wanita 592.600. Sedangkan jumlah pemilih adalah pria sejumlah 344.251 (61,852 %) dan wanita sejumlah 373.081 (62,956 %). Perbandingan antara pria dan wanita adalah 1 : 1,084.



konsolidasi baik idiil, wawasan maupun organisasi seperti penataran kader teritorial dan fungsional, penataan kelembagaan dengan membentuk badan pengendalian pemilu Golkar, membentuk satuan tugas Golkar, dan membentuk badan pengelola kader Golkar. Kedua, sukses Pelita IV yang meliputi pembangunan daerah dan penggerak kader-kader Golkar terhadap pembangunan. Ketiga, sukses Pemilu 1987 dengan kegiatan pra kampanye seperti mengadakan pembinaan kepada para kader melalui sarasehan seperti Jum'at Kliwonan, Rebo Wagen, Selasa Kliwonan; Bhakti sosial seperti mengadakan pengobatan massal, kitanan massal, memberi bantuan kepada pondok pesantren, memberikan bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah; upacara tradisional seperti memberi bantuan pada tradisi ongko wiyu di Jatinom, disamping mengadakan pembinaan juga menugaskan kader di tempatkan dalam badan-badan penyelenggaraan pemilu dari tingkat PPD II sampai TPS-TPS dan kegiatan lain di bidang pembangunan daerah, mengadakan penataran juru kampanye dan saksi untuk TPS.

#### B. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye Pemilu 1982 dan Pemilu 1987 telah berlangsung dengan baik. Dibanding Pemilu 1982, Pemilu 1987 dalam menjalani masa-masa kampanye tampak secara relatif lebih tenang. Hal ini tidak berarti bahwa rakyat pasif atau acuh tak acuh terhadap politik, melainkan mereka telah menanggapi kampanye secara lebih dewasa, baik dalam sikap, wawasan maupun perilakunya.

Salah satu perubahan dasar antara Pemilu 1982 dan Pemilu 1987 itu menyangkut soal tema kampanye Pemilu. Dalam kampanye Pemilu 1982 partai politik dan Golkar sebagai organisasi peserta pemilu boleh mengemukakan tema tema kampanye yang mencerminkan asas ciri khas mereka, didalam kampanye Pemilu 1987, OPP harus memanfaatkan massa kampanye yang mencerminkan program-program pembangunan seperti Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila yang Bertumpu Pada Trilogi Pembangunan terutama Pemerataan Pembangunan Dan Hasil-Hasilnya, yang sebagai Pengamalan Pancasila.

Kampanye Pemilu 1987 berlangsung dengan menarik, ketiga OPP secara mufakat mengatur kampanye pemilu secara bergiliran, sedangkan Pemilu 1982 belum memakai sistem giliran. Golkar dalam kampanye Pemilu 1987 mendapat kesempatan 9 kali sedangkan PPP dan PDI mendapat kesempatan 8 kali. Pengaturan serupa ini pada dasarnya sangat menguntungkan banyak pihak dan memperkecil kemungkinan terjadinya bentrokan atau benturan-benturan fisik antar massa kampanye. Disamping itu selain menciptakan biaya, kampanye bergilir ini juga membantu membangkitkan suasana kompetisi yang sehat diantara masing-masing OPP dan melahirkan pula kreatifitas baru.

Peserta kampanye Golkar baik pada Pemilu 1982 dan Pemilu 1987 sebagian besar terdiri dari orang-orang yang secara ekonomis telah mapan dan biasanya mempunyai kecenderungan untuk bertindak hati-hati seperti Golkar me-

wajibkan para peserta kampanye untuk patuh pada aturan - aturan lalu lintas, mengenakan helm pengaman, membatasi kecepatan kendaraan dan sebagainya. Disamping itu kampanye Golkar juga masih tampak dominan dengan ditampilkannya para fungsionaris Golkar seperti Bapak Amir Moertono, Bapak Djati Koesomo, Bapak Humandani, Bapak Soekardjo dan para tokoh yang lain serta pemimpin agama yang dapat dipercaya oleh Golkar. Hal itu menyebabkan secara langsung maupun tidak langsung telah memperkecil kesempatan dan peluang bagi kader-kader muda. Dengan demikian entah disengaja atau tidak, generasi muda masih merasa cukup sulit dalam menyalurkan aspirasinya melalui Golkar yang telah mapan dan cenderung konservatif, tokoh-tokoh muda tampil dihadapan massa sebenarnya ini penting, sebab bukan saja pentingnya aspek "uji diri" bagi mereka tetapi lebih-lebih karena aspek terbangunnya kepercayaan masyarakat pada masa-masa mendatang sewajarnya tidak ditumpukan pada pemimpin Golkar saat ini tetapi calon-calon pemimpin Golkar yang muda-muda itu. Kampanye Golkar meskipun selalu dihadiri oleh melimpah ruahnya massa, tetapi masih terasa "ampang", sedangkan tema-tema yang dikembangkan Golkar dalam kampanye terkesan hanya sebagai reaksi saja atas isu yang dikembangkan oleh PPP dan PDI.

Sikap ABRI yang ditampilkan pada waktu Pemilu 1987 sebagai aparat keamanan tampak lebih netral apabila dibandingkan waktu Pemilu 1982. Hal itu terlihat bahwa ABRI betul-betul ingin memainkan peran dinamisator dan stabilisator secara baik dan konsekwen dalam mengembangkan

kehidupan politik. Dengan demikian citra ABRI pada umumnya dan aparat kepolisian semakin dipercaya oleh masyarakat.

Pengamatan atas kampanye Golkar dalam Pemilu 1987 masih memperlihatkan persamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu sebelumnya. Segi cara dan bentuk kampanye Golkar masih menggunakan cara-cara seperti rapat umum, pawai kendaraan dan termasuk pula mengadakan bhakti sosial kepada masyarakat. Disamping itu, kampanye Golkar masih memperlihatkan pada cara memobilisasi massa, seperti absensi peserta kampanye terutama dari pegawai negeri (KORPRI), dan peserta kampanye Golkar kebanyakan berasal dari ormas-ormasnya seperti AMPI (Angkatan Muda Pembaruan Indonesia), Dharma Wanita, serta ormas-ormasnya yang lain.

### C. Perolehan Suara Dan Hasil Pemilu

Perolehan suara masing-masing OPP dalam pemilu kali ini memang mengalami perubahan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan Pemilu 1982, terutama pada prosentase atau proporsi perolehan suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi bagi masing-masing OPP di DPRD Kabupaten Klaten.

Perolehan suara PDI di Kabupaten Klaten setelah proses kampanye mengalami kenaikan dan hampir menyamai perolehan suara PPP. Secara nominal perolehan PDI pada Pemilu 1987 sebesar 108.069 suara sedangkan perolehannya pada Pemilu 1982 sebesar 95.831 suara. Sebaliknya, PPP

mengalami penurunan perolehan suara, pada Pemilu 1982 sebesar 123.127 suara, pada Pemilu 1987 memperoleh sebesar 109.512 suara. Sementara Golkar mengalami kenaikan yang konstan dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 1982 memperoleh sebesar 346.140 suara dan pada Pemilu 1987 Golkar tetap unggul dibanding OPP yang lain yakni sebesar 392.287 suara.<sup>77</sup> Dengan demikian hasil Pemilu 1987 di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kabupaten Klaten mempercayakan wakil-wakilnya terutama kepada Golkar, yang kedua masih terhadap PPP dan yang terakhir kepada PDI.

Perubahan prosentase perolehan suara masing-masing OPP di Kabupaten Klaten sebagai berikut pada tahun 1977, PPP memperoleh prosentase perolehan suara yaitu 20,27 %, namun pada Pemilu 1982 prosentase perolehan suara tersebut meningkat sehingga mencapai 21,79 % dan pada Pemilu 1987 prosentase perolehan suaranya mengalami penurunan menjadi 17,96 %. Golkar selalu mengalami peningkatan prosentase perolehan suara. Pada Pemilu 1977 Golkar dengan prosentase perolehan suara 46,41 %, pada Pemilu 1982 Golkar mampu meningkatkan prosentase perolehan suara menjadi 61,25 % dan pada Pemilu 1987 tetap meningkat menjadi 64,32 %. Sedangkan PDI pada Pemilu 1977 prosentase perolehan suara 33,32 %, pada Pemilu 1982 prosentase perolehan suara mengalami penurunan menjadi 18,96 % dan pada Pemilu 1987 turun lagi prosentase suaranya menjadi 17,72 % meskipun perolehan suara nominalnya meningkat.

---

<sup>77</sup> Keputusan-Keputusan Musda II dan III Golkar Dati II Klaten.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA  
DAERAH TINGKAT II KLATEN

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1987.  
TANGGAL : 23 APRIL 1987  
BERDASARKAN HASIL RAPAT PERHITUNGAN SUARA DI DPD  
GOLKAR DAERAH TINGKAT II KLATEN

No	KECAMATAN	HASIL PEMILU TAHUN 1982						HASIL PEMILU TAHUN 1987 KHUSUS UNTUK DPRD II										REKES - RANGKAI
		PEMILIH	TPS	PPP	GOLKAR	%	PDI	PEMILIH	TPS	KIRKA	LIFUTAN	20/4/	GOLKAR	%	PPP	PDI	JUMLAH	
1.	KOTA KLATEN	37.430	101	7.373	18.355	55,91	7.102	42.587	114	59,58%	55.375	59,58	22.641	61,51	6.838	7.330	36.309	
2.	KETANDAN	37.059	113	13.236	13.667	40,81	6.586	42.486	113	49,98%	21.227	49,96	17.879	47,33	12.541	7.251	37.771	
3.	KEBONARUM	28.662	103	5.702	16.778	62,40	4.407	32.315	99	65,95%	21.310	65,94	18.645	64,21	5.141	5.254	29.041	
4.	W E D I	27.680	99	5.340	14.873	58,90	5.039	30.355	99	63,66%	19.325	63,66	17.660	64,79	4.927	4.669	27.256	
5.	JOCONALAN	27.956	105	4.093	16.853	64,20	5.034	30.713	105	65,33%	20.064	65,32	19.606	64,80	3.844	6.264	28.714	
6.	PRAMBANAN	21.473	74	2.436	13.637	69,89	3.438	24.055	74	69,45%	16.706	69,44	16.426	76,27	1.337	3.275	21.538	
7.	KARANGRENGKO	19.127	76	3.087	11.877	68,15	2.467	21.011	76	64,48%	13.549	64,48	13.450	72,08	1.776	3.435	18.561	
8.	GANTIWARNO	21.082	84	2.973	12.348	64,56	3.804	22.854	84	65,73%	15.021	65,72	15.133	72,72	2.536	3.142	20.811	
9.	MANTISRENGGO	20.024	59	2.787	11.237	62,09	4.073	21.820	58	65,72%	14.340	65,71	13.373	70,05	1.975	3.744	19.092	
10.	KEMALANG	17.313	56	691	13.337	83,06	2.029	18.157	56	73,13%	13.287	73,17	13.636	81,98	5.579	2.419	16.634	
11.	DELANGGU	22.619	92	4.027	14.423	68,09	2.733	25.167	89	70,71%	17.795	70,70	15.888	69,75	3.463	3.427	22.778	
12.	C E P E R	28.916	96	8.053	13.527	50,54	5.183	32.409	96	50,54%	16.379	50,53	15.260	52,74	7.557	6.115	28.932	
13.	JUWIRING	29.037	96	8.713	15.322	56,86	2.914	31.448	96	59,14%	18.599	59,14	17.270	61,62	7.232	3.525	28.027	
14.	WGNOSARI	28.322	101	6.008	14.284	55,53	5.431	32.098	101	62,52%	20.068	62,52	15.937	58,18	5.540	6.839	23.366	
15.	JATINOM	27.709	98	5.127	17.135	67,80	3.034	30.845	85	69,92%	21.569	69,92	19.163	69,58	4.752	3.624	27.539	
16.	POLANHARJO	23.106	83	4.863	13.309	62,59	3.089	25.090	83	68,79%	17.260	68,79	15.305	67,22	4.402	3.061	22.768	
17.	T U L U N G	26.565	95	5.946	51.043	62,55	3.022	29.038	95	36,67%	18.489	63,67	15.024	63,74	5.506	3.610	25.140	
18.	KARANGMOM	24.967	97	7.478	12.478	55,77	2.418	26.836	94	60,24%	16.166	60,23	14.436	69,18	6.562	3.397	24.395	
19.	P E D A N	23.140	77	4.322	12.020	56,80	4.818	25.225	75	52,47%	13.236	52,47	11.360	53,13	3.681	6.731	22.322	
20.	B A Y A T	29.936	104	6.743	14.346	53,58	5.687	32.471	114	61,99%	20.129	61,99	16.254	57,10	6.560	5.652	28.466	
21.	C A W A S	34.343	125	4.582	22.533	71,75	4.287	36.942	125	71,73%	26.499	71,73	25.255	77,03	3.606	3.924	32.785	
22.	T R U C U K	36.728	105	6.708	20.110	60,31	6.524	40.620	104	58,10%	23.602	58,10	21.314	58,85	6.599	8.236	36.053	
23.	KARANGDOWO	25.596	91	2.934	18.598	77,83	2.447	88.928	91	78,39%	22.677	78,39	20.967	80,74	1.958	3.645	25.370	
: J U M L A H		629.156	2144	123.127	346.140	61,25	95.831	680.592	2130	62,82%	429.452	63,09	392.287	64,32	109.512	103.069	609.868	

KLATEN, 23 SEPTEMBER 1987  
 DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA  
 DAERAH TINGKAT II KLATEN  
 Ketua, GOLONGAN KARYA Sekretaris,  
 DATI - II  
 RANTIMAN SUYONO      HAMBANG PRIYAKSODO, SE  
 NPAG : 1223000002      NPAG : 1223000006

PASANG SURUT PROSENTASE PEMILU 1982 - 1987  
 BAGI PARPOL DAN GOLKAR DI DAERAH KABUPATEN KLATEN

GOLONGAN KARYA

Nomor	KECAMATAN	PROSENTASE HASIL PEMILU		SELISIH %	KETERANGAN
		1982	1987		
1	2	3	4	5	6
1.	KOTA KLATEN	18.355 (55,91 %)	22.641 (61,51 %)	5,6 %	N a i k
2.	KETANDAN	13.667 (40,81 %)	17.879 (47,33 %)	6,52%	N a i k
3.	W E D I	14.873 (58,90 %)	17.660 (64,79 %)	5,89%	N a i k
4.	KEBONARUM	16.778 (62,40 %)	18.646 (64,21 %)	1,81%	N a i k
5.	JOGONALAN	16.853 (64,20 %)	18.606 (64,80 %)	0,60%	N a i k
6.	GANTIMARNO	12.348 (64,56 %)	15.133 (77,72 %)	8,16%	N a i k
7.	PRAMBANAN	13.637 (69,89 %)	16.426 (76,27 %)	6,38%	N a i k
8.	MANISRENGGO	11.237 (62,09 %)	13.373 (70,05 %)	7,96%	N a i k
9.	KEMALANG	13.337 (83,06 %)	13.636 (81,98 %)	1,08%	<u>Turun</u>
10.	KARANGONGKO	11.877 (68,15 %)	13.450 (72,08 %)	3,93%	N a i k
11.	JATINOM	17.185 (67,80 %)	19.163 (69,58 %)	1,78%	N a i k
12.	KARANGANOM	12.478 (55,77 %)	14.436 (58,18 %)	2,41%	N a i k
13.	T U L U N G	15.043 (62,65 %)	16.024 (63,74 %)	1,09%	N a i k
14.	POLANHARJO	13.309 (62,59 %)	15.305 (67,22 %)	4,63%	N a i k
15.	DELANOGU	14.423 (68,09 %)	15.888 (69,75 %)	1,66%	N a i k
16.	WONOSARI	14.284 (55,53 %)	15.937 (56,18 %)	0,65%	N a i k
17.	JUWIRING	15.322 (56,86 %)	17.270 (61,62 %)	4,76%	N a i k

1	2	3	4	5	6
18.	C E P E R	13.527 (50,54 %)	15.280 (52,74 %)	2,20 %	N a i k
19.	P E D A N	12.020 (56,80 %)	11.860 (53,13 %)	3,67 %	<u>T u r u n</u>
20.	KARANGDOWO	18.598 (77,88 %)	20.967 (80,74 %)	2,86 %	N a i k
21.	C A W A S	22.533 (71,76 %)	25.255 (77,03 %)	5,27 %	N a i k
22.	T R U C U K	20.110 (60,31 %)	21.218 (58,85 %)	1,46 %	<u>T u r u n</u>
23.	B A Y A T	14.346 (53,58 %)	16.254 (57,10 %)	3,52 %	N a i k
	J U M L A H	346.140 (61,25 %)	392.287 (64,32 %)	3,07 %	N a i k

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

Lampiran : IV a

DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA  
DAERAH TINGKAT II KLATEN

HASIL PROSENTASE PEMILU 1987 DIBANDING DENGAN  
PEMILU TAHUN 1971, 1977, 1982

No. : KECAMATAN	P . P . P .				D O L K A R				P . D . I .			PENJELASAN	
	1971	1977	1982	1987	1971	1977	1982	1987	1971	1977	1982		1987
1. KOTA KLATEN		19,35	22,46	18,58		50,25	55,91	61,51		30,40	21,63	19,91	
2. KETANDAN		38,33	39,52	33,47		31,61	40,81	47,33		30,04	19,57	19,20	
3. KECHILAN		18,76	21,20	17,70		52,84	62,40	64,21		28,40	16,40	18,09	
4. W E D I		19,64	21,15	18,08		40,29	58,90	64,79		40,07	19,95	17,13	
5. JOGCHALAN		13,63	15,59	13,39		44,83	64,20	64,80		41,54	16,40	18,09	
6. GANTWARNO		15,07	15,55	12,19		47,40	64,56	72,72		37,53	20,21	21,81	
7. PRAMBANAN		12,20	12,49	8,33		54,67	69,89	76,27		33,03	19,89	15,09	
8. MANISRENGGO		15,22	15,40	10,34		48,09	62,09	70,05		36,69	17,62	15,20	
9. KEMALANG		3,80	4,30	3,48		63,05	83,06	81,98		33,15	22,51	19,61	
10. KARANGRENGGO		13,81	17,70	9,32		56,04	68,15	72,08		30,15	12,64	14,64	
11. JATENGM		17,32	20,23	17,26		46,32	67,80	69,58		36,16	14,15	18,48	
12. KARANGMCM		35,02	33,42	26,90		45,38	55,77	58,18		19,60	11,97	13,16	
13. POLANHARJO		22,54	22,90	19,34		50,63	62,69	67,22		26,83	14,51	13,44	
14. P U L U N G		24,59	24,76	21,90		56,53	62,65	63,74		18,88	12,59	14,36	
15. DELANGGU		20,20	19,01	15,20		55,80	68,09	69,75		24,00	12,90	15,05	
16. C E P E R		28,85	30,09	26,12		38,30	50,54	52,74		32,85	19,37	21,14	
17. JUMIRING		27,42	32,32	25,80		41,66	56,86	61,62		30,92	10,82	12,58	
18. WGNOSARI		25,73	23,36	19,53		51,72	55,53	56,18		27,55	21,11	24,29	
19. P E D A N		18,76	20,43	16,49		37,54	56,80	53,13		46,70	22,77	30,38	
20. B A T A T		25,28	25,18	23,05		30,03	53,58	57,10		43,99	21,24	19,85	
21. C A W A S		13,26	14,59	11,-		42,40	71,76	77,03		44,34	13,65	11,97	
22. KARANGDOWO		11,09	11,87	7,54		43,40	77,88	80,74		35,51	10,25	11,72	
23. T R U C U K		16,70	20,12	18,30		37,30	60,31	58,85		56,00	19,57	28,85	
: J U N L A H		20,27	21,79	17,96		46,41	61,25	64,32		33,32	18,96	17,72	

KLATEN, 23 SEPTEMBER 1987  
 DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA  
 DAERAH TINGKAT II KLATEN  
 K e t a k a B A T I - I I Sekretaris,  
 KAB. KLATEN  
 RANTIMAN SUYONO BANTANG PRIYAMBODO, SH  
 NPAG:1223000002 NPAG:1223000006



Hasil perolehan suara tersebut jelas mempengaruhi perolehan suara kursi masing-masing OPP di DPRD Klaten. PPP mendapat perolehan kursi yang sama. Pada Pemilu 1982 dan 1987 tetap mendapat 7 kursi. Golkar mendapat tambahan kursi, pada Pemilu 1982 mendapat 20 kursi dan Pemilu 1987 mendapat 23 kursi. PDI mendapat tambahan 1 kursi yaitu pada Pemilu 1982 mendapat 5 kursi dan Pemilu 1987 mendapat 6 kursi. Hasil perolehan dan prosentase pemilu dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Secara umum, Golkar mengalami kenaikan perolehan suara di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Basis PPP pada umumnya rontok dalam Pemilu 1987 dan basis Golkar tampak semakin kokoh. Banyak daerah basis Golkar pada Pemilu 1982 dapat tetap dipertahankan pada Pemilu 1987. Sementara itu beberapa daerah kemenangan Golkar dapat berubah menjadi daerah basis, dan semua daerah kekalahan Golkar pada Pemilu 1982 mampu meningkat menjadi daerah kemenangan Golkar. PDI mengalami peningkatan lebih banyak daripada PPP karena PDI mampu mengubah dan meningkatkan kemenangannya. Pada Pemilu 1987 Golkar mengalami juga mengalami kekalahan dengan PPP dan PDI di beberapa daerah. Daerah-daerah itu antara lain, PPP mengalami kemenangan seperti Desa : Ngawen, Kahuman, Kwaren, Pepe, Tempursari, Candirejo, Drono, Belangwetan, yang terletak di Kecamatan Ketandan; Desa Buntalan Kecamatan kota Klaten; Desa Basin di Kecamatan Kebonarum; Desa Kenaiban di Kecamatan Juwiring; Desa Ngawonggo, Tegalrejo, Meger di Kecamatan Ceper; Desa Jemawan di Kecamatan Jatinom; Desa Wangen di Kecamatan Polanharjo; Desa Kaligawe di Kecamatan Pedan; Desa Pucangmiliran di Kecamatan Tulung ;



Desa Kadirejo di Kecamatan Karanganyar; Desa Tawangrejo di Kecamatan Bayat; Desa Kradenan di Kecamatan Trucuk. Sedangkan PDI mengalami kemenangan apabila dibandingkan Golkar yang terdapat di Kecamatan Ketandan Desa Senden; Desa Teloyo di Kecamatan Wonosari; Desa Sajen di Kecamatan Trucuk.

Hasil Pemilu 1987 dapat diperkirakan bahwa telah terjadi perubahan sikap, memilih, setidaknya-tidaknya pergeseran pilihan pada sebagian masyarakat di daerah PPP dan tampaknya pilihan mereka kini diberikan lebih banyak pada Golkar daripada kepada PDI, karena kenaikan prosentase yang menunjukkan proporsi perolehan suara untuk PDI tidak terlalu besar.

#### D. Evaluasi Kemenangan Golkar

Golkar di Kabupaten Klaten selalu memperoleh kemenangan dari pemilu ke pemilu baik pada Pemilu 1982 dan Pemilu 1987. Pemilu telah berlangsung dengan baik, aman dan tertib dan Golkar selalu mengalami kemenangan dari pemilu ke pemilu. Faktor pendukung kemenangan Golkar antara lain :

Pertama, Golkar lebih siap dibanding kedua OPP yang lain. Dari segi kesiapan menghadapi pemilu, memang Golkar dapat paling siap sebab jauh sebelum kampanye resmi berlangsung Golkar terjun ke daerah-daerah untuk mengadakan bhakti sosial seperti pengobatan masal, khitanan masal, hiburan rakyat, bantuan-bantuan pada sekolah-sekolah dan sebagainya yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kesiapan

Golkar juga tercermin dengan adanya dana dan tenaga dari berbagai macam profesi yang lebih banyak. Disamping itu kesiapan Golkar juga tampak pada penggalangan yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya beserta pemantapannya. Golkarlah yang paling rapi dalam melakukan pendaftaran para anggotanya.

Kedua, Paket Undang-Undang No. 3 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Undang-undang ini membuat Golkar dapat mengatasi hambatan atas isu-isu Islam yang dilancarkan PPP. Citra PPP sebagai partai Islam dalam Pemilu 1987 tampaknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, lagi pula pendekatan-pendekatan Golkar kepada umat Islam sebelum sesudah kampanye lebih jelas wujudnya dibanding PPP. Hal ini dapat terlihat misalnya pada pembangunan-pembangunan mesjid yang dibantu Golkar. Disamping itu Golkarlah yang selama ini lebih menonjol dalam upaya memperjuangkan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini sudah tentu memberi pengaruh positif bagi citra Golkar.

Ketiga, Identifikasi Golkar dengan pembangunan dan pemerintah merupakan faktor penentu kemenangan Golkar sejak Pemilu 1971. Berbagai keberhasilan pembangunan sering menjadi bahan kampanye Golkar yang ampuh. Disamping itu peraturan kampanye yang melarang OPP melakukan penilaian negatif atas kebijaksanaan pemerintah menutup peluang adanya kritik langsung OPP terhadap pemerintah. Kaitan antara

Golkar dan Pemerintah barangkali adalah faktor yang paling menguntungkan Golkar. Sementara itu susunan kepengurusan Golkar sendiri memperlihatkan bahwa dari tingkat Dewan peminanya sampai pimpinan pedesaan sebagian besar adalah pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini sudah tentu memudahkan Golkar menghimpun kekuatan rakyat dan memperoleh fasilitas-fasilitas dalam kampanye.

Keempat, Peranan birokrasi dan birokrat yang juga turut menentukan kemenangan Golkar. Birokrasi bukan hanya meyakinkan dan mengajak tetapi juga merupakan "perangkat" untuk menggiring massa pemilih menentukan pilihannya kepada Golkar. Tampaknya citra birokrasi sebagai "priyayi" yang mempunyai peranan apa saja dalam pelayanan kehidupan masyarakat sehari-hari, mengajak orang untuk menerima Golkar sebagai suatu kenyataan, dengan pertimbangan agar tidak mendapat kesulitan di kemudian hari. Di lain pihak para birokrat daerah (perangkat atau pejabat pemerintah daerah) tampaknya juga merasa perlu mencari angka kredit demi karirnya, maka mereka terlihat begitu besar ambisinya untuk memenangkan Golkar.

Kelima, Faktor kebijaksanaan massa mengambang di pedesaan dapat pula dianggap sebagai faktor yang menguntungkan Golkar. Bagi Golkar hal ini tidak terlalu memusingkan, sebab aparat-aparat pemerintah di pedesaan seperti kader teritorial penggerak desa (karakterdes) mempunyai ikatan yang erat dengan Golkar. Golkar melalui aparat-aparat ini berupaya menghimpun suara di pedesaan dapat berjalan untuk keuntungan Golkar.

Keenam, Masyarakat pedesaan banyak yang sebagai silent voters atau merupakan suara yang diam yang tidak ikut dalam pelaksanaan kampanye. Namun pada sisi lain, dalam diri masyarakat desa sebenarnya juga telah berlangsung suatu pemakluman bahwa Golkar sebagai partai pemerintah dinilai sebagai satu-satunya kekuatan sosial politik pada saat ini yang memberikan harapan bagi keberlangsungan ketenangan hidup kalangan masyarakat. Demikian pula, mereka yang tidak mau Golongan Putih (Golput) dan tidak rela memberikan suaranya kepada PPP, kemungkinan pilihannya akan dijatuhkan pada Golkar, karena PDI belum dianggap sebagai kekuatan alternatif.

Sekalipun Golkar kembali mendominasi kemenangan dalam pemilu, namun masih terlihat beberapa masalah yang perlu dibenahinya. Dalam era Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik, Golkar belum dapat dikatakan mampu menyesuaikan diri sepenuhnya, seperti masalah dibawah ini.

Satu hal yang menonjol selama Pemilu 1987 adalah sikap ABRI yang mulai lebih netral terhadap ketiga OPP. Hal ini sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya dimana ikatan ABRI dan Golkar masih jelas terlihat. Walaupun demikian para tokoh pensiunan ABRI dan keluarganya masih tetap mendukung Golkar.

Pada segi lain pendekatan yang dilakukan Golkar terhadap satu golongan (Islam) masih mendapat prioritas. Tampaknya Golkar belum menemukan modus baru dalam mendudukkan Islam dengan agama lainnya secara berimbang. Hal itu di-

sebabkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 pada hakekatnya menghendaki setiap organisasi politik terbuka bagi semua golongan tanpa adanya perbedaan.

Permasalahan lain yang dihadapi Golkar adalah belum mampunya mendorong partisipasi generasi muda. Generasi muda ini umumnya adalah generasi massa mengambang yang lahir setelah tahun 1965. Mereka pada umumnya mendambakan hal-hal yang bersifat demokratis dan keadilan.

Sebagai organisasi politik yang memenangkan mayoritas suara di DPRD wajarlah kiranya Golkar menampilkan dirinya sebagai partai pelopor yang memperjuangkan nilai-nilai kualitatif dari pembangunan, seperti keadilan demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Disamping itu Golkar sebenarnya semakin dituntut harus lebih menyuarakan aspirasi rakyat sebab merekalah sebenarnya yang harus diwakili dan bukan mewakili sekelompok elit dalam masyarakat.

Golkar mampu memperoleh kemenangan di Kabupaten Klaten. Hal itu tidak berarti bahwa tantangan yang dihadapinya semakin berkurang. Justru sebaliknya, tantangan akan kebangkitan PDI dan PPP serta tanggapan-tanggapan orang-orang muda baik secara langsung maupun tidak langsung akan dihadapi Golkar. Golkar apabila ingin mempertahankan kedudukannya sebagai kekuatan sosial politik yang terbesar di Kabupaten Klaten, maka Golkar harus tumbuh sebagai kekuatan pemacu pembangunan yang dinamis dan kreatif. Dengan demikian peningkatan kualitas baik organisasi maupun personalianya harus menjadi perhatian dalam upaya mengem -



bangkan peran politiknya di masa-masa yang akan datang.  
Kesimpulan akan diuraikan dalam bab terakhir sebagai  
penutup uraian ini.



BAB VIII  
KESIMPULAN

Dinamika Golkar merupakan usaha pembaharuan dalam rangka mengarahkan dan menyelaraskan organisasi Golkar didalam menghadapi segala tuntutan masyarakat yang selalu berkembang. Perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari faktor kondisi wilayah dan perubahan perkembangan jaman. Pada umumnya masyarakat tidak ingin ketinggalan jaman dan selalu berusaha untuk mengarah kepada pembangunan. Selama masa orde baru organisasi Golkarlah yang tampil sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Peran Golkar tidak mempunyai arti apabila Golkar kurang dapat melibatkan diri dalam masyarakat atau kurang mau memperhatikan gejala yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Peran Golkar akan sangat berarti jika Golkar mau memperhatikan gejala yang terjadi dalam masyarakat dan benar-benar dapat sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dan mampu merealisasikan janjinya.

Latar belakang ini diwarnai adanya ketidakstabilan politik yang pernah terjadi pada Pemilu 1971. Golkar yang tampil pada Pemilu 1971 merupakan fenomena baru dalam sistem politik Indonesia karena untuk menjawab perkembangan politik ketika itu. Sejak Pemilu 1971 Golkar merupakan

pendukung utama pemerintah orde baru dan hasilnya tampak mendukung posisi pemerintah dalam strategi pembangunan politik. Identifikasi Golkar dengan pemerintah dan pembangunan merupakan faktor penentu kemenangan Golkar secara mutlak di Indonesia dan di Kabupaten Klaten pada khususnya.

Kekalahan yang dramatis dialami partai politik dalam Pemilu 1971 dapat dipakai sebagai salah satu ukuran bahwa betapa lemahnya partai politik dan peranan mereka menunjukkan semakin merosot. Merosotnya peranan partai politik memberi peluang yang besar bagi pemerintah Soeharto untuk melaksanakan ide tentang penyederhanaan sistem kepartaian. Usaha ke arah itu sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1970, dan dalam waktu relatif singkat usaha tersebut telah mendatangkan hasil menjelang Sidang Umum MPR bulan Maret 1973 dengan berfusnya sembilan partai yang ada kedalam dua partai baru.. PPP yang merupakan partai baru dari empat partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti.<sup>78</sup> PDI merupakan wadah baru dari lima partai yang terdiri dari PNI, IPKI, MURBA, PARKINDO, Partai Katolik.<sup>79</sup> Pada Pemilu 1977 Golkar berusaha keras untuk mengidentikkan diri dengan suatu partai yang terdiri dari manusia-manusia modern yang mengusahakan modernisasi dan pembangunan Indo -

---

<sup>78</sup> Umaidi Radi, Strategi PPP (Jakarta : Integrita Press, 1984), hlm. xix; Syaifudin Zuhri, PPP NU Dan MI Gejolak Wadah Politik Islam ( Jakarta : Integrita Press, 1984), hlm. 3

<sup>79</sup> Alfian, Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia (Jakarta : Gramedia, 1978), hlm. 30

nesia. Melawan isu ideologis dan agama, Golkar tidak punya cara lain daripada bersandar pada pembangunan dan modernisasi. Pengalaman yang dialami Golkar di Kabupaten Klaten dalam Pemilu 1977 telah terjadi penurunan jumlah suara dan jumlah kursi yang diraihnya di DPRD Klaten. Sedangkan PPP mengalami peningkatan dan PDI tetap tidak terjadi peningkatan dalam meraih kursi walaupun suara nominalnya meningkat yang relatif kecil.

Berlangsungnya pemilu 1982 masih didasari oleh Undang-undang No. 3 tahun 1975 yang menekankan asas ciri bagi organisasi politik disamping Pancasila dan UUD 1945. Tema-tema kampanyenya telah tampak mulai mengumandangkan program-program pembangunan tetapi disertai oleh nuansa-nuansa yang mencerminkan asas cirinya masing-masing. Dibalik hingar bingarnya kampanye Pemilu 1982 itu sebenarnya tersirat suatu masalah fundamental bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, yakni pertentangan antara ideologi-agama (Islam) dan Pancasila. Kehidupan politik nasional menjelang kampanye pemilu memang ditandai oleh gejala meningkatnya gerakan-gerakan "Islam militan" yang anti Pancasila.<sup>80</sup> Disamping itu tercermin juga dalam pidato kampanye oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud yang menyatakan bahwa pada saat itu ada sekelompok orang Indonesia yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain yaitu Islam. Persoalan ini tampaknya juga berpeng-

---

<sup>80</sup> Gejala meningkatnya gerakan Islam militan itu tercermin pada Pidato Presiden Soeharto di hadapan ABRI yang intinya menandakan perlunya kewaspadaan karena masih adanya "kekuatan-kekuatan" yang anti Pancasila. Tempo, 14 Juni 1980, hlm. 8

aruh terhadap organisasi kekuatan sosial politik dalam menghadapi Pemilu 1982. Dengan demikian pemerintah dan Golkar lebih meningkatkan kewaspadaannya dan secara intensif mengadakan penggalangan terhadap masyarakat. Persoalan yang dihadapi Golkar secara nasional akan berpengaruh juga pada Golkar di Kabupaten Klaten, dan karena Golkar pada umumnya lebih siap dibanding OPP yang lain maka Golkarpun dapat meraih kemenangan dengan meningkatkan jumlah suaranya dan perolehan kursi di DPRD Klaten. Disamping itu pada Pemilu 1982 masih cukup menonjol keberingasan sosialnya namun masih dapat dikatakan relatif kecil untuk di wilayah Kabupaten Klaten.

Perbedaan yang terjadi pada Pemilu 1987 adalah telah di keluarkannya paket undang-undang antara lain Undang-undang No. 3 tahun 1985 yang menekankan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi peserta pemilu. Hal ini berarti sejak saat itu telah terjadi suatu perkembangan baru dalam kehidupan politik sebagai suatu langkah lebih jauh dalam proses pembangunan politik. Pada masa sebelum berlakunya ketentuan itu masih terlihat adanya OPP yang bersifat eksklusif seperti PPP yang memeluk agama Islam. Berdasarkan ketentuan itu pula maka sifat keanggotaan OPP terbuka dan perseorangan. Hal itu berarti keanggotaan OPP terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur untuk menjadi anggota tanpa membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya. Sedangkan sifat perorangan keanggotaan OPP berarti tidak hanya hubungan formal organisatoris antara parpol dan Golkar dengan ormas-ormas yang bernaung di bawah atau onderbouw organisasi politik.



Lepasnya hubungan formal organisatoris antara ormas dan orpol tidak menutup kemungkinan seseorang anggota ormas secara perorangan menjadi pula anggota organisasi politik. Pelaksanaan Pemilu 1987 ini, Golkar di Kabupaten Klaten tampak tidak tergoyahkan dominasinya sebab dari pemilu ke pemilu selalu memperoleh kemenangan. Hal itu didukung pula kesiapan Golkar yang telah siap terjun dalam kancah pemilu dan juga kondisi masyarakat yang baik. Dengan demikian faktor tersebut memudahkan Golkar dalam mengadakan penggalangan terhadap para kadernya yang akan diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, diharapkan dapat berhasil di dalam mengadakan pendekatannya terhadap masyarakat. Pendekatan yang dilakukan Golkar tampak berhasil apabila dilihat dari hasil pemilu yang diraih Golkar. Hasil akhir Golkar Kabupaten Klaten dalam Pemilu 1987 menunjukkan adanya suatu peningkatan perolehan kursi di DPRD Klaten dan peningkatan perolehan jumlah suaranya. Dibanding dua OPP yang lain bahwa PPP mengalami penurunan jumlah suara dan memperoleh kursi di DPRD tetap, sedangkan PDI dapat meningkatkan jumlah suara dan perolehan kursi di DPRD Klaten.

Perolehan hasil akhir yang dicapai OPP khususnya Golkar dari Pemilu 1971 sampai Pemilu 1987 tampak adanya perubahan. Perubahan tersebut terjadi pada meningkatnya jumlah penilih, terjadinya pergeseran pola memilih masyarakat, perubahan perolehan jumlah suara dan perubahan jumlah kursi yang diraih di DPRD Klaten. Hal itu dapat dikatakan sebagai gejala adanya dinamika dalam kehidupan masyarakat. Dinamika masyarakat akan terlihat dalam perolehan hasil akhir setiap pemilu yang selalu menunjukkan adanya peningkatan maupun penurunan. Hal itu

dapat dilihat dari hasil OPP pada setiap pemilu seperti pemilu 1971, Golkar memperoleh kemenangan dibanding DPP yang lain; pada Pemilu 1977 Golkar tetap memperoleh kemenangan tetapi perolehan suara dan kursi menurun sedangkan PPP dan PDI memperoleh jumlah suara yang meningkat dan dapat menambah jumlah kursi; pada Pemilu 1982, Golkar dapat lebih meningkatkan perolehan suara dan perolehan kursi begitu juga PPP sedangkan PDI mengalami penurunan jumlah suara dan perolehan kursi di DPRD Klaten secara drastis; pada Pemilu 1987 Golkar tetap unggul dalam memperoleh kemenangan dibanding PPP dan PDI, disebabkan semakin meningkatnya jumlah suara, dan perolehan kursi di DPRD Klaten. PPP mengalami penurunan jumlah suara secara nominal dan perolehan kursi tetap. PDI dapat lebih meningkatkan jumlah suara dan juga perolehannya kursi di DPRD Klaten.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap PPP, Golkar dan PDI. Dinamika yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat akan berpengaruh juga terhadap Golkar yang selama ini unggul di Kabupaten Klaten. Dengan demikian bagi Golkar harus selalu tanggap terhadap adanya gejolak yang ada dalam masyarakat dan dapat menyelaraskan dirinya. Golkar yang telah dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya selalu dituntut agar mampu merealisasikannya. Golkar terhadap masyarakat berfungsi tidak hanya sebagai motivator tetapi juga seharusnya dapat sebagai pembina masyarakat ke arah pembangunan baik fisik maupun mental diri masyarakat. Tujuan tersebut akan dapat tercapai jika

Golkar selalu melaksanakan koreksi terhadap situasi dan kondisi maupun organisasinya. Disamping itu diperlukan juga suatu peningkatan kualitas bagi organisasi dan personalianya dalam pelayanannya terhadap masyarakat yang kadang-kadang nikmatnya kekuasaan sering melalaikan orang pada tujuannya semula.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Alfian  
1986 Masalah Dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia  
Jakarta : Gramedia
- Alfian  
1986 Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia  
Jakarta : Rajawali Perss
- Alfian  
1978 Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia  
Jakarta : Gramedia
- Budiardjo, Miriam  
1977 Dasar-Dasar Ilmu Politik  
Jakarta : Gramedia
- Bulkin, Farchan  
1985 Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia  
Jakarta : LP3ES
- Gottschalk, Louis  
1975 Mengerti Sejarah  
Jakarta : Yayasan Penerbit UI
- Hendropuspita, D  
1989 Sosiologi Sistematis  
Yogyakarta : Kanisius
- Karim, Rusli  
1983 Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut  
Jakarta : Rajawali Pers
- Kusumaatmadja, Sarwono  
1989 Sketsa Politik Orde Baru  
Bandung : Citra Aditya Bhakti

- Moedjanto, G.  
1990 Tiga Dasa Warsa Atmajaya  
Jakarta : Yayasan Atmajaya
- Moertopo, Ali  
1974 Strategi Politik Nasional  
Jakarta : CSIS
- Nasution, A.H.  
1971 Kekaryaan ABRI  
Jakarta : Seruling Massa
- Pitirim, Sorokin A.  
1959 Social And Cultural Mobility  
London : Collier Macmillan Limited
- Pasaribu  
1982 Sosiologi Pembangunan  
Bandung : Transito
- Robert, Michel  
1962 Political Parties A Sociological Study Oligarchical Tendencies of Modern Democracy  
New York : Crowel-Collier
- Rais, Amien M.  
1986 Demokrasi Dan Proses Politik  
Jakarta : LP3ES
- Radi, Umaidi  
1984 Strategi PPP  
Jakarta : Integrita Press
- Sanit, Arbi  
1985 Perwakilan Politik Di Indonesia  
Jakarta : Rajawali
- Sanit, Arbi  
1988 Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan  
Jakarta : Rajawali
- Suryodinata, Leo  
1982 Political Parties And The 1982 In Indonesia  
Singapore : Institute of Southeast Asian Studies



- Sudarsono, Juwono  
1982 Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik  
Jakarta : Gramedia
- Sanit, Arbi  
1985 Swadaya Politik Masyarakat  
Jakarta : Rajawali
- Simorangkir  
1988 Hukum Dan Konstitusi  
Jakarta : Masagung
- Simatupang, TB.  
1987 Dari Revolusi Ke Pembangunan  
Jakarta : Gunung Mulia
- Soekanto, Soerjono  
1983 Sosiologi Suatu Pengantar  
Jakarta : Rajawali
- Sutopo, Scaays, M.  
1959 Indonesia  
Jakarta : Gramedia
- Sokowati, Suprpto  
1969 Pengarahannya Strategi Dan Taktik Dasar Untuk Memenangkan Orde Pembangunan atau Orde Pantjasila  
Djakarta : Sekbergolkar
- Wiyono  
1982 Organisasi Kekuatan Sosial Politik Indonesia  
Jakarta : Alumni
- Pratigny, Imam  
1983 Lahirnya Golongan Karya  
Jakarta : Yayasan Bhakti
- Zuhri, Syaifudin  
1984 PPP, NU Dan MI Gejolak Wadah Politik Islam  
Jakarta : Integrita Press

- N.N.  
1985 UU No. 3 Tahun 1985 Tentang Parpol Dan Golkar  
Jakarta : Ghalia Indonesia
- N.N.  
1985 UU No. 1 Tahun 1985 Tentang Pemilu  
Jakarta : Ghalia Indonesia
- N.N.  
1985 UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan  
Jakarta : Ghalia Indonesia
- N.N.  
1988 Ketetapan MPR No. II/MPR 1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara  
Yogyakarta : Lukman Offset
- N.N.  
1987 Data Pemilu 1971-1977-1982-1987  
Klaten : Dewan Penasehat Golkar
- N.N.  
1985 Penyelenggaraan Pendaftaran Pemilih Dan Jumlah Penduduk Indonesia  
Jakarta : Lembaga Pemilu
- N.N.  
1987 Diklat Karakterdes Golkar Pokok-Pokok Umum Golkar  
Jakarta : DPP Golkar
- N.N.  
1987 Diklat Karakterdes Golkar Tentang Penjelasan Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Golkar  
Jakarta : DPP Golkar
- N.N.  
1987 Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 1987  
Jakarta : DPP Golkar
- N.N.  
1984 Keputusan-Keputusan Musda II  
Klaten : DPD Golkar

N.N.

1988

Keputusan-Keputusan Musda III  
Klaten : DPD Golkar

Biro Pusat Statistik (BPS)

1982

Klaten Dalam Angka 1982  
Klaten : BPS

Biro Pusat Statistik (BPS)

1987

Klaten Dalam Angka 1987  
Klaten : BPS

Laporan BPP

1972

Sukses Organisasi  
Jakarta : BPP

B. Artikel :

Agus Abdul Hamid

"Melemahnya Partai Politik",  
Kesaksian Kaum Muda, 1988

David Reeve

"Memahami Keberadaan Golkar",  
Jurnal Ilmu Politik Jilid 4

Daniel Dhakidae

"Pemilu Di Indonesia Saksi Pasang  
Naik dan Pasang Surut Partai Po-  
litik", Prisma, No. 9, 1981

Ibrahim Ambong

"Hubungan ABRI Dan Golkar",  
Jurnal Ilmu Politik Jilid 6, 1990

Rahmat Witoelar

"Tantangan Baru Bagi Orsospol",  
Media Karya, Juni 1990

Suroso

"Pola Memilih Masyarakat Indonesia  
Suatu Pendalaman Terhadap Pemilu  
1971-1982", Analisa, 1983

Sigid Putranto Kusumawidagdo "Pembangunan Politik Orde Baru  
Dan Krisis Partisipasi", Prisma  
Januari 1985

Sudiharto Djiwandono, A.

"Pemilu Dan Pendidikan Politik",  
Analisa, No. 3, 1983

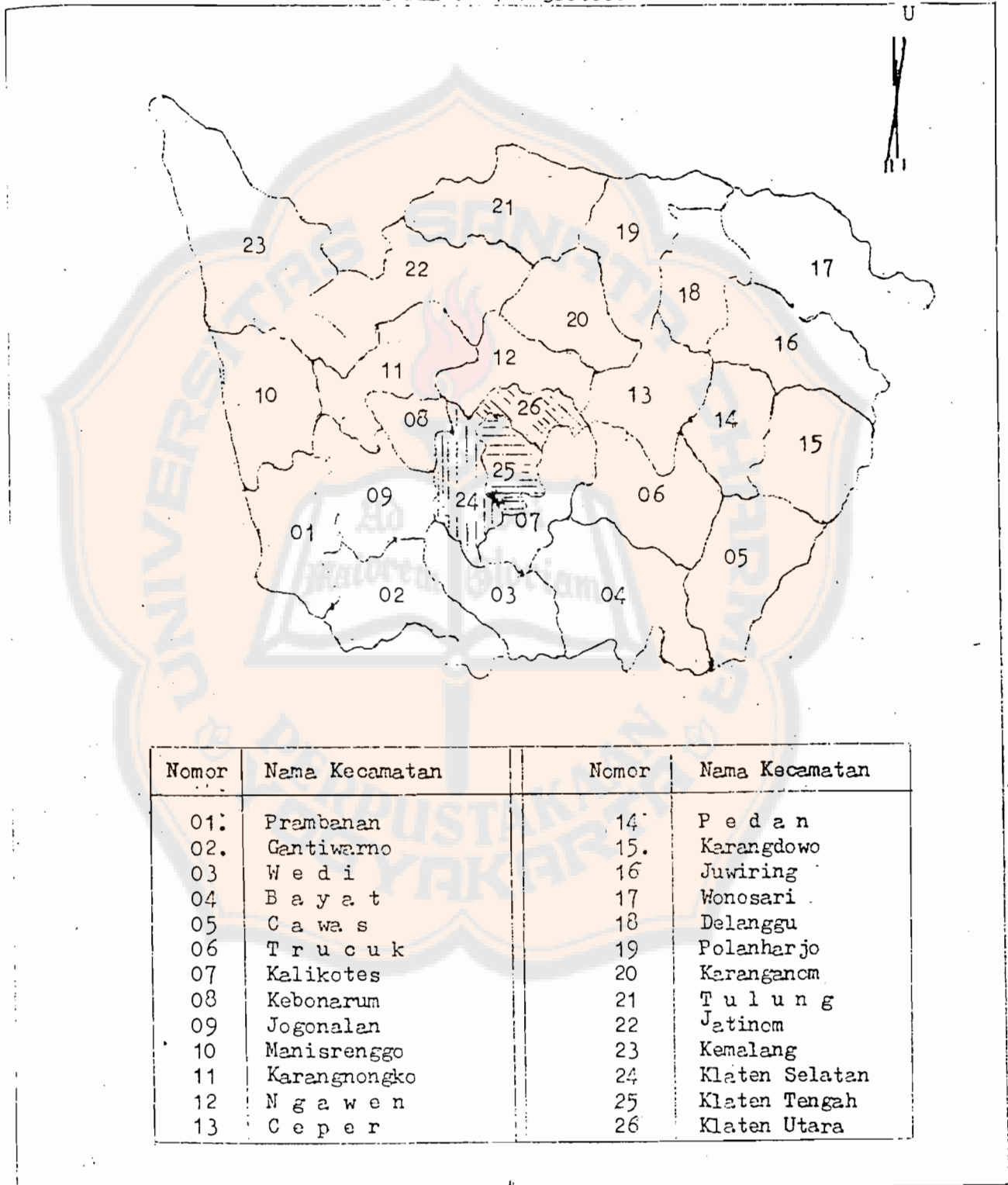
Tommi Legowo

"Pelaksanaan Pemilu 1982", Analisa  
No. 7, 1982

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

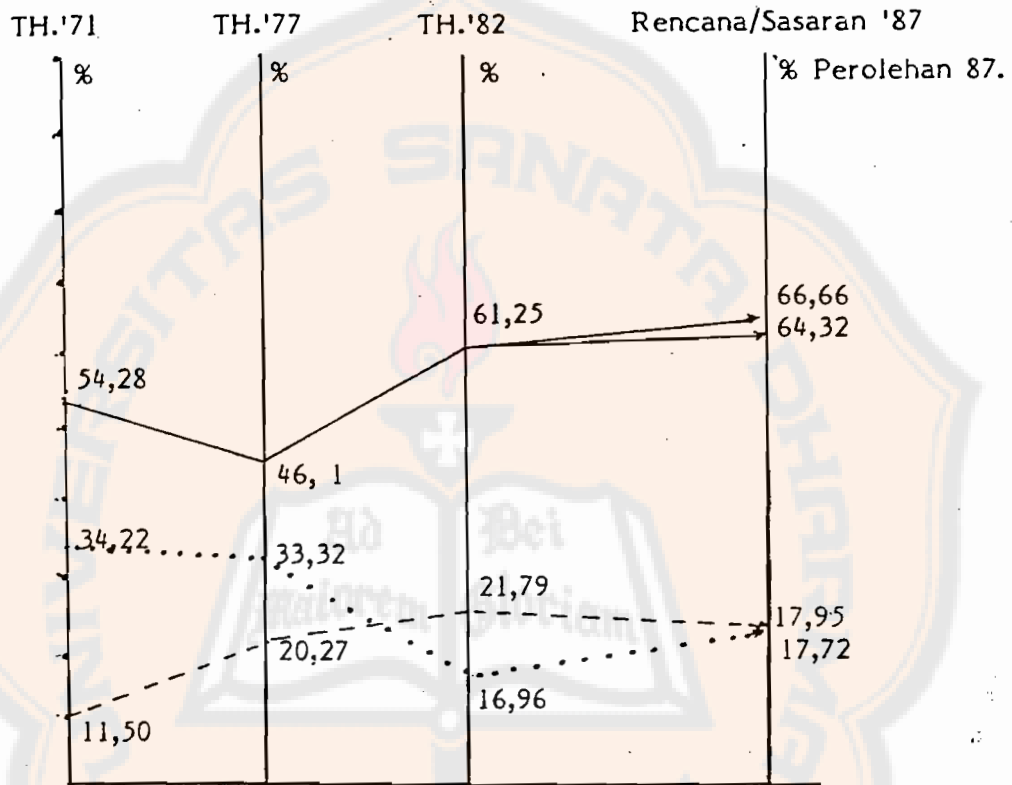
## SKETSA KABUPATEN KLATEN

SKALA : 1 : 300.000



**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**GRAFIK : HASIL PEMILU TAHUN '71-'77-'82-'87  
DAERAH TINGKAT II KLATEN.**



**KETERANGAN :** GOLKAR = \_\_\_\_\_  
P.P.P. = - - - - -  
P.D.I. = . . . . .

**HASIL PEMILU 1987.**

TINGKAT	PPP	GOLKAR	PDI
KAB. KLATEN	17,95 %	64,32 %	17,72 %
PROP. JATENG	18 %	68 %	14 %
NASIONAL/PUSAT	16,06 %	72,89 %	11,05 %



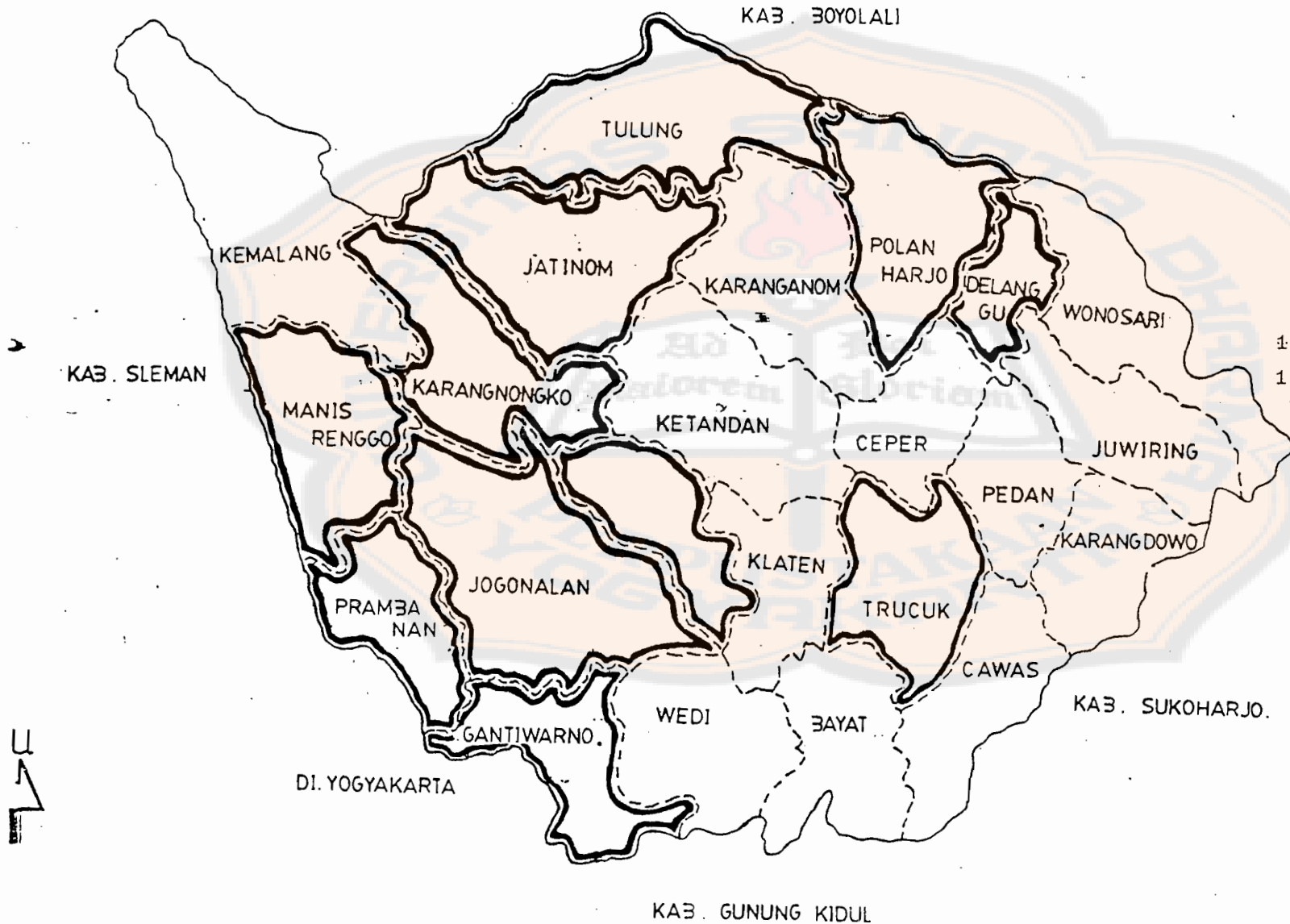
# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## KABUPATEN DATI II KLATEN

### PERSENTASE SUKSES PADA PEMILU 1982.

1. PRAMBANAN	: 62,40%
2. JOGONALAN	: 64,20%
3. GANTIWARNO	: 64,56%
4. PRAMDAMAN	: 69,89%
5. MANISRENGGO	: 62,09%
6. KARANGNONGKO	: 68,15%
7. JATINOM	: 67,80%
8. TULUNG	: 62,65%
9. POLAN HARJO	: 62,59%
10. DELANGGU	: 65,09%
11. TRUCUK	: 60,31%

SEDANG  
60% - 69%

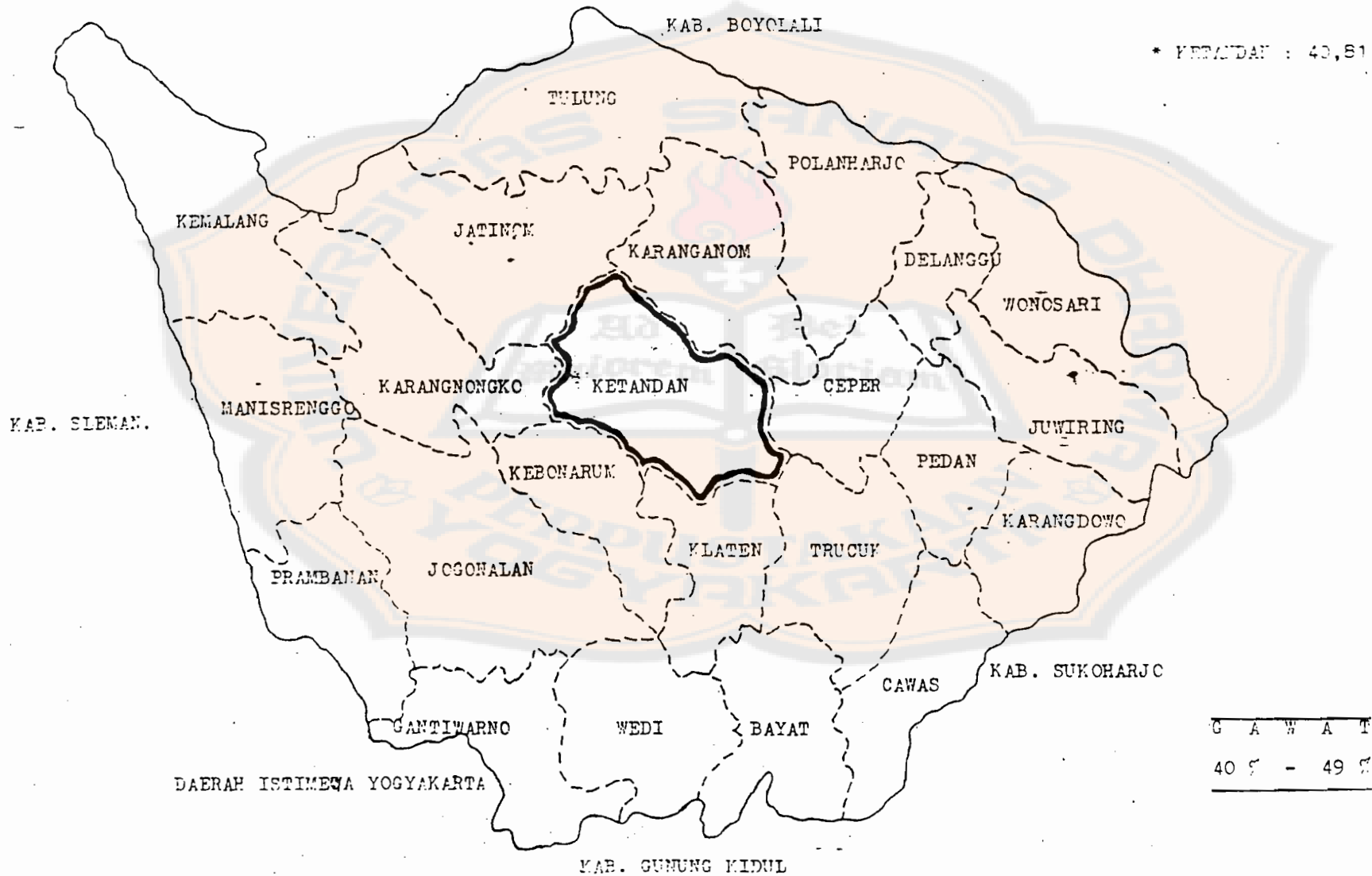


# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KABUPATEN BAWA II KILATEN

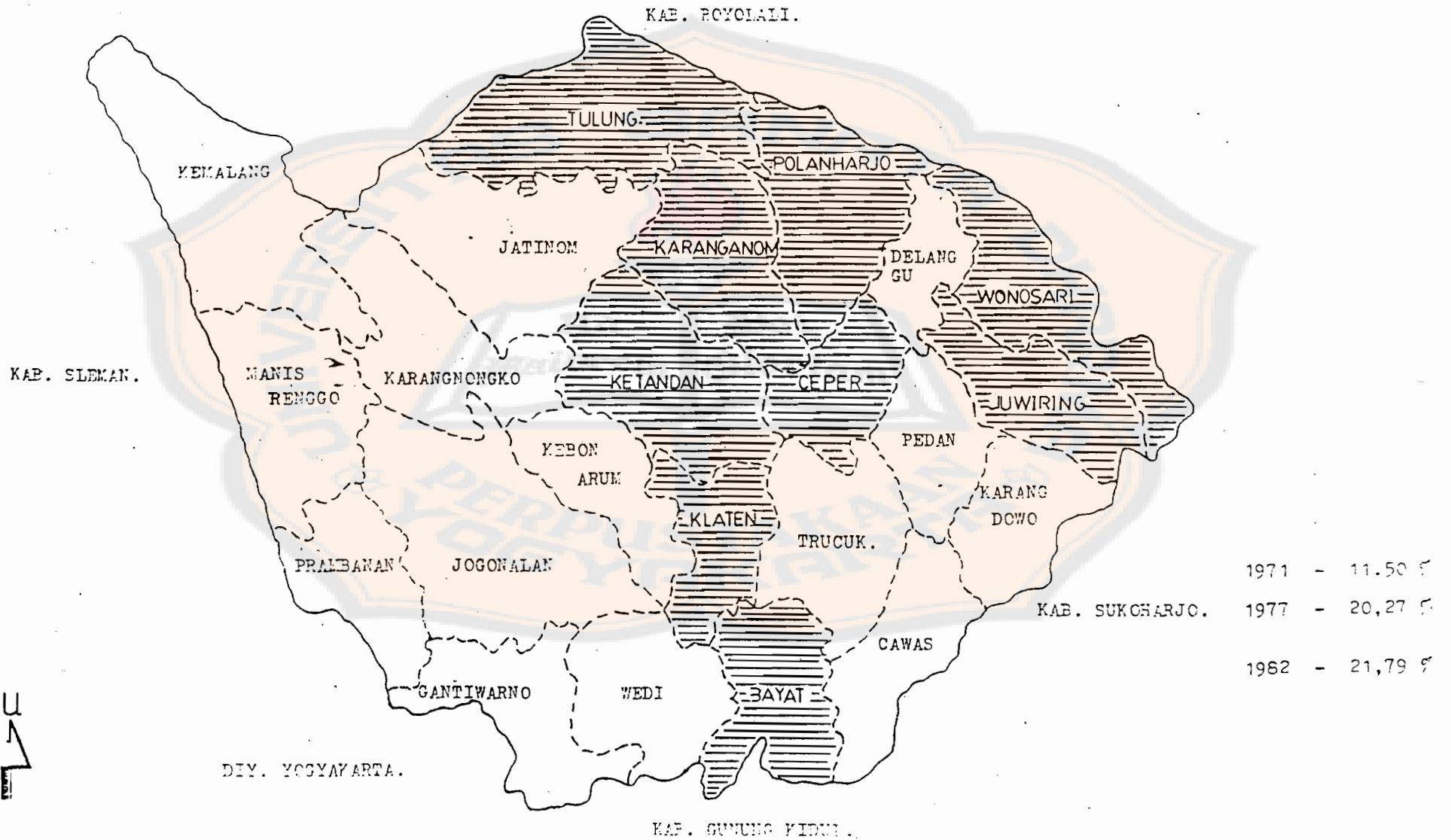
KABUPATEN BAWA  
BAWA BAWA 1982

\* KETANDAN : 40,81 %



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

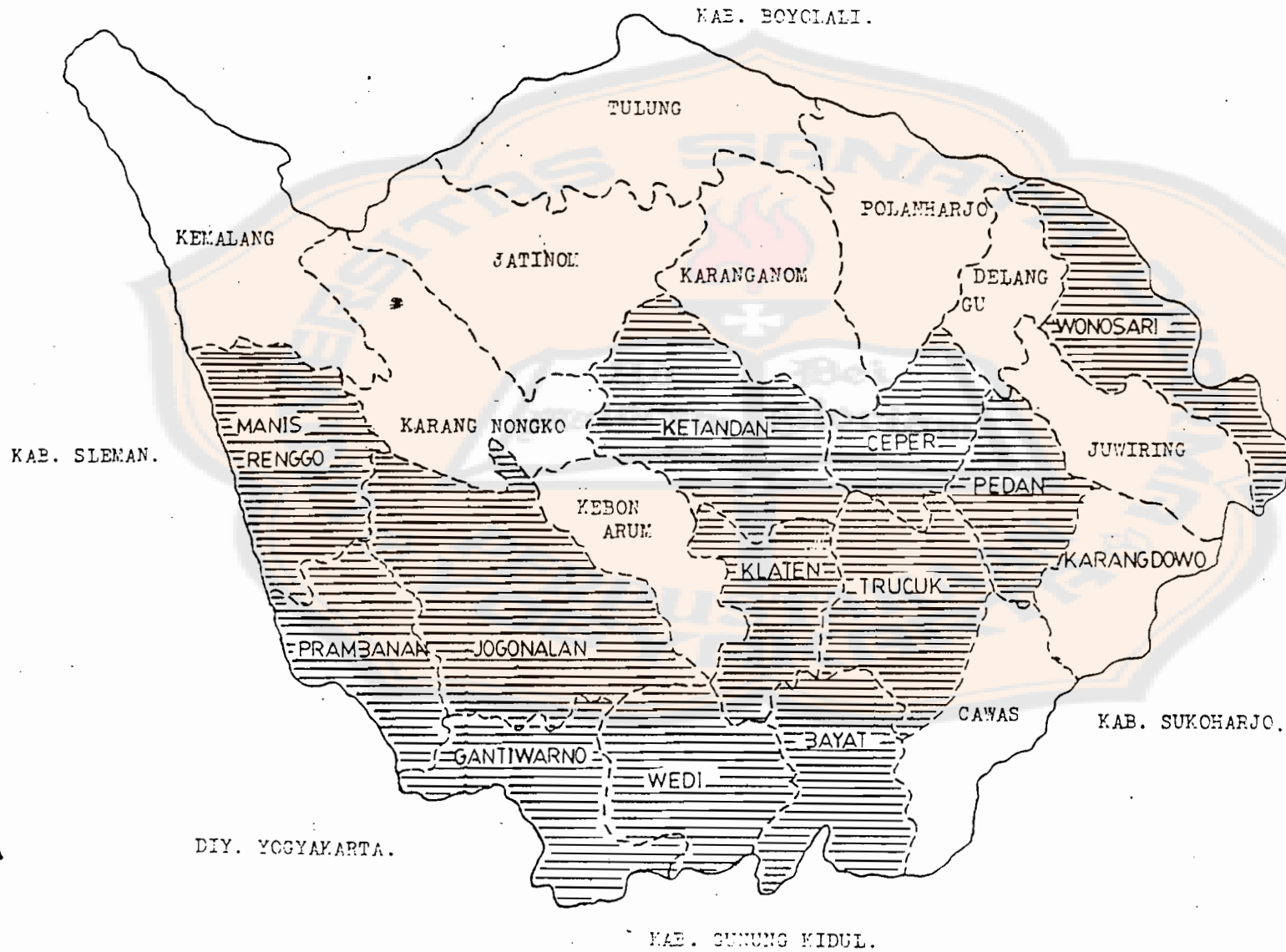
DAERAH DEKATAN YANG MENAIKAN PROSENTASE  
PPH MELIBATI RATA - RATA UNTUK KAB. KLATEN.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAERAH KECAMATAN YANG PROSEKASE PDI.

MELEBIHI RATA - RATA UNTUK KAB. KLATEN.



1971	-	34,22 %
1977	-	33,32 %
1982	-	16,96 %

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKSI NEGARA YANG PROGRESIF  
GOLONGAN MELEBIHI LIMA - LIMA UTUT KAW. KLATEN

